



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **STUDI PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN BUDIDAYA JAGUNG HIBRIDA DI NIGARI LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM**

## **SKRIPSI**



**ANDRYZAL  
06115036**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

**STUDI PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN  
BUDIDAYA JAGUNG HIBRIDA DI NAGARI LUBUK BASUNG  
KABUPATEN AGAM**

**OLEH :**

**ANDRYZAL  
06115036**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**



**STUDI PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN  
BUDIDAYA JAGUNG HIBRIDA DI NAGARI LUBUK BASUNG  
KABUPATEN AGAM**

**Oleh :**

**ANDRYZAL  
06115036**

**SKRIPSI**

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA PERTANIAN**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**



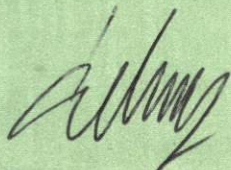
**STUDI PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN  
BUDIDAYA JAGUNG HIBRIDA DI NAGARI LUBUK BASUNG  
KABUPATEN AGAM**

**Oleh :**

**ANDRYZAL  
06115036**

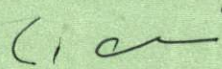
**MENYETUJUI :**

**Dosen Pembimbing I**




**Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc  
NIP. 1959 0815 198003 1 004**

**Dosen Pembimbing II**



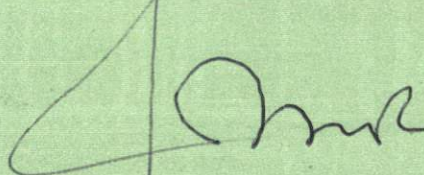
**Nuraini Budi Astuti, SP.MSi  
NIP. 1978 0119 200501 2 002**

**Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Andalas**



**Prof. Ir. H. Ardi, M.Sc  
NIP. 19531216 198003 1 004**

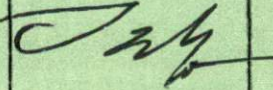
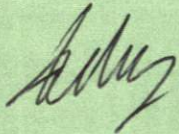
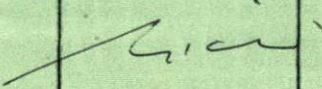

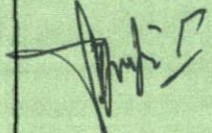
**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi  
Fakultas Pertanian  
Universitas Andalas**



**Dr. Ir. Yonariza M.Sc  
NIP. 19650505 199103 1 003**



**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana  
Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang, pada tanggal 8 Agustus 2011.**

No.	Nama	Tanda Tangan	Jabatan
1.	Dr.Ir.Ira Wahyuni Syarfi, MS		Ketua
2.	Prof.Dr.Ir Helmi, MSc		Sekretaris
3.	Nuraini Budi Astuti, SP,MSi		Anggota
4.	Ir.Herry Bachrizal Tanjung, MSi		Anggota
5.	Sofyan Fairuzi, S.TP,MSi		Anggota



**Bismillahirrahmanirrahim.....**

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai dengan suatu pekerjaan, segeralah engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."*

*(Q.S Al Insyirah: 6-8)*

*Ku mulai melangkah dengan do'a, untuk menuju harapan dan cita-cita. Berbagai rintangan ku lalui satu persatu dan itupun sanggup ku lalui. Kini itu telah kudapatkan dan rasa bersyukur ku aturkan, Amin yaarabbal'alamin.*

*Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hikmah, karunia, akhirnya kudapatkan satu cita-cita ku.*

*Dengan segenap perjuangan, pikiran, dan tenaga selama ini kAu persembahkan karya tulisan ini untuk orang yang ku sayangi dan kucintai Bapak Yondrizal dan Ibunda Arniza, terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan, untaian do'a, curahan hati cinta dan kasih sayang, keikhlasan dan ketulusan hati memberikan semangat, dorongan dalam meraih dan menggapai cita-cita.*

*Terima kasih kepada pembimbing ku, Bapak Prof.Dr.Ir.Helmi,MSc dan Ibuk Nuraini Budi Astuti.SP.MSi atas semua bimbingan, pelajaran dan kesabaran menghadapi membantu ku menyelesaikan tugas ini. Dan ucapan terima kasih pula kepada Pak Yos, Kak Uci, Kak Leni dan Bang Dayat dalam mencari informasi dimana keberadaan Bapak yang akan andry temui.*

*Tak luput pula ku ucapkan rasa terima kasih kepada kakakku "Ni Yahya, Uni Leni.Spd, Uni Fitri.Amd dan adikku yang kusayang "Indah dan Feby" (terus berjuang meraih mimpi-mimpi, belajar rajin-rajin dan harus juga sarjana seperti abang ya dik) dan tu' keponakanku yang tersayang "Annisa, Dzaki, Fachri, Dhafa, Vella" (cepat lah besar, raih cita-cita mu seperti om'Ai, ya. Om'Ai doakan semoga sukses semuanya dan menjadi generasi penerus kebanggaan keluarga kita). Terima kasih buat keluarga besar semuanya (terima kasih doanya untuk Ai dalam meraih gelar kesarjanaan).*

*Terima kasih untuk sahabat kampus ku "Liza.SP, Wenni.SP, Yanti.SP, Eka.SP, Tika.SP, Rafnel.SP, Endi.SP, Ria.SP, Betti.SP, Naimah.SP, Opi.SP dan family, Rindi.SP, Dedet.SP, Doli, Elsa, Ed Mamak.SP, Kessa, Zulham, Andika, Rian, Dendi, Budi, Riko, Arif, Revi, Ridho, Ijum, adri, Jefri, rian Sanak, Dori, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.*

*Terima kasih pula buat teman-teman yang telah memberikan semangat di "Blok B11 Community" dan terima kasih untuk semua "Kost Mak'Puk", Bersama lama kita satu atap, semoga masa yang akan datang kita dapat bertemu lagi dan bercerita semasa di kost dahulu kala.*

*Terima kasih pula buat seseorang yang telah menemani dalam hidupku "Rahimul Syarif" bersama canda, tawa, suka, duka, senang, bermain dan manja-manja, cepat raih gelar sarjananya ya. Pokoknya ingat pesan-pesan abang ya. Semoga do'a kita berdua dikabulkan, Amin.*



## **BIODATA**

Penulis dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 26 September 1986 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Yondrizal dan Arniza. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dijalani di Sekolah Dasar Negeri 10 Petang, Jakarta Pusat (1993-1997) dan di Sekolah Dasar Negeri 17 Balai Ahad Lubuk Basung, Kabupaten Agam (1997-1999). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ditempuh di SLTPN 1 Lubuk Basung Kabupaten Agam, Sumatera Barat (1999-2002). Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ditempuh di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Raya, Maninjau Kabupaten Agam, dan lulus pada tahun 2005. Pada tahun 2006 penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi.

Padang, Agustus 2011

Andryzal



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Studi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Budidaya Jagung Hibrida di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam"**.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Prof.Dr.Ir.Helmi,MSc dan Ibu Nuraini Budi Astuti,SP,MSi sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Anto.SP sebagai agen penyuluh swasta dari produk Bisi, bang Dista Sani.SP sebagai agen penyuluh swasta dari produk Pioneer, Ibu Erlina,SST sebagai penyuluh pemerintah wilayah Lubuk Basung I, Ibu Deswati,SP sebagai penyuluh pemerintah wilayah Lubuk Basung II, Bapak Syafriadi sebagai koordinator UPT Kecamatan Lubuk Basung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Staf Pengajar dan karyawan di selingkungan Fakultas Pertanian yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan yang berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan. Amin.

Padang, Agustus 2011

**ANDRYZAL**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
 <b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
 <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pembangunan Pertanian .....	9
2.2 Penyuluhan Pertanian .....	11
2.3 Budidaya Jagung Hibrida .....	21
2.4 Rujukan Penelitian Terdahulu .....	27
 <b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
3.2 Metode Penelitian .....	31
3.3 Metode Pengambilan Sampel .....	32
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	33
3.5 Variabel Penelitian .....	33
3.6 Analisa Data .....	34
3.7 Defenisi Operasional .....	35
 <b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	36



4.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Penyuluhan di Nagari Lubuk Basung .....	38
4.3 Profil Kelompok Tani .....	40
4.4 Identitas Petani Responden .....	42
4.5 Pelaksanaan Penyuluhan .....	43
4.6 Pendapat Petani terhadap Penyuluhan .....	65
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	80
5.2 Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Sampel Penelitian dari Kelompok Tani .....	32
2. Jumlah Informan Kunci Penelitian .....	33
3. Gambaran Umum Nagari Lubuk Basung .....	36
4. Jumlah Penduduk Nagari dan Jenis Kelamin berdasarkan Jumlah Jorong .....	37
5. Komposisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Agam Tahun 2009 .....	37
6. Luas Panen dan Produksi Jagung Menurut Kecamatan .....	38
7. Data Jumlah Penyuluh Swasta oleh Perusahaan Bibit Jagung di Kabupaten Agam .....	40
8. Identitas Petani Responden .....	42
9. Tahapan Perencanaan Penyuluhan Swasta pada kelompok tani BD II Silayang .....	45
10. Jenis Metoda yang Digunakan oleh Penyuluh Swasta .....	46
11. Pelaksanaan Penyuluhan Swasta pada Kelompok Tani BD II Silayang .....	52
12. Tahapan Perencanaan Penyuluhan Pemerintah pada Kelompok Tani Nusa Indah .....	54
13. Jenis Metoda yang Digunakan oleh Penyuluh Pemerintah .....	55
14. Pelaksanaan Penyuluhan Pemerintah pada Kelompok Tani Nusa Indah .....	58
15. Tahapan Perencanaan Penyuluhan Swadaya pada Kelompok Tani Parit Panjang Permai .....	60
16. Pelaksanaan Penyuluhan Swadaya pada Kelompok Tani Parit Panjang Permai .....	63
17. Pendapat Petani mengenai Aspek Kognitif.....	65
18. Pendapat Petani mengenai Aspek Afektif.....	68
19. Pendapat Petani mengenai Aspek Psikomotorik.....	72
20. Persentase Pendapat Petani terhadap Materi Penyuluhan dari Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotorik.....	77



**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Bagan Pelaksanaan Penyuluhan Swasta .....	53
2. Bagan Pelaksanaan Penyuluhan Pemerintah .....	58
3. Bagan Pelaksanaan Penyuluhan Swadaya .....	64



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Anggota Kelompok Tani BD II Silayang .....	86
2. Anggota Kelompok Tani Nusa Indah .....	87
3. Anggota Kelompok Tani Parit Panjang Permai .....	88
4. Tabulasi Data Responden Penelitian Kelompok Tani BD II Silayang .....	89
5. Tabulasi Data Responden Penelitian Kelompok Tani Nusa Indah.....	90
6. Tabulasi Data Responden Penelitian Kelompok Tan Parit Panjang Permai.....	91
7. Hasil Perhitungan Pendapat Petani terhadap Penyuluhan Swasta pada Kelompok Tani BD II Silayang .....	92
8. Hasil Perhitungan Pendapat Petani terhadap Penyuluhan Pemerintah pada Kelompok Tani Nusa Indah .....	93
9. Hasil Perhitungan Pendapat Petani terhadap Penyuluhan Swadaya pada Kelompok Tani Parit Panjang Permai .....	94
10. Data Jumlah Penyuluh Pemerintah di Kabupaten Agam .....	95
11. Data Kelompok Tani di Nagari Lubuk Basung .....	96
12. Struktur Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis .....	97
13. Data Jumlah Penyuluh Swasta di Kabupaten Agam .....	98
14. UU Penyuluhan No. 16 Tahun 2006 .....	99



## **STUDI PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN BUDIDAYA JAGUNG HIBRIDA DI NAGARI LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga Maret 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah. (1) Menganalisis pelaksanaan kegiatan penyuluhan bagi petani jagung hibrida. (2) Mengidentifikasi pendapat petani terhadap materi penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh swasta, penyuluh pemerintah dan penyuluh swadaya.

Hasil penelitian menunjukkan penyuluhan swasta sebelum melaksanakan penyuluhan, penyuluh bersama-sama petani mengadakan kegiatan perencanaan terlebih dahulu. Kegiatan perencanaan meliputi (a) waktu kunjungan, (b) identifikasi permasalahan dan (c) tujuan kegiatan. Pada tahap pelaksanaan, penyuluhan swasta lebih didukung dengan materi dan media yang disampaikan pada saat penyampaian penyuluhan kepada petani, sedangkan materi yang disampaikan oleh penyuluhan pemerintah hanya bersifat dari atas (*top down*) dan penyuluhan swadaya proses pelaksanaannya tidak menentu, hanya disesuaikan dengan kebutuhan petani.

Dari hasil kegiatan pelaksanaan penyuluhan menunjukkan kalau penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh swasta pelaksanaannya lebih terstruktur matang dan terencana dibandingkan penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh pemerintah dan penyuluh yang dilakukan oleh penyuluh swadaya.

Penulis menyarankan, agar penyuluh swasta dapat mempertahankan tata cara penyuluhan yang dilakukan kepada kelompok tani, kepada penyuluhan pemerintah agar menyesuaikan materi yang akan disampaikan pada petani sesuai kebutuhan lapangan, pada penyuluhan swadaya dapat mengadakan kegiatan penyuluhan secara lebih terstruktur dan dengan waktu yang teratur, bagi petani disarankan dapat berperan aktif dalam menerima materi yang disampaikan agen penyuluhan swasta, penyuluhan pemerintah dan penyuluhan swadaya. Selain itu, penulis juga menyarankan agar penyuluh swasta mengadakan kerjasama dengan penyuluh swadaya dan penyuluh pemerintah dalam kegiatan penyuluhan teknis budidaya jagung hibrida.



# **STUDY ON EXTENSION FOR HYBRID MAIZE CULTIVATION IN NAGARI LUBUK BASUNG AGAM DISTRICT**

## **ABSTRACT**

Research aims to analyze extension for hybrid maize cultivation identify farmers's perception on three extension providers, private public and self-support.

Private extension workers plan collaboratively before carrying out extension. The planning includes (a) time problem identification, and (b) Objectives Private extension workers have better medium and equipments. Public extension worker tends to use top-down approach. While self-support extension workers do not well planned, depend on farmers' order. Private extension workers are likely well organized in comparison to others two.

Therefore, public extension workers need to learn from private counter part for further extension improvement. Collaboration among three extension providers could enhance quality of extension, especially in hybrid maize cultivation.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sasaran utama pembangunan pertanian adalah pembangunan manusia, karena tanpa adanya perubahan yang terjadi di dalam diri manusia yang dibangun, maka sulit untuk mencapai perbaikan-perbaikan kondisi masyarakat secara terus menerus sehingga hasil pembangunan fisik dan ekonomi menjadi kurang berarti jika tidak dibarengi dengan keberhasilan pembangunan manusia. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, sasaran yang ingin dicapai juga berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani sehingga mereka akan mampu untuk mandiri, karena tanpa adanya penambahan pengetahuan dan keterampilan serta perbaikan sikap mereka, akan sulit untuk memperbaiki kehidupan mereka yang masih tradisional (Suhardiyono, 1992).

Pembangunan pertanian ke depan diharapkan dapat memberi kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja, serta mampu memanfaatkan semua peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan handal dengan ciri mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi, etos kerja, disiplin dan moral yang tinggi serta berwawasan global, sehingga petani dan pelaku usaha pertanian lain akan mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM pertanian, terutama SDM petani, adalah melalui kegiatan penyuluhan pertanian.

Sebagai ujung tombak dari pembangunan pertanian, penyuluh pertanian memiliki tingkat pengetahuan tertentu dan untuk keperluan kegiatannya akan memerlukan tambahan pengetahuan atau masukan. Masukan baru tersebut antara lain berupa informasi teknologi hasil penelitian yang dapat diperoleh dari berbagai sumber- sumber informasi (Suryantini, 2004).

Penyuluh pertanian mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian, karena merupakan upaya membangun kemampuan upaya petani atau nelayan, sehingga akan terbentuk petani nelayan mandiri (Salim, 2004)



Dalam era teknologi yang maju ini, telah banyak ditemukan sarana pertanian maupun sistem pertanian baru yang dapat membantu meningkatkan hasil produksi pertanian. Petani mungkin saja tahu, namun belum tentu mampu melaksanakan baik dari segi cara maupun kemampuan modal, bagi yang mampu belum tentu mau melaksanakannya. Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, mampu dan mau bagi petani dalam penggunaan sistem-sistem pertanian yang baik, Pemkab melalui Badan Penyuluh Pertanian semakin giat mengembangkan bentuk-bentuk baru penyampaian teknologi pertanian kepada petani. Salah satunya adalah pembentukan Asosiasi Penyuluh Pertanian Swasta (Harjo, 2008).

Asosiasi penyuluh pertanian swasta terdiri dari orang-orang yang berkecimpung di dalam penyediaan sarana produksi pertanian atau akrab disebut Saprodi. Orang-orang ini biasanya sering mengunjungi petani didalam memperkenalkan sistem maupun produk-produk sarana pertanian. Orang-orang di dalam saprodi ini akrab dengan petani dan kelompok tani di lapangan (Harjo 2008).

Peran utama petugas penyuluh pertanian adalah mentransformasikan inovasi-inovasi baru dalam bidang pertanian baik dibidang teknis, sosial maupun ekonomi kepada petani ataupun sesama profesi untuk dilanjutkan kepada petani dalam mewujudkan pertanian yang tangguh dan unggul. Petugas penyuluh pertanian dikatakan berhasil apabila informasi yang diperoleh dapat ditransfer kepada petani dengan cepat, tepat, benar dan dapat diterapkan atau dilaksanakan. Berbagai teknik informasi pertanian telah diterapkan, baik berdasarkan obyek yang dijadikan sasaran ada yang dilaksanakan secara massal, kelompok dan perorangan, kemudian berdasarkan cara pelaksanaannya, dapat dilakukan karyawisata/study banding, temu usaha, diskusi kelompok, musyawarah kelompok, demonstrasi, pendidikan, kursus dan lain-lain (Sinar Tani, 2009).

Peran penyuluh untuk menyampaikan inovasi dan mempengaruhi sasaran penyuluhan melalui metoda dan teknik-teknik tertentu sampai mereka (sasaran penyuluhan) itu dengan kesadaran dan kemampuannya sendiri mengadopsi inovasi yang disampaikan. Dalam perkembangannya peran penyuluh tidak hanya terbatas pada fungsi menyampaikan inovasi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sasaran penyuluhan, akan tetapi

penyuluh juga harus mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah atau lembaga penyuluhan yang diwakilinya dengan masyarakat sasaran, baik dalam hal menyampaikan inovasi atau kebijakan-kebijakan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat sasaran (Mardikanto, 1993)

Dalam dunia pertanian, kita ketahui ada tiga bentuk macam penyuluhan, yakni penyuluh negeri sipil dalam pemerintah, penyuluh swasta, penyuluh swadaya. Penyuluh negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan, untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh (UU Penyuluhan No 16 Tahun 2006).

Penyuluhan swasta pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah pada UU Republik Indonesia No 16 Tahun 2006 (16 / 2006) tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Penyuluhan swasta ini mempunyai peranan penting dalam pembangunan pertanian seperti : (a) menyusun perencanaan penyuluhan yang terintegrasi dalam program penyuluhan, (b) melaksanakan pertemuan dengan penyuluh dan pelaku utama sesuai dengan kebutuhan, (c) membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, (d) melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha, (e) menjalin mitra usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan, (f) menumbuhkan kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, (h) mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian, perikanan, kehutanan serta perdesaan swadaya bagi pelaku utama dan pelaku usaha, (i) melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha, (j) melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah dan pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi, (k) melakukan pemantauan pelaksanaan



penyuluhan yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha (UU Penyuluhan No 16 Tahun 2006).

Kelembagaan penyuluh yang diatur dalam undang-undang akan menata kembali tata hubungan kerja penyuluh yang efektif terutama kelembagaan penyuluhan pemerintah yang dimulai dari tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan, pada tingkat propinsi berbentuk badan koordinasi penyuluhan, pada tingkat kabupaten badan pelaksana penyuluhan pertanian dan pada tingkat kecamatan berbentuk balai penyuluhan, bahkan sampai ke tingkat desa/kelurahan berbentuk pos penyuluhan yang merupakan wadah penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta dan swadaya serta pelaku utama dan pelaku usaha di perdesaan sebagai tempat berdiskusi, merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan penyuluhan (Sinar Tani, 2009).

#### Penyuluh Pertanian Swakarsa dan Swasta :

- a) Keberadaan penyuluh pertanian swakarsa dan penyuluh pertanian swasta diserahkan kepada kebutuhan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya serta kepentingan lembaga bukan pemerintah yang melakukan penyuluhan pertanian.
- b) Penetapan standar, akreditasi dan pola pendidikan dan pelatihan penyuluh pertanian swakarsa dan swasta dilakukan oleh instansi Pemerintah berdasarkan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- c) Penyuluh pertanian swakarsa dan penyuluh pertanian swasta dalam melaksanakan penyuluhan pertanian kepada petani dan pelaku usaha pertanian lainnya wajib bekerjasama dengan penyuluh pertanian PNS.

Penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian kepada petani merupakan salah satu peran yang harus dijalankan oleh penyuluh pertanian, baik oleh penyuluh pemerintah maupun melalui penyuluhan oleh perusahaan atau yang disebut sebagai penyuluh swasta. Oleh sebab itu seorang penyuluh harus rajin : (1) berkomunikasi dengan lembaga penelitian dan sumber-sumber inovasi lain, (2) mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai publikasi media massa dan pameran-pameran, (3) mengikuti simposium, seminar, lokakarya pertemuan teknis dan berbagai pertemuan ilmiah, (4) mengikuti pelatihan dan

penataran, (5) melakukan karya wisata, widya wisata, maupun anjang sana kepada petani maju yang telah berhasil (Mardikanto, 1993).

Untuk mempercepat usaha penyebaran informasi dilakukan dengan berbagai media misalnya, media elektronika, cetak dan dari rumah ke rumah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berbagai usaha dilaksanakan untuk menyebarluaskan informasi dalam bidang pertanian, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik terhadap petugas penyuluh pertanian swasta maupun para petani sendiri dengan tujuan agar meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi maupun kualitas produksi yang hasil akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani (Sinar Tani, 2009).

Terkait dengan penyuluhan pertanian, sistem kelembagaan dan sistem tata kerjanya juga mengalami perubahan dengan pola yang tidak jelas. Kelembagaan serta tuntutan kompetensi penyuluh banyak berubah dengan arah yang tidak berpola. Ketika masa revolusi hijau penyuluh di lapangan yang langsung bersentuhan dengan petani memiliki *homebase* di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang ada di setiap kecamatan, namun sejak tahun 1990an kelembagaan menjadi tidak jelas bahkan banyak yang dibubarkan. Oleh karena itulah sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang pasokan untuk bidang pertanian baik pada perusahaan pupuk, pestisida dan alat-alat pertanian menggunakan tenaga-tenaga penyuluhan yang disebut dengan penyuluhan swasta yang berfungsi juga sebagai pemasaran untuk produksi barang yang di produksinya (Subejo, 2009).

Kegiatan penyuluhan harus dilakukan dengan menjalin interaksi yang dinamis antara penyuluhan swasta yang menjual produknya dengan petani. Kesenambungan kegiatan ini perlu dilakukan karena masalah-masalah petani dalam pemakaian produk yang diperjual belikan kepada petani itu selalu ada dari waktu ke waktu dan sewaktu-waktu memerlukan penanganan yang cepat. Selain dari itu, kesinambungan sinergi pembinaan terhadap petani juga semakin meningkatkan kepedulian petani terhadap pembinaan yang dilakukan.

Saat ini, masalah petani dan teknologi pertanian makin rumit serta jumlah penyuluh di negeri ini masih terbatas, sehingga perlu banyak dukungan dari berbagai pihak, termasuk pihak-pihak swasta yang memproduksi semua



barang, alat dan jenis-jenis obat-obatan, pupuk dan pestisida. Petani merupakan manajer pada usaha taninya sendiri. Mereka harus dilihat sebagai manusia yang memiliki kemampuan mengambil keputusan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan usaha taninya bagi kesejahteraan keluarganya dan masyarakat. Mereka selayaknya dipandang memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi tantangan keras di era persaingan bebas dan globalisasi serta mampu menerapkan nilai kelestarian pembangunan pertanian (Subejo, 2009).

Dalam pemberian penyuluhan mengenai usaha tani jagung, penyuluh swasta saling berkoordinasi atau bekerjasama dengan penyuluh pemerintah. Hal ini dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petani dalam berusaha tani jagung hibrida. Begitu juga dengan penyuluhan swadaya juga melakukan kerjasama dengan penyuluh sspemerintah dalam mengadopsi ilmu pengetahuan terkait tentang berusaha tani jagung hibrida.

Penyuluhan yang dibawakan swasta berasal dari PT.Tanindo Inter yang bertempat di Padang. Realita yang terjadi di lapangan, para petani tidak menyebutkan kalau agen penyuluh ini adalah penyuluh swasta melainkan dengan sebutan pemulator petani.

Berdasarkan uraian di atas Penyuluhan swasta mempunyai arti penting dalam pembangunan pertanian, ini terlihat dalam kelembagaan penyuluhan swasta : (a) memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha, (b) mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya, (c) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha, (d) membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkan kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha dengan baik, dan berkelanjutan, (e) membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon ulang peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha dan pelaku utama, (f) menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan, (g) melembagakan nilai-nilai budaya

pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan (UU Penyuluhan no 16 Tahun 2006).

## 1.2 Perumusan Masalah

Petani di Nagari Lubuk Basung ini pada awalnya banyak yang mengusahakan pertanian padi sawah. Akan tetapi, setelah terjadinya gempa pada tahun 2009 irigasi yang berada di daerah ini terjadi kerusakan bandar-bandar aliran air irigasi, sehingga usaha pertanian yang pada awalnya adalah tanaman padi sawah banyak yang dialihkan menjadi tanaman jagung. Untuk memperoleh kualitas dan kuantitas hasil tanaman jagung yang baik dan mendapatkan nilai tambah seperti yang diharapkan oleh petani, maka petani membutuhkan penyuluhan tentang tanaman jagung. Informasi mengenai budidaya jagung, selain diberikan oleh petugas penyuluh lapangan tapi petani juga bisa mendapatkannya dari penyuluh swasta dan sesama petani (penyuluhan swadaya).

Informasi mengenai budidaya tanaman jagung hibrida yang diusahakan oleh petani-petani di Nagari Lubuk Basung ini ada yang berasal dari penyuluhan pemerintah, penyuluhan yang berasal dari perusahaan atau yang disebut dengan penyuluhan swasta dan ada juga yang berasal dari petani ke petani (swadaya). Dalam prakteknya, masing-masing bentuk penyuluhan tersebut memiliki beberapa perbedaan. Berdasarkan hal itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan dari ke tiga bentuk penyuluhan tersebut. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan penyuluhan oleh penyuluh swasta, penyuluh pemerintah dan penyuluh swadaya kepada petani di Nagari Lubuk Basung?
2. Bagaimana pendapat petani terhadap materi yang diberikan oleh penyuluh swasta, penyuluh pemerintah dan penyuluh swadaya?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul : **“Studi Pelaksanaan Penyuluhan Budidaya Jagung Hibrida di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam”**.



### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pelaksanaan kegiatan penyuluhan bagi petani jagung hibrida.
2. Mengidentifikasi pendapat petani mengenai materi penyuluhan jagung hibrida.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi.

1. Bagi penyuluh swasta, penyuluh pemerintah dan penyuluh swadaya yakni mengenai perilaku mereka dalam pemanfaatan sumber informasi dan juga memberikan masukan, sumber informasi mana yang paling sering mereka gunakan dan yang paling tepat untuk digunakan dalam memberikan informasinya kepada para petani.
2. Sebagai masukan bagi pengambil kebijakan dalam program penyuluhan pertanian dan sebagai bahan bacaan serta rujukan bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut.
3. Bagi penulis sendiri penelitian ini menambah pengetahuan, pandangan dan wawasan penulis serta sebagai proses pembelajaran bagi penulis dalam menulis sebuah penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pembangunan Pertanian**

Teori pembangunan pertanian yang sangat mendasar diutarakan oleh Mosher (1977), dimana untuk menjamin kesuksesan pembangunan pertanian dibutuhkan dua syarat yaitu syarat pokok dan syarat pelancar. Syarat pokok adalah syarat yang harus dipenuhi karena jika tidak, maka pembangunan pertanian tersebut tidak ada sama sekali. Syarat-syarat tersebut meliputi ; 1) adanya pasaran untuk produk-produk pertanian, 2) teknologi yang selalu berubah, 3) tersedianya sarana produksi dan perralatan secara lokal, 4) perangsang produksi bagi petani, 5) tersedianya sarana transportasi yang baik. Syarat pelancar adalah syarat yang dibutuhkan agar pembangunan pertanian berjalan dengan baik yaitu ; 1) pendidikan pembangunan, 2) kredit produksi, 3) kerjasama kelompok petani, 4) perbaikan dan perluasan tanah pertanian, 5) perencanaan nasional pembangunan pertanian. Dalam teori ini, penyuluhan dalam teori pembangunan pertanian termasuk salah satu dalam klasifikasi isi dari syarat pelancar dari pendidikan pembangunan.

Pembangunan pertanian pada dasarnya bertujuan untuk ; (1) membangun sumber daya manusia aparatur professional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kokoh, (2) meningkatkan pemanfaatan sumber daya pertanian secara berkelanjutan, (3) memantapkan ketahanan dan keamanan pangan, (4) meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, (5) menumbuhkembangkan usaha pertanian yang dapat memacu aktivitas ekonomi pedesaan, dan (6) membangun sistem ketatalaksanaan pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani. Sementara itu, sasaran pembangunan pertanian adalah ; (1) terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian serta meningkatkan pendapatan petani, (2) terciptanya kesempatan bekerja pada masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, dan (3) terciptanya agroindustri yang memiliki daya saing (Departemen Pertanian, 2004).

Pada hakekatnya pembangunan pertanian diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain mencakup : (1) penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan



agribisnis, terutama petani, (2) fasilitasi terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan kegiatan ekonomi masyarakat, (3) penyediaan sarana dan prasarana fisik oleh pemerintah dengan focus pemenuhan kebutuhan publik yang mendukung sektor pertanian serta lingkungan bisnis secara luas, dan (4) akselerasi pembangunan wilayah dan stimulasi tumbuhnya investasi masyarakat serta dunia usaha (Departemen Pertanian, 2002). Hal yang dimaksud di sini adalah penyuluhan berfungsi sebagai untuk memberdayakan masyarakat dalam peningkatan ilmunya saat melakukan seluruh aspek kegiatan untuk menjalankan usahatani.

Sasaran dalam pembangunan pertanian adalah membangun manusia, karena tanpa adanya perubahan yang terjadi di dalam diri manusia yang dibangun, maka akan sulit untuk mencapai perbaikan-perbaikan kondisi masyarakat secara terus menerus, sehingga hasil pembangunan fisik dan ekonomi menjadi kurang berarti jika tidak disertai dengan keberhasilan pembangunan manusianya itu sendiri (Suhardiyono, 1992). Dalam hal ini bertujuan untuk membangun manusia itu sendiri harus dilakukan perbaikan-perbaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi yang ada harus diberikan dengan melalui pengajaran materi melalui penyuluhan.

Penyuluhan pembangunan selalu menitikberatkan pada berbagai upaya untuk mewujudkan perbaikan kualitas perbaikan kehidupan manusia, baik secara moral maupun materil, melalui peningkatan motivasi, keberdayaan, kepemimpinan dan kualitas perilaku SDM. Pendekatan pembangunan menurut konsep penyuluhan pembangunan adalah pengembangan SDM (*people centered development*) dalam rangka pembangunan sosial, yaitu pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat menghargai harkat dan martabat manusia (humanisasi) seiring dengan pembangunan ekonomi (Slamet, 2003)

Samsudin (1987) juga menyatakan penyuluh pertanian sebagai adalah sebagai penghubung lembaga ilmiah sebagai sumber hal yang baru, dengan petani sebagai pihak yang paling membutuhkan. Dalam hubungan ini harus dilanjutkan dengan bimbingan oleh seorang agen pembaharuan atau seorang penyuluh dari suatu lembaga yang terorganisir, ini bertujuan praktis untuk menumbuhkan

keyakinan dan keinginan untuk mencobanya sendiri. Akhirnya peranan petani dalam pembangunan akan terasa keinsafan sendiri dan bukan karena paksaan.

Sebagai jembatan antara dunia ilmu dan pemerintahan, (Scrahman dan Lerner, 1967), dalam Mardikanto (1993) melihat pentingnya kegiatan penyuluhan pertanian sebagai proses komunikasi pembangunan pertanian nasional, baik untuk yang menjembatani perilaku antara aparat pemerintah dengan masyarakat (petani) sebagai pelaksana utama pembangunan pertanian. Sebagai jembatan antara dunia penelitian dan dunia praktek-praktek usahatani, Lionberger (1982) dalam Mardikanto (1993) melihat pentingnya kegiatan penyuluhan di dalam proses penyebarluasan hasil-hasil penelitian. Untuk diterapkan oleh petani, maupun di dalam proses penyanpaian umpan balik dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh para petani setelah mencoba, menguji dan menerapkan hasil-hasil penelitian yang disampaikan tersebut

## 2.2 Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan dalam Bahasa Inggris disebut *agriculture education* atau *university extension* atau *extension university*. Penyuluhan berintikan proses keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya, memberikan pendapat sehingga orang tersebut dapat membuat keputusan dengan tepat (Anonymous, 2001 dalam Marlina, 2005).

Penyuluhan dalam arti umum merupakan suatu Ilmu Sosial Dasar yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar dengan terwujudnya perubahan tersebut dapat tercapai apa yang diharapkan sesuai dengan pola atau rencananya. Penyuluhan dengan demikian merupakan sesuatu sistem pendidikan non formal atau pendidikan di luar sistem persekolahan yang biasa, dimana orang ditunjukkan cara-cara mencapai sesuatu dengan memuaskan sambil orang itu tetap mengerjakan usaha taninya dengan sendiri (Kartasapoetra, 1988).

Mardikanto (1993), menyatakan bahwa penyuluhan pertanian merupakan proses penyebarluasan informasi yang diperlukan dan berkembang selama pelaksanaan dalam usaha taninya. Informasi tersebut dapat berupa inovasi yang dihasilkan dari penelitian maupun pengalaman lapangan, masalah-masalah yang



perlu pemecahannya, maupun peraturan dan kebijakan yang ditetapkan demi terlaksananya dan tercapainya tujuan pembangunan pertanian.

Kelembagaan penyuluhan diatur dalam UU Penyuluhan No 16 Tahun 2006 yang berbunyi, kelembagaan penyuluhan terdiri dari atas:

- a. Kelembagaan penyuluhan pemerintah.
- b. Kelembagaan penyuluhan swasta.
- c. Kelembagaan penyuluhan swadaya.

Penyuluhan pertanian akan selalu mengutamakan teknologi baru, dan teknologi baru ini dikembangkan oleh para petani sesuai dengan kehendaknya dan usahanya untuk meningkatkan produk usaha taninya, tingkat kehidupannya serta pencegahan-pencegahan timbulnya masalah yang akan dihadapi dan mengatasi masalah yang sedang dihadapi yang berkaitan dengan usaha taninya itu (Kartasapoetra, 1988)

Penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah (orang dewasa) guna menumbuhkan kembangkan kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) petani sehingga secara mandiri mereka dapat mengelola unit usaha taninya lebih baik dan menguntungkan sehingga dapat memperbaiki pola hidup yang lebih layak dan sejahtera bagi keluarganya. Kegiatan penyuluhan pertanian sebagai proses belajar bagi petani melalui pendekatan kelompok dan diarahkan untuk terwujudnya kemampuan kerja sama yang lebih efektif sehingga mampu menerapkan inovasi, mengatasi berbagai resiko kegagalan usaha, menerapkan skala usaha yang ekonomis untuk memperoleh pendapatan yang layak dan sadar akan peranan dan tanggung jawabnya sebagai pelaku pembangunan, khususnya pembangunan pertanian (Ban dan Hawkins, 1999)

Kartasapoetra (1988) menyatakan, penyuluhan pertanian adalah inovasi baru yang disampaikan ke pedesaan diberikan kepada petani dalam suatu perangkat pendidikan khusus yang mengutamakan keterampilan baik secara berfikir maupun berbuat. Supaya setiap teknologi yang dimasukkan dapat diserap oleh petani desa diperlukan penyuluhan pertanian. Samsudin (1987) menyatakan bahwa ilmu dan teknologi pertanian sebagai hal yang baru tidak akan berfaedah seandainya tidak disampaikan kepada petani, karena pada akhirnya petanilah yang akan memegang peranan penting dalam peningkatan produksi pertanian.

Samsuddin (1987) juga menyatakan penyuluh pertanian merupakan sebagai penghubung lembaga ilmiah dari sumber inovasi baru, dengan petani sebagai pihak yang membutuhkan. Hubungan ini harus dilanjutkan dengan hubungan bimbingan praktis untuk menumbuhkan keyakinan dan keinginan untuk mencobanya sendiri. Dan pada akhirnya perana petani dalam pembangunan akan terasa keinsafan sendiri yang bukan dikarenakan adanya rasa keterpaksaan.

Menurut Ban dan Hawkins (1999) menyatakan bahwa penyuluhan pertanian adalah partisipasi melalui pengikutsertaan petani dengan cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan penyuluhan dan untuk mempengaruhi masa depan petani sendiri. Kartasapoetra (1988) menyatakan penyuluhan pertanian adalah inovasi baru yang dimasukkan ke pedesaan diberikan kepada petani dalam suatu perangkat pendidikan itu mengutamakan keterampilan baik secara berfikir maupun bermartabat. Tujuan utama dari penyuluhan pertanian adalah mempengaruhi para petani dan keluarganya agar berubah perilakunya sesuai dengan yang diinginkan (oleh pihak penyuluh) yang akan menyebabkan perbaikan mutu hidup dari para keluarga tani. Perubahan perilaku ini terjadi dalam tiga bentuk yaitu : (1) bertambahnya perbendaharaan informasi yang berguna bagi petani, (2) tumbuhnya keterampilan, kemampuan dan kebiasaan baru yang akan bertambah baik, (3) timbulnya sikap mental dan motivasi yang lebih kuat sesuai dengan yang akan dikehendaki. Dengan demikian penyuluhan yang efektif ialah yang dapat menimbulkan perubahan informasi pada diri individu-individu petani, atau memberi informasi baru kepada mereka, memperbaiki kemampuannya, memberi kemampuan dan kebiasaan baru yang menumbuhkan perasaan-perasaan tertentu terhadap sesuatu yang dikehendaki (Slamet, 2003).

Menurut Samsudin (1987) tujuan dasar dari penyuluhan pertanian adalah untuk menumbuhkan perubahan yang lebih terarah dalam kegiatan usaha tani di pedesaan. Perubahan yang dimaksud ialah dalam bentuk pengetahuan, kecakapan, sikap, dan motif tindakan petani. Dengan adanya perubahan pengetahuan, kecakapan, sikap, dan motif tindakan, diharapkan petani akan lebih bersifat lebih terbuka, aktif dan dinamis.



Penyuluhan dilihat sebagai upaya mentransfer inovasi pembangunan yang dihasilkan oleh lembaga- lembaga penelitian kepada pengguna akhir. Akan tetapi kemudian penyuluhan tidak hanya dimaknai sebagai proses pemindahan IPTEK saja, akan tetapi lebih luas lagi. Ban dan Hawkins (1999), menguraikan bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu secara sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar.

### **2.2.1 Penyuluhan Swasta**

Penyuluh Swasta adalah adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan (UU penyuluhan no 16 Tahun 2006, Bab I pasal 1 ayat 20 ). Keberadaan penyuluhan swasta bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Pengaturan mengenai penyuluhan swasta lebih lanjut dapat dilihat pada UU Penyuluhan (Lampiran 14).

Dengan telah diundangkannya sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan nomor 16 tahun 2006, memberi angin segar bagi para penyuluh pertanian yang selama era otoda kinerja penyuluh belum efektif, karena tata hubungan kerja penyuluh di setiap daerah berbeda tergantung pada daerah tersebut memanfaatkan penyuluh sesuai dengan perannya. Kelembagaan penyuluh yang diatur dalam undang-undang tersebut akan menata kembali tata hubungan kerja penyuluh yang efektif terutama kelembagaan penyuluhan pemerintah yang dimulai dari tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan, pada tingkat propinsi berbentuk badan koordinasi penyuluhan pada tingkat kabupaten badan pelaksana penyuluhan pertanian dan pada tingkat kecamatan berbentuk balai penyuluhan, bahkan sampai ke tingkat desa/kelurahan berbentuk pos penyuluhan yang merupakan wadah penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta dan swadaya serta pelaku utama dan pelaku usaha di perdesaan sebagai tempat berdiskusi, merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan penyuluhan.

Sekalipun pelaksanaan undang-undang ini masih belum dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai daerah, namun bagi penyuluh pertanian adalah merupakan pegangan dalam pengaturan sistem penyuluhan, oleh karena itu

penyuluh pertanian dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan penyuluhan masih banyak menghadapi berbagai hambatan, pada dasarnya sistem penyuluhan pertanian di Indonesia telah mencoba untuk menciptakan keterkaitan yang efisien antara lembaga penelitian dan lembaga penyuluhan, serta lembaga dari penyuluhan swasta. Pendekatan yang digunakan dalam praktek penyuluhan pertanian lebih dikenal dengan sistem latihan dan kunjungan yang merupakan adopsi dan adaptasi dari pendekatan *Training and Visit (T&V)*.

Menurut Benor (1987) dalam Subejo (2009), tujuan dari pendekatan *Training and Visit (T&V)* pada awalnya dilakukan untuk mereformasi manajemen sistem penyuluhan dengan cara menggerakkan kader yang kurang termotivasi, dan petugas lapangan yang kurang terlatih menuju agen transfer teknologi yang efektif melalui latihan yang terstruktur dan kemudian melakukan kunjungan teratur pada petani dengan membawa pesan-pesan penyuluhan yang lebih jelas. Sektor pertanian tercakup di dalamnya sistem penyuluhan pertanian pada saat ini sedang mengalami perubahan menyesuaikan dan mentransformasikan dengan iklim global yang sedang berlangsung. Rivera (1997) menyatakan pembangunan global mensyaratkan adanya peningkatan kompetisi dalam bidang usaha pertanian.

Suatu pemikiran rasional tentang perlunya penyediaan layanan dari sektor swasta dalam penyuluhan pertanian secara umum didasarkan pada suatu asumsi yang kuat bahwa itu akan meningkatkan efisiensi yang dilakukan dengan lebih kompetitif melalui *private market*, efisiensi akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan. Pada pelayanan penyuluhan pertanian (Rivera, 1997) mengatakan : (1) pelayanan dan penyampaian yang lebih efisien, (2) menurunkan anggaran belanja pemerintah, dan (3) pelayanan dengan kualitas tinggi. Privatisasi mungkin juga memiliki beberapa kelemahan yaitu akses terhadap sumber penyuluhan menjadi tidak sama karena keberagaman *agency* dan kesulitan berkoordinasi dengan kelompok luar dan departemen pemerintah. Agen penyuluhan pertanian swasta akan lebih berorientasi pada komersialisasi dan kurang bertanggungjawab terhadap arah kebijakan yang dibuat pemerintah.

Kidd *et.al.*, (2000) dalam Subejo (2009) mengatakan, perlunya pemberian kesempatan dan dukungan yang cukup kepada sektor swasta untuk



lebih berperan dalam penyuluhan pertanian. Umumnya sektor *private* terbebas dari sistem administratif atau birokrasi dan hambatan kepentingan politik. Hal ini mengimplikasikan suatu kemampuan yang cukup pada sektor *private* untuk mengalokasikan sumberdaya dengan lebih efisien.

Transformasi penyuluhan pertanian saat ini sedang berlangsung di seluruh belahan dunia, baik itu berasal dari penyuluhan pertanian pemerintah maupun dari penyuluhan-penyuluhan swasta. Qamar (2002) yang menyimpulkan bahwa sedang berjalan perubahan pada organisasi, sistem penugasan, dan praktek sistem penyuluhan pertanian dan pedesaan diseluruh bagian dunia sehingga menjadi suatu hal yang vital bagian suatu negara untuk menempatkan diri selangkah dengan trend pembangunan yang terkini.

Masalah yang lain yang muncul, kadang kala kegiatan penyuluhan pertanian memiliki akuntabilitas yang rendah serta memiliki keterbatasan untuk mengelola sistem penyuluhan yang luas dan komplek di areal cakupan wilayah kerjanya masing-masing. Penyuluhan pertanian yang ada Indonesia nampaknya menghadapi problem dan kondisi yang mirip seperti yang hasil evaluasi dari World Bank. Slamet (2003), menyatakan bahwa peningkatan mutu SDM petani melalui pembangunan SDM petani adalah kunci peningkatan kinerja pembangunan sistem dan usaha tani. Pembangunan dan pengembangan SDM petani dilakukan melalui kegiatan penyuluhan pertanian, baik itu dari penyuluhan pemerintah yang berasal dari Dinas Pertanian maupun yang berasal dari penyuluhan swasta dari perusahaan-perusahaan.

Menurut UU Penyuluhan No 16 tahun 2006 Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Selain dari itu juga mereka adalah tenaga pemasaran yang memasarkan produk-produk dari perusahaan dan oleh karenanya hanya dianggap sebagai penyuluhan swasta karena mereka melakukan keseluruhan dan maupun sebahagian dari fungsi-fungsi penyuluhan.

Dilihat dari realita ini, penyuluhan swasta ini tak ada bedanya dengan penyuluhan dari dinas pertanian karena fungsi dan tugas-tugasnya sama sebagai agen dari informan, yang sangat membedakan hanyalah pada agen penyuluhan swasta ini ia langsung membawakan produk yang akan dipasarkannya kepada

petani. Lain dari fungsi untuk pemasaran, ia pun juga akan membina petani itu dalam pemakaian cara-caranya, serta anjuran penggunaan dan dosis yang tepat dengan takaran yang dianjurkan pada penggunaan obat-obatan dan pupuk yang dipasarkannya kepada petani itu sendiri. Jadi, penyuluhan atau perubahan perilaku yang diberikan ini dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu : (1) tumbuhnya keterampilan, kemampuan dan kebiasaan baru atau bertambah baik, (2) bertambahnya perbendaharaan informasi yang berguna bagi petani, (3) timbulnya sikap mental dan motivasi yang lebih kuat sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan demikian penyuluhan yang efektif adalah dapat menimbulkan perubahan informasi pada diri individu petani, atau memberi informasi baru kepada mereka, memperbaiki kemampuannya, memberi kemampuan dan kebiasaan baru dan menumbuhkan perasaan-perasaan tertentu terhadap sesuatu yang dikehendaki (Slamet, 2003).

Pada penyuluhan yang berasal dari pemerintahan, program yang diberikan kepada petani adalah yang berasal dari pemerintah itu sendiri (*top down*). Masih terdapatnya kelemahan dari masing-masing sistem yang ada, yaitu penyuluh kurang respon terhadap aspirasi petani murni, maka peluang adanya penyuluh swadaya dan agen swasta cukup besar. Para agen swasta inilah yang umumnya bergerak mengakomodir keinginan petani. Jika penyuluh pertanian bergerak berdasarkan program (paket program dari Dinas), maka penyuluh swasta bergerak berdasarkan pesanan petani. Maka penyuluhan di masa mendatang akan diwarnai oleh "*delivery sistem*" (sistem paket) dan penyuluhan berdasarkan pesanan (Nugraha, 2006).

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, telah menjadi suatu tuntutan dan keharusan bagi sistem penyuluhan pertanian Indonesia sebagai salah satu pilar pembangunan pertanian untuk menyiapkan diri dan menempatkan posisi yang tepat dalam transformasi menuju pertanian baru yang kompetitif dan efisien serta dengan pendekatan *consumerdriven based* yang dalam hal ini adalah petani. Qamar (2002) menyebut suatu pendekatan baru dalam dunia penyuluhan termasuk penyuluhan pertanian sebagai pesanan atau melakukan penyuluhan berdasarkan pesanan yang diinginkan oleh petani.



### **2.2.2 Penyuluhan Pemerintah ( Penyuluh PNS )**

Penyuluhan dalam arti umum merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar dengan terwujudnya perubahan tersebut dapat tercapai apa yang diharapkan sesuai dengan pola atau rencananya. Penyuluhan dengan demikian merupakan suatu sistem pendidikan yang bersifat non formal atau suatu sistem pendidikan diluar sistem persekolahan yang biasa, dimana orang ditunjukkan cara-cara mencapai sesuatu dengan memuaskan sambil orang itu tetap mengerjakannya sendiri, jadi belajar dengan mengerjakan sendiri (Kartasapoetra, 1988).

Penyuluh Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang diberi secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan (UU Penyuluhan no 16 Tahun 2006).

Pada Kecamatan Lubuk Basung terdapat satu buah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang terdiri dari 8 orang penyuluh pertanian yang masing-masing mempunyai wilayah binaan satu nagari, 2 orang penyuluhan perikanan dan 2 orang penyuluhan perikanan yang mengkoordinir satu Kecamatan Lubuk Basung. Selain itu juga terdapat 1 orang pengamat hama dan penyakit yang menaungi satu UPT Kecamatan Lubuk Basung (Lampiran 12).

Menurut Kartasapoetra (1988), Penyuluh Negeri Sipil atau yang lebih dikenal dengan Penyuluh Pemerintah memiliki 3 tingkatan :

#### **a. Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS)**

Penyuluh Pertanian Spesialis berkedudukan di tingkat provinsi, wilayah / BTP (Balai Teknologi Pertanian) dan kabupaten mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut :

1. Memperlancar komunikasi, sebagai penghubung, antara lembaga penelitian pertanian, institut dan fakultas pertanian atau sumber lainnya dengan penerapannya pada usaha tani pedesaan.
2. Mencari atau menemukan, mengolah, memikirkan serta menyiapkan materi atau bahan-bahan penyuluhan pertanian untuk disusun sebagai program penyuluhan pertanian.

3. Mengadakan survey serta penilaian atau membantu mengadakan percobaan-percobaan lapangan untuk meningkatkan efektifitas kegiatan penyuluhan pertanian.
4. Membimbing dan membina serta mengadakan evaluasi kegiatan para PPL di wilayah penyuluhan pertanian.
5. Memberi saran, rekomendasi perbaikan usaha tani yang lebih menguntungkan.

b. Penyuluh Pertanian Madya (PPM)

Penyuluh Pertanian Madya adalah para penyuluh yang tadinya penyuluh pertanian lapangan yang selanjutnya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan serta lulus dalam seleksi yang diadakan, dapat ditetapkan sebagai Penyuluh Pertanian Madya. Mereka selanjutnya ada yang ditetapkan sebagai *program officer* dan *training officer* dan ada pula yang ditetapkan sebagai *program officer* dan *supervisor*. Pada umumnya seorang PPM akan mengemban tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program penyuluhan pertanian di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
2. Melakukan bimbingan dan supervisi kegiatan para Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL).
3. Melaksanakan latihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para PPL serta tokoh masyarakat tani.
4. Melaksanakan penilaian terhadap kegiatan para PPL dan program penyuluhan pertanian.
5. Mengelola kompleks BPP sebagai pusat kegiatan penyuluhan pertanian.

c. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) adalah petugas yang ditetapkan pada setiap Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP). Para Penyuluhan Pertanian Lapangan akan mengemban tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyebarkan informasi pertanian yang bermanfaat.
2. Mengajarkan keterampilan yang lebih baik.
3. Memberikan saran-saran atau rekomendasi bagi usaha tani yang lebih menguntungkan.



4. Membantu mengikhtiarkan sarana produksi, fasilitas kerja serta bahan informasi pertanian yang diperlukan para petani.
5. Mengembangkan swakarya dan swasembada para petani agar taraf kehidupannya dapat lebih meningkat.

Dalam pelaksanaan di lapangan spesialisasi penyuluh pertanian dibagi menjadi penyuluh pertanian lapangan, spesialis, dan madya. Penyuluh pertanian lapangan merupakan penyuluh pertanian yang membawahi wilayah kerja beberapa desa dan bertanggungjawab langsung melakukan kontak dengan petani. Oleh karena itu, sering dikaitkan bahwa kelemahan petani dikatakan sebagai kelemahan para penyuluh pertanian lapangan.

Program penyuluhan pertanian merupakan suatu rangkaian rencana untuk memecahkan program-program pertanian yang dihadapi oleh petani di lapangan. Biasanya rencana kegiatan ini tercakup dalam satu paket yang disusun masalah yang dihadapi oleh para penyuluh lapangan di dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. Di samping itu juga proses program penyuluhan ini didasarkan pada model pengambilan keputusan yang membedakan pilihan yang harus ditentukan dengan pengetahuan yang harus dikumpulkan untuk menentukan pilihan tersebut dimana penyuluh lapangan itu harus memutuskan sendiri atau secara bersama-sama (Van Den Ban dan Hawkins, 1999).

### **2.2.3 Penyuluhan Swadaya**

Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam bidang usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri dan mampu menjadi penyuluh, (UU nomor 16 tahun 2006).

Penyuluh swadaya adalah petani atau warga masyarakat yang secara sukarela melakukan kegiatan penyuluhan dilingkungannya, petani yang menjadi penyuluh tidak memperoleh imbalan dari dan oleh masyarakat di lingkungannya (Mardikanto, 2009). Penyuluhan yang dikelola oleh masyarakat (penerima manfaat) akan memiliki potensi untuk dikembangkan, konsekuensinya adalah penyuluhan seperti itu harus dibiayai sendiri oleh masyarakat (penerima manfaat).

Menurut (Suhardiyono, 1992) penyuluhan pertanian diartikan sebagai system pendidikan non formal untuk petani beserta keluarganya. Petani belajar

dengan usahanya sendiri, kepentingan dari petani diusahakan menjadi keinginan petani dan dibantu oleh penyuluhan agar dapat mendidik dirinya sendiri. Ruang lingkungannya adalah petani yang lebih baik, berusaha tani yang lebih menguntungkan, hidup lebih sejahtera, kemudian ditambah dengan masyarakat tani lebih makmur dan lingkungan hidupnya jauh lebih baik dari sebelumnya.

Program penyuluhan pertanian merupakan suatu rangkaian rencana untuk memecahkan program-program pertanian yang dihadapi oleh petani di lapangan. Biasanya rencana kegiatan ini tercakup dalam satu paket yang disusun masalah yang dihadapi oleh para penyuluh lapangan didalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. Di samping itu juga proses program penyuluhan ini didasarkan pada model pengambilan keputusan yang membedakan pilihan yang harus ditentukan dengan pengetahuan yang harus dikumpulkan untuk menentukan pilihan tersebut dimana penyuluh lapangan itu harus memutuskan sendiri atau secara bersama-sama. (Van Den Ban dan Hawkins, 1999).

### 2.3 Budidaya Jagung Hibrida

Jagung (*Zea mays* L.) merupakan salah satu komoditas strategis dan bernilai ekonomi, serta mempunyai peluang untuk dikembangkan sebagai sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras. Beberapa tahun terakhir kebutuhan jagung terus meningkat sejalan dengan meningkatnya pertambahan jumlah penduduk dan kebutuhan untuk pakan ternak (Soeprapto, 1998).

Tahapan budidaya jagung hibrida, meliputi : pengolahan tanah, persiapan tanam, penanaman dan pemupukan, pemeliharaan, panen dan pasca panen. Lebih lengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Pengolahan Tanah.

Tanah yang baik untuk jagung adalah tanah yang gembur dan subur, karena tanaman ini memerlukan *aerose* dan *draenase* yang baik. Jagung dapat tumbuh baik pada berbagai jenis tanah asalkan mendapat pengolahan yang baik. Tanah dengan tekstur lempeng berdebu adalah yang terbaik untuk pertumbuhan jagung. Tanah dengan tekstur berat bersih dapat ditanami jagung dengan hasil baik bila pengolahan tanah dikerjakan secara optimal, sehingga aerasi dan ketersediaan air dalam tanah berada dalam kondisi baik (Sutoro dkk, 1988).



Pengolahan tanah untuk penanaman jagung dapat dilakukan dengan dua cara yaitu olah tanah sempurna (OTS) dan tanpa olah tanah (TOT) bila lahan gembur. Namun bila tanah berkadar liat tinggi sebaiknya dilakukan pengolahan tanah sempurna (intensif). Pada lahan yang ditanami jagung dua kali setahun, penanaman pada musim penghujan (rendeng) tanah diolah sempurna dan pada musim tanam berikutnya (musim gadu) penanaman dapat dilakukan dengan tanpa olah tanah untuk mempercepat waktu tanam.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi tertinggi diperoleh lewat pengolahan tanah yang baik dan benar, yaitu dengan cara dibajak dan digaru. Dengan pengolahan tanah akan diperoleh media yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan akar, mengurangi keberadaan gulma serta memperbaiki sirkulasi udara dalam tanah. Kegiatan ini dilakukan minimal 15 hari sebelum tanam. Akan tetapi penanaman tanpa olah tanah (TOT) bisa juga dilakukan untuk mengejar waktu tanam. Dengan catatan pembersihan lahan harus tetap dijaga untuk mengurangi serangan hama atau penyakit sisa dari tanaman terdahulu.

## 2. Persiapan Tanam

Benih yang akan digunakan sebaiknya bermutu tinggi, baik mutu genetik, fisik maupun fisiologinya. Berasal dari varietas unggul (daya tumbuh besar, tidak tercampur benih/varietas lain, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit). Benih yang demikian dapat diperoleh bila menggunakan benih bersertifikat. Pada umumnya benih yang dibutuhkan sangat bergantung pada kesehatan benih, kemurnian benih dan daya tumbuh benih.

Benih dapat diperoleh dari penanaman sendiri yang dipilih dari beberapa tanaman jagung yang sehat pertumbuhannya. Dari tanaman terpilih, diambil yang tongkolnya besar, barisan biji lurus dan penuh tertutup rapat oleh klobot, dan tidak terserang oleh hama penyakit. Tongkol dipetik pada saat lewat fase matang fisiologi dengan ciri: biji sudah mengeras dan sebagian besar daun menguning. Tongkol dikupas dan dikeringkan hingga kering betul. Apabila benih akan disimpan dalam jangka lama, setelah dikeringkan tongkol dibungkus dan disimpan di tempat kering. Dari tongkol yang sudah kering, diambil biji bagian tengah sebagai benih. Biji yang terdapat di bagian ujung dan pangkal

tidak digunakan sebagai benih. Daya tumbuh benih harus lebih dari 90%, jika kurang dari itu sebaiknya benih diganti. Benih yang dibutuhkan adalah sebanyak 20-30 kg/ha.

Sebelum benih ditanam, sebaiknya dicampur dulu dengan fungisida untuk menangkal serangan jamur. Sedangkan bila diduga akan ada serangan lalat bibit dan ulat agrotis, sebaiknya benih dimasukkan ke dalam lubang bersama-sama dengan insektisida butiran dan sistemik.

### 3. Penanaman dan Pemupukan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanaman adalah split tanam antara jantan dan betina, perbandingan populasi jantan : betina, jarak tanam, penugalan dan jumlah benih perlubang.

- a. Pemisahan waktu tanam dimana benih jantan ditanam lebih dahulu dan diberi tanda patok berbendera, baru 6 hari kemudian benih betina ditanam.
- b. Perbandingan populasi jantan dengan betina adalah 1 : 4.
- c. Jarak tanam antar betina adalah 75 x 25 cm, dan jarak baris betina dengan baris jantan adalah 50 cm.
- d. Lahan ditugal dengan kedalaman 5 cm, kemudian benih dimasukkan satu benih perlubang dan ditutup lagi dengan abu atau sekam.

Pupuk yang digunakan adalah pupuk campuran antara ZA : SP-36 : KCl dengan perbandingan dosis perhektar adalah 280 : 210 : 35. Pemupukan pupuk campuran ini dilakukan dalam tiga aplikasi berturut-turut adalah :

- a. Umur 0 hst dengan dosis ZA : SP-36 : KCl adalah 70 : 140 : 35 yang diaplikasi dengan tugal pada jarak 5 cm dari lubang dan ditutup lagi.
- b. Umur 15 hst dengan dosis ZA : SP-36 adalah 70 : 70 yang diaplikasikan dengan cara tugal 10 cm dari lubang tanam dan ditutup lagi.
- c. Umur 45 hst dengan dosis ZA sebanyak 140 kg yang diaplikasikan dengan digejik pada jarak 10 cm dari lubang tanam dan ditutup lagi.

Pemupukan sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Pemupukan berarti memberikan unsur hara maupun nutrisi tambahan yang kurang atau tidak terdapat dalam tanah guna mengoptimalkan pertumbuhan, perkembangan dan hasil panen tanaman jagung.



#### 4. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman meliputi penjarangan dan penyulaman, penyiangan, pembumbunan, serta pengendalian hama dan penyakit. Dengan penjarangan maka dapat ditentukan jumlah tanaman per lubang sesuai dengan yang dikehendaki. Apabila dalam 1 lubang tumbuh 3 tanaman, sedangkan yang dikehendaki hanya 2 atau 1, maka tanaman tersebut harus dikurangi. Tanaman yang tumbuhnya paling tidak baik, dipotong dengan pisau atau gunting yang tajam tepat di atas permukaan tanah. Pencabutan tanaman secara langsung tidak boleh dilakukan, karena akan melukai akar tanaman lain yang akan dibiarkan tumbuh. Penyulaman bertujuan untuk mengganti benih yang tidak tumbuh/mati. Kegiatan ini dilakukan 7-10 hari sesudah tanam. Jumlah dan jenis benih serta perlakuan dalam penyulaman sama dengan sewaktu penanaman. Penyulaman hendaknya menggunakan benih dari jenis yang sama. Waktu penyulaman paling lambat dua minggu setelah tanam.

Penyiangan bertujuan untuk membersihkan lahan dari tanaman pengganggu (gulma). Penyiangan dilakukan 2 minggu sekali. Penyiangan pada tanaman jagung yang masih muda biasanya dengan tangan atau cangkul kecil, garpu dan sebagainya. Hal yang penting dalam penyiangan ini tidak mengganggu perakaran tanaman yang pada umur tersebut masih belum cukup kuat mencengkeram tanah. Hal ini biasanya dilakukan setelah tanaman berumur 15 hari.

Pembumbunan dilakukan bersamaan dengan penyiangan dan bertujuan untuk memperkuat posisi batang, sehingga tanaman tidak mudah rebah. Selain itu juga untuk menutup akar yang bermunculan di atas permukaan tanah karena adanya aerasi. Kegiatan ini dilakukan pada saat tanaman berumur 6 minggu, bersamaan dengan waktu pemupukan. Caranya, tanah di sebelah kanan dan kiri barisan tanaman diuruk dengan cangkul, kemudian ditimbun di barisan tanaman. Dengan cara ini akan terbentuk guludan yang memanjang. Untuk efisiensi tenaga biasanya pembubunan dilakukan bersama dengan penyiangan kedua yaitu setelah tanaman berumur 1 bulan.

Penyakit yang banyak dijumpai pada tanaman jagung adalah penyakit bulai dan jamur (*Fusarium sp*). Pengendalian penyakit bulai dengan perlakuan

benih, 1 kg benih dicampur dengan *metalaksis* (ridhomil atau saromil) 2 gr yang dilarutkan dalam 7,5-10 ml air. Sementara itu untuk jamur (*Fusarium*) dapat disemprot dengan Fungisida (Dithane M-45) dengan dosis 45 gr / tank isi 15 liter. Penyemprotan dilakukan pada bagian tanaman di bawah tongkol. Ini dilakukan sesaat setelah ada gejala infeksi jamur. Dapat juga dilakukan dengan cara membuang daun bagian bawah tongkol dengan ketentuan biji tongkol sudah terisi sempurna dan biji sudah keras.

Hama yang umum mengganggu pertanaman jagung adalah lalat bibit, penggerek batang dan tongkol. Lalat bibit umumnya mengganggu pada saat awal pertumbuhan tanaman, oleh karena itu pengendaliannya dilakukan mulai saat tanam menggunakan *insektisida carbofuran* utamanya pada daerah-daerah endemik serangan lalat bibit. Untuk hama penggerek batang, jika mulai nampak ada gejala serangan dapat dilakukan dengan pemberian *carbofuran* (3-4 butir *carbofuran*/tanaman) melalui pucuk tanaman pada tanaman yang mulai terserang. Hama penggerek batang dikendalikan dengan memberikan *insektisida carbofuran* sebanyak 3-4 butir dengan ditugal bersamaan pemupukan atau disemprot dengan insektisida cair *fastac* atau *regent* dengan dosis sesuai yang tertera pada kemasan.

## 5. Panen

Pemanenan jagung dilakukan pada saat jagung telah berumur sekitar 100 hst (hari setelah tanam) tergantung dari jenis varietas yang digunakan. Jagung yang telah siap panen atau sering disebut masak fisiologis ditandai dengan daun jagung/klobot telah kering, berwarna kekuning-kuningan, dan ada tanda hitam di bagian pangkal tempat melekatnya biji pada tongkol. Panen yang dilakukan sebelum atau setelah lewat masak fisiologis akan berpengaruh terhadap kualitas kimia biji jagung karena dapat menyebabkan kadar protein menurun, namun kadar karbohidratnya cenderung meningkat. Setelah panen dipisahkan antara jagung yang layak jual dengan jagung yang busuk, muda dan berjamur selanjutnya dilakukan proses pengeringan.

Permasalahan akan timbul bila waktu panen yang berlangsung pada saat curah hujan masih tinggi, sehingga kadar air biji cukup tinggi, karena penundaan pengeringan akan menyebabkan penurunan kualitas hasil biji jagung. Cara pengeringan selain dengan penjemuran langsung di ladang, juga dapat dilakukan



dalam bentuk tongkol terkupas yang dikeringkan di lantai jemur dengan pemanasan matahari langsung, dan bila turun hujan ditutupi dengan terpal plastik. Cara pengeringan jagung demikian memiliki kelemahan karena mudah ditumbuhi jamur, serangan hama kumbang bubuk, dan kotoran. Selain itu nilai kadar air biji jagung biasanya masih tinggi ( $>17\%$ ).

Penundaan panen selama 7 hari setelah masak fisiologis dapat membantu proses penurunan kadar air dari 33% menjadi 27%. Namun penundaan pengeringan dengan cara menumpuk tongkol jagung yang telah dipanen di atas terpal selama 3–5 hari, meskipun mampu menurunkan kadar air akan tetapi dapat menyebabkan terjadinya serangan cendawan sampai mencapai 56–68%, sedangkan tanpa penundaan pengeringan, serangan cendawan dapat ditekan menjadi hanya berkisar antara 9–18%.

Penyebab lain terjadinya kerusakan pada biji jagung adalah karena adanya luka pada saat pemipilan, dan ini terjadi jika saat pemipilan kadar air biji masih tinggi ( $>20\%$ ). Biji yang terluka pada kondisi kadar airnya masih tinggi menyebabkan mudah terinfeksi oleh cendawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemipilan jagung pada kadar air 15–20% dapat menimbulkan infeksi cendawan maksimal mencapai 5%. Dengan menggunakan alat dan mesin pemipil pada kadar air biji jagung 35%, infeksi cendawan mencapai 10–15%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kadar air biji dan semakin lama disimpan, peluang terinfeksi cendawan akan lebih besar. Demikian halnya dengan tingkat serangan hama kumbang bubuk.

## 6. Pasca Panen

Setelah jagung dipetik biasanya dilakukan proses lanjutan yang merupakan serangkaian pekerjaan yang berkaitan dan akhirnya produk siap disimpan atau dipasarkan. Tahapan pasca panen yang dapat dilakukan antara lain, pengupasan, pengeringan dan pemipilan.

Jagung dikupas pada saat masih menempel pada batang atau setelah pemetikan selesai. Pengupasan ini dilakukan untuk menjaga agar kadar air di dalam tongkol dapat diturunkan dan kelembaban di sekitar biji tidak menimbulkan kerusakan biji atau mengakibatkan tumbuhnya cendawan. Pengupasan dapat memudahkan atau memperingan pengangkutan selama proses pengeringan. Untuk

jagung masak mati sebagai bahan makanan, begitu selesai dipanen, kelobot segera dikupas.

Pengeringan jagung dapat dilakukan secara alami atau buatan. Secara tradisional jagung dijemur di bawah sinar matahari sehingga kadar air berkisar 9-11%. Biasanya penjemuran memakan waktu sekitar 7-8 hari. Penjemuran dapat dilakukan di lantai, dengan alas anyaman bambu atau dengan cara diikat dan digantung. Secara buatan dapat dilakukan dengan mesin pengering untuk menghemat tenaga manusia, terutama pada musim hujan. Terdapat berbagai cara pengeringan buatan, tetapi prinsipnya sama yaitu untuk mengurangi kadar air di dalam biji dengan panas pengeringan sekitar 38-43 derajat C, sehingga kadar air turun menjadi 12-13 %. Mesin pengering dapat digunakan setiap saat dan dapat dilakukan pengaturan suhu sesuai dengan kadar air biji jagung yang diinginkan.

Setelah dijemur sampai kering jagung dipipil. Pemipilan dapat menggunakan tangan atau alat pemipil jagung bila jumlah produksi cukup besar. Pada dasarnya "memipil" jagung hampir sama dengan proses perontokan gabah, yaitu memisahkan biji-biji dari tempat pelekatan. Jagung melekat pada tongkolnya, maka antara biji dan tongkol perlu dipisahkan.

#### **2.4. Rujukan Penelitian Terdahulu.**

Penelitian yang dilakukan oleh Marwin (2001) mengenai "Evaluasi Pelaksanaan Penyuluh Pertanian pada Tanaman Padi Sawah". Hasil yang diperoleh adalah pelaksanaan program penyuluhan belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan petani belum sesungguhnya mengikuti melaksanakan program, tempat penyuluhan yang jauh dan fasilitas BPP kurang, selain itu program metoda dan alat peraga kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para petani. Serta rencana dan kinerja penyuluhan yang diberikan masih sangat sederhana dan bersifat umum. Permasalahan yang dihadapi PPL adalah sumber daya petani yang masih begitu rendah sehingga sulit untuk menentukan metoda penyuluhan yang tepat dan pas, fasilitas belajar bagi petani yang kurang lengkap, serta materi yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani sehingga antara petani dan PPL tidak searah dan tidak nyambung.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahdi (2004) dengan judul "Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Sebagai Tenaga Profesional.



Mengemukakan tiga peranan penting penyuluhan kedepan. Pertama adalah penyuluh sebagai organisator dan motivator bagi masyarakat petani dalam memandu masyarakat untuk memahami permasalahannya dan mendiskusikan untuk mencari jalan keluarnya. Untuk peran ini penyuluh mendorong masyarakat petani yang ada untuk mendudukan permasalahannya mulai dari persoalan teknis, ekonomis, dan sosial guna pengembangan usahatannya lebih lanjut. Peran kedua itu adalah sebagai komunikator untuk menjembatani upaya penyelesaian persoalan petani. Melalui institusinya penyuluh dapat membangun kerjasama dengan kelembagaan penelitian dan lembaga lainnya untuk bersama mendampingi masyarakat dalam melakukan penelitian, pengujian dan evaluasinya dalam pengembangan dan penyebaran teknologi. Teknologi-teknologi tersebut diinventarisasi dan ditambah dengan eksternal teknologi didokumentasi. Peran ketiga adalah penyuluh sebagai pengumpul (kolektor) dari perkembangan teknologi yang ada untuk maksud pengembangan dan distribusinya kepada kelompok masyarakat lain.

Penyuluh sebagai sebuah profesi untuk kepentingan ganda sebagai pengabdikan bagi kemajuan masyarakat dan sebagai sumber pekerjaan yang bernilai ekonomis. Konsekwensi logisnya adalah pengembangan kualitas SDM penyuluh menjadi kebutuhan ikutan yang tak terelakkan. Penjenjangan karir yang jelas dan kesempatan pengembangan diri melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan menjadi diperlukan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Suparta (2000) mengenai topik "Penyuluhan Sistem Agribisnis suatu Pendekatan Holistik". Nyoman berpendapat bahwa rendah peningkatan pendapatan petani selama ini dikarenakan terlalu berorientasi kepada produksi dan produktivitas, kurang berorientasi kepada kebutuhan pasar dan hubungan keagribisnis, sehingga perolehan nilai tambah yang didapat rendah. Rendahnya perilaku agribisnis tidak hanya terjadi pada petani tetapi juga terjadi pada pelaku perusahaan agribisnisnya. Kegiatan penyuluhan juga ditujukan kepada para pelaku perusahaan agribisnis lainnya serta lembaga-lembaga tertentu yang berada di subsistem jasa penunjang lainnya. Kebersamaan dan saling ketergantungan diantara semua perusahaan pelaku agribisnis lainnya akan menghasilkan visi, misi, etika bisnis, tujuan dan sasaran

serta rencana kerja bersama yang harmonis untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan kebutuhan pasar.

Untuk meningkatkan perilaku agribisnis diperlukan pendekatan penyuluhan sistem agribisnis yang bertujuan untuk sistem agribisnis harus jelas kearah terbentuknya perilaku agribisnis yang berkebudayaan industri. Penyuluhan sistem agribisnis juga memerlukan perubahan perilaku penyuluh, menjadi penyuluh sistem agribisnis yang profesional. Penyuluh akan semakin efektif apabila secara sungguh-sungguh mampu menghayati materi penyuluhan sistem agribisnis, dan makin berkemampuan tinggi dalam menerapkan keanekaragaman metode penyuluhan dan media komunikasi kepada sasaran penyuluhan secara tepat dan bijak.

Berdasarkan penelitian Subejo (2009) tentang “Penyuluhan Pertanian Indonesia (Isu Privatisasi dan Implikasinya)” menyatakan bahwa penyuluhan pertanian perlu diberlakukan privatisasi pada pelayanannya agar : (1) pelayanan dan penyampaian lebih efisien, (2) menurunkan anggaran belanja pemerintah dan, (3) pelayanan dengan kualitas tinggi.

Kemudian penentuan jenis penyuluhan yang mana akan tetap ditangani oleh agen pemerintah dan akan dilakukan oleh sektor *private*. Untuk alternatif sumber pendanaan dapat berasal dari pemerintah, *private enterprise*, *non-government organization* atau *voluntary fund* dari sumber lain.

Implikasi strategis dari privatisasi penyuluhan pertanian yang dapat diperankan oleh pembuat kebijakan adalah menciptakan dan memberikan iklim kondusif agar tercipta suatu situasi dimana sektor publik menjadi pemeran utama dan memiliki fokus untuk bertanggungjawab sebagai suatu agen pengkoordinasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam hal tujuan yaitu: menganalisis pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan kepada petani atau kelompok tani dengan menggunakan metode yang sama study kasus.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dilihat dari arah-arah masing tujuan, dalam penelitian ini akan dikemukakan bagaimana pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan melalui pendekatan penyuluhan swasta, penyuluhan pemerintah dan penyuluhan swadaya kepada petani. Kemudian juga mengemukakan mengenai pendapat petani terhadap penyuluhan



yang dilaksanakan oleh penyuluhan swasta, penyuluhan pemerintah, penyuluhan swadaya kepada petani, sementara selama ini yang terjadi adalah banyak mengemukakan tentang kegiatan penyuluhan yang dilakukan melalui pendekatan penyuluhan dari pemerintah seperti yang telah dilakukan oleh Apriyani (2007) dengan judul “Proses Komunikasi pada Kelompok Tani dalam Menyebarkan Teknologi Tentang Metode *System Rice Intensification* (SRI) di Kelurahan Limau Manis kecamatan Pauh Padang”, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Marwin (2001) mengenai “Evaluasi Pelaksanaan Penyuluh Pertanian pada Tanaman Padi Sawah”.

Berdasarkan penjabaran di atas, menjadi penting untuk diteliti mengenai “*Study Pelaksanaan Penyuluhan Budidaya Jagung Hibrida*”, sehingga nantinya dapat memberikan informasi mengenai penyuluhan yang dilakukan melalui pendekatan oleh penyuluh swasta sehingga dapat dibandingkan dengan informasi mengenai penyuluhan melalui pendekatan penyuluh oleh pemerintah dan penyuluhan oleh swadaya.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan Maret 2011 di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena pada daerah ini selain terdapat kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pemerintah (Lampiran 10), penyuluh swadaya dan juga menjadi wilayah kerja agen penyuluhan swasta (Lampiran 13). Agen penyuluhan swasta yang dimaksud adalah agen yang berasal dari perusahaan yang banyak mensponsori demplot-demplot jagung hibrida. Nagari ini merupakan nagari yang dikunjungi oleh agen penyuluh swasta yang terkait dengan topik penelitian.

##### **3.2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode studi kasus (*case study*). Menurut Nazir (2003), metode studi kasus (*case study*) adalah penelitian tentang suatu objek penelitian yang berkenaan dengan suatu fakta yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas yang dimana tujuannya adalah memberikan gambaran yang mendetil tentang latar belakang, sifat-sifat, indikator-indikator yang khas dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan studi pelaksanaan kegiatan penyuluhan budidaya jagung hibrida serta mengidentifikasi pendapat petani mengenai materi penyuluhan jagung hibrida.

Studi kasus berusaha memberikan gambaran yang rinci dengan tekanan situasi secara keseluruhan mengenai proses atau urutan suatu kejadian. Keuntungan studi kasus ini, peneliti akan mendapatkan gambaran yang luas dan lengkap dari subjek dan apa-apa yang akan ditelitinya. Terkait dengan pernyataan tersebut, yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan swasta yang di Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam.



### 3.3 Metode Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah petani yang menanam jagung di Nagari Lubuk Basung dan telah mendapatkan penyuluhan. Selanjutnya populasi akan dikelompokkan berdasarkan bentuk penyuluhan yang didapatkannya (penyuluhan oleh pemerintah, penyuluhan oleh swasta dan penyuluhan oleh swadaya). Penetapan kelompok tani dipilih secara purposive berdasarkan jenis penyuluhan yang didapatnya. Untuk lebih lengkap lihat Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Sampel Penelitian dari Kelompok Tani

No.	Kelompok Tani	Jenis Penyuluhan	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1.	Kelompok Tani BD II Silayang	Swasta	28 orang	14 orang
2.	Kelompok Tani Nusa Indah	Pemerintah	36 orang	18 orang
3.	Kelompok Tani Parit Panjang Permai	Swadaya	17 orang	9 orang
<b>Jumlah</b>			<b>81 orang</b>	<b>41 orang</b>

Menurut Surachmat (1982), pengambilan jumlah sampel ditentukan apabila jumlah populasi <100 diambil 50%, apabila jumlah populasi berkisar antara 100-1000 diambil sebanyak 15-50% dan jika jumlah populasi >1000 diambil sebanyak 10-15%. Dari jumlah anggota kelompok tani ke tiga kelompok 81 orang diambil sebanyak 50%, sehingga jumlah sampel yang diambil sebanyak 41 orang wakil rumah tangga.

Untuk memperkaya data dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian yang akan dijalankan ini atau sebagai informan kunci. Menurut Moleong (2004), informan adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian agar informasi lebih aktual dan faktual, maka informan yang dimaksud adalah orang yang mengetahui dan memahami sepenuhnya objek kajian yang diteliti. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah penyuluh swasta yang memberikan penyuluhan dan sekaligus membawa produknya untuk dipasarkan kepada petani, penyuluh pemerintah, Ketua Gapoktan daerah tersebut, Ketua Kelompok Tani dan anggota Kelompok Tani BD II Silayang, Ketua Kelompok Tani Nusa Indah dan ketua Kelompok Tani Parit Panjang Permai. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Informan Kunci Penelitian

No.	Informan Kunci	Jumlah
1.	Penyuluh Swasta	1 orang
2.	Penyuluh Pemerintah	1 orang
3.	Ketua Kelompok Tani	3 orang
Jumlah		5 orang

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan kuisioner dan wawancara langsung dengan penyuluh swasta, penyuluh pemerintah dan kepada 41 orang petani yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Data sekunder yang merupakan data tertulis bersumber dari Kelompok Tani, UPT Kecamatan Lubuk Basung, Dinas Pertanian TK II Kabupaten Agam yang nantinya dapat mendukung hasil penelitian, serta literatur terkait.

### 3.5. Variabel Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang pertama, yaitu : Menganalisis pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Nagari Lubuk Basung, maka variabelnya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan, meliputi :
  - a) Waktu kunjungan
  - b) Identifikasi masalah
  - c) Tujuan kegiatan / program
2. Tahap Pelaksanaan, meliputi :
  - a) Penyuluh
  - b) Sasaran
  - c) Metoda
  - d) Media
  - e) Materi
  - f) Waktu
  - g) Tempat



Sementara untuk tujuan penelitian yang kedua yaitu mengidentifikasi pendapat petani terhadap materi penyuluhan. Pendapat petani terhadap materi penyuluhan meliputi:

- 1) Pengolahan tanah
- 2) Persiapan tanam
- 3) Penanaman dan pemupukan
- 4) Pemeliharaan tanaman
- 5) Pemanenan
- 6) Pasca panen

Pendapat petani dilihat dari tiga aspek, yaitu :

- 1) Pengetahuan petani (kognitif).
- 2) Sikap petani (afektif).
- 3) Keterampilan petani (psikomotorik).

(Mardikanto, 2009)

### 3.6. Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan seluruh data yang ada untuk selanjutnya dilakukan pembahasan yang diarahkan pada tujuan penelitian. Analisa secara deskriptif kualitatif ini dilakukan terhadap data kualitatif. Dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi-informasi ataupun uraian dari sumber data (responden), dikaitkan dengan data lainnya sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mencapai tujuan penelitian. Jadi analisis merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya (Subagyo, 2004).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Analisa data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan seluruh data yang ada untuk selanjutnya dilakukan pembahasan yang diarahkan pada tujuan penelitian yaitu menganalisis pelaksanaan penyuluhan swasta, penyuluhan pemerintah dan penyuluhan swadaya di Nagari Lubuk Basung. Data yang bersifat kualitatif ini digambarkan dengan kata-kata dan data tersebut dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan.

### 3.7. Definisi Operasional.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti atau menspesifikasikan kegiatan untuk mengukur variabel penelitian (Nazir, 2003). Berdasarkan kerangka teori, konsep dan kerangka yang telah disajikan pada bagian tinjauan pustaka, maka penelitian ini menggunakan definisi operasional agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Adapun definisi itu adalah sebagai berikut :

1. Pendapat petani yaitu respon atau jawaban petani terhadap pertanyaan yang diberikan, yang dikelompokkan ke dalam setuju, ragu-ragu atau tidak setuju.
2. Perencanaan, yaitu kegiatan waktu kunjungan, identifikasi masalah serta adanya tujuan kegiatan pada kelompok tani oleh penyuluh
3. Pelaksanaan, yaitu realisasi kegiatan perencanaan oleh penyuluh bersama kelompok tani
4. Aspek pengetahuan/kognitif adalah efek yang terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi petani tentang jagung hibrida. Efek ini berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki petani, keterampilan yang dimiliki petani, kepercayaan yang dimiliki petani dan informasi yang dimiliki.
5. Aspek sikap/afektif adalah efek yang timbul dikarenakan ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau tidak disukai oleh petani terhadap jagung hibrida. Efek ini terkait dengan adanya hubungan dengan emosi, sikap, atau nilai.
6. Aspek keterampilan/psikomotorik adalah efek yang menyangkut pada perilaku yang riil dan nyata yang dapat diamati melalui pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan perilaku. Bentuk nyata dari efek ini adalah petani menerapkan tanaman jagung hibrida yang diberikan oleh penyuluh swasta.
7. Penyuluh swasta dalam penelitian ini adalah tenaga pemasaran yang memasarkan produk dari perusahaan dan sekaligus melaksanakan fungsi-fungsi penyuluhan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

##### 4.1.1 Letak dan Keadaan Geografi

Kabupaten Agam merupakan salah satu dari kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, terletak antara 00°2'-00°29"LS dan 99°52'-100°23"BT, dengan luas daerah 223.230 Ha atau 5,29% dari luas provinsi Sumatera Barat (Luas Propinsi Sumatera Barat 42.229,04 Km<sup>2</sup>). Sementara itu, posisi letak wilayah Kabupaten Agam berbatasan Sebelah Utara dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Tanah Datar, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota, Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Nagari Lubuk Basung adalah salah satu bagian dari nagari yang berada di Pemerintahan Kecamatan Lubuk Basung dengan Luas 114,71 Km<sup>2</sup>. Nagari Lubuk Basung memiliki batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan IV Nagari, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Geragahan, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Kampung Pinang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Raya.

Tabel 3. Gambaran Umum Nagari Lubuk Basung

No.	Uraian	Jumlah/Keterangan
1.	Luas Daerah	114,71 Km <sup>2</sup>
2.	Jumlah Jorong	7 Jorong
3.	Jarak dari Ibukota Kecamatan	10 Km
4.	Jarak dari Ibukota Kabupaten	2,5 Km
5.	Topografi	Daerah dataran dan berbukit
6.	Mata pencaharian penduduk	Pertanian (perkebunan, peternakan, tanaman pangan) dan Perdagangan

Sumber : Profil Nagari Lubuk Basung 2009

Secara umum Nagari Lubuk Basung memiliki luas daerah 114,71 Km<sup>2</sup> dan 40-2000 meter dari permukaan laut (mdpl). Topografi Nagari Lubuk Basung terdiri dari daerah dataran dan berbukit, mata pencaharian penduduknya didominasi oleh pertanian, perkebunan, peternakan, tanaman pangan dan perdagangan.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Nagari Lubuk Basung dan Jenis Kelamin Berdasarkan Jumlah Jorong

No	Jorong	Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Siguhung	1.113	1.169	2.282
2	Parit Panjang	1.792	1.820	3.612
3	Pasar Lubuk Basung	681	693	1.374
4	Balai Ahad	2.902	3.025	5.927
5	Sangkir	1.866	1.896	3.762
6	Surabaya	7.025	6.761	13.786
7	Sungai Jaring	3.167	3.205	6.372
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>18.546</b>	<b>18.569</b>	<b>37.115</b>

Sumber : Profil Nagari Lubuk Basung 2009

Berdasarkan Tabel 4 di atas, telah mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dari pada penduduk berjenis perempuan. Dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 18.546 jiwa sementara jumlah penduduk perempuan berjumlah 18.569 jiwa.

#### 4.1.2 Luas Lahan Menurut Penggunaanya.

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tentang komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Agam.

Tabel 5. Komposisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Agam Tahun 2009

No	Jenis Penggunaan Lahan	Jumlah (Ha)	%
1.	Lahan Sawah	2.037	13,8
2.	Perkebunan Rakyat	1.303	8,83
3.	Padang Ilalang/Tempat Gembala	50	0,33
4.	Tempat Rekreasi	1.017	6,89
5.	Jalan Raya	10.340	70,15
<b>Jumlah</b>		<b>14.747</b>	<b>100</b>

Sumber: Profil Nagari Lubuk Basung 2009

Dari Tabel 5 terlihat bahwa penggunaan lahan terluas di Nagari Lubuk Basung digunakan untuk jalan raya (70,15%), sedangkan penggunaan lahan terkecil digunakan untuk padang ilalang/tempat gembala (0,33%). Sementara itu, luas lahan yang digunakan untuk areal sawah adalah 2.037 Ha (13,8%).



Tabel 6. Luas Panen dan Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam

Kecamatan / District		Jagung / Maize	
		Luas / Area (Ha)	Produksi / Production (Ton)
(1)		(2)	(3)
Tanjung Mutiara		525	1.935,0
<b>Lubuk Basung</b>		<b>560</b>	<b>3.126,0</b>
Ampek Nagari		1.262	6.523,0
Tanjung Raya		90	332,0
Matur		39	132,0
IV Koto		114	536,0
Malalak		-	-
Banuhampu		30	99,0
Sungai Pua		29	96,0
Ampek Angkek		670	2.215,0
Candung		95	314,0
Baso		175	579,0
Tilatang Kamang		200	661,0
Kamang Magek		18	60,0
Palembayan		89	328,0
Palupuh		88	324,0
<b>Jumlah Total</b>	<b>2009</b>	<b>3.984</b>	<b>17.260,0</b>
	<b>2008</b>	<b>3.950</b>	<b>16.940,0</b>
	<b>2007</b>	<b>4.223</b>	<b>16.678,0</b>

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Agam, 2009

Kecamatan Lubuk Basung memiliki luas lahan tanam jagung terbesar no 3 di Kabupaten Agam setelah Kecamatan Ampek Angkek dan Kecamatan Ampek Nagari. Luas lahan produksi jagung terbesar di Kabupaten Agam pada Kecamatan Ampek Nagari sebesar 6.523 ton, dan Kecamatan Lubuk Basung sebesar 3.126 ton kemudian Kecamatan Ampek Angkek sebesar 2.215 ton.

## 4.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Penyuluhan di Nagari Lubuk Basung

### 4.2.1 Penyuluh Pemerintah

Penyuluh pemerintah di Kabupaten Agam berjumlah sebanyak 106 orang. Dari 106 orang tersebut, 8 orang diantaranya merupakan penyuluh pertanian pemerintah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan Lubuk Basung (Lampiran 10). PPL untuk Nagari Lubuk Basung saat ini bernama Ibuk Erlina S,ST dan telah bertugas selama 3 tahun.

Penyuluh pemerintah memberikan penyuluhan tentang tanaman budidaya jagung hibrida di wilayah kerjanya masing-masing, selain itu juga ia memberikan

penyuluhan tentang usaha tani padi sawah. Kegiatan penyuluhan yang pernah dilakukan diantaranya Sekolah Lapang Pertanian Tanaman Terpadu (SLPTT) di beberapa kelompok tani wilayah binaan masing-masing bulan April tahun 2010 serta sebagai fasilitator penghubung atas program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) pada program Dinas Pertanian Kabupaten Agam tahun 2010.

Dalam memberikan penyuluhan, PPL ini memberikan penyuluhan kepada 18 kelompok tani (Lampiran 11). Ini merupakan kelompok tani wilayah kerja binaannya. Kecamatan Lubuk Basung mempunyai sebuah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang terdiri diantaranya 8 orang penyuluh pertanian, 2 orang penyuluh peternakan dan 2 orang penyuluh perikanan, untuk lebih jelasnya terdapat pada (Lampiran 12). Penyuluh yang berasal dari pemerintah ini memiliki wilayah kerja per nagari disetiap nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Basung.

#### **4.2.2 Penyuluh Swasta**

Penyuluh swasta berasal dari perusahaan yang ada di Nagari Lubuk Basung ini berjumlah sebanyak 4 orang dari masing-masing produk yang berbeda. Setiap penyuluh swasta ini bekerja memberikan penyuluhan kepada petani-petani yang berusaha tani jagung hibrida. Penyuluh swasta tersebut merupakan penyuluh dengan cakupan wilayah kerja sekabupaten Agam.

Salah satu kegiatan penyuluhan oleh penyuluh swasta adalah dengan cara sistem demplot dan materi yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan petani. Para penyuluh yang berasal dari swasta atau perusahaan ini berada sejak tahun 2009. Akhir-akhir ini penyuluh swasta sangat marak di Nagari Lubuk Basung karena daerah ini berpotensi dalam berusaha tani jagung hibrida. Rincian data jumlah penyuluh swasta menurut perusahaan jagung hibrida di Kabupaten Agam dapat dilihat pada Tabel 7 berikut :



Tabel 7. Data Jumlah Penyuluh Swasta berdasarkan Perusahaan Bibit Jagung di Kabupaten Agam.

No	Nama perusahaan	Jumlah Penyuluh
1	BISI International Tbk	1
2	PT. Dupont	1
3	PT. Syngenta	1
4	PT. Jagung Hibrida Sulawesi	1
<b>Total</b>		<b>4</b>

Sumber : Data Primer wawancara 2011

#### 4.2.3 Penyuluh Swadaya

Penyuluhan swadaya merupakan kegiatan penyuluhan yang berasal dari petani pakar ke petani-petani lainnya yang membudidayakan tanaman jagung hibrida. Petani ini merupakan petani yang telah berhasil membudidayakan tanaman jagung hibrida, selain itu juga ia mampu memberikan penyuluhan kepada petani-petani lainnya. Petani swadaya diberikan kepercayaan untuk memberikan pembinaan kepada petani-petani lain yang berusaha tani jagung hibrida.

Penyuluh swadaya berbeda dengan penyuluh swasta dan penyuluh pemerintah, karena penyuluh ini berdiri sendiri dan tidak ada instansi atau lembaga yang mengawasinya. Penyuluh swadaya ini tidak dibayar melainkan bekerja secara sukarela dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, ilmu kepada petani-petani yang ada disekitarnya.

### 4.3 Profil Kelompok Tani

#### 4.3.1 Kelompok Tani BD II Silayang

Kelompok Tani BD II Silayang ini berdiri pada tahun 2004 yang berlokasi di Silayang Jorong Parit Panjang Nagari Lubuk Basung. Jumlah anggota kelompok ini pada saat pertama kali berdiri berjumlah 26 dan sekarang bertambah menjadi 28 orang anggotanya. Kelompok ini berdiri dilatarbelakangi oleh hasrat dan keinginan petani di daerah ini untuk memajukan usaha taninya, karena petani dikeseluruhan daerah ini belum mengetahui bagaimana cara memajukan usaha taninya.

Kelompok tani ini mengadakan pertemuan 1 kali sebulan yang bertempat di rumah ketua kelompok tani ataupun terkadang menumpang di teras surau yang berada tak jauh dari rumah ketua kelompok tani ini. Kelompok tani ini dikunjungi

oleh penyuluh pemerintah yang memberikan penyuluhan 1 kali dalam sebulan dan dikunjungi oleh agen penyuluh swasta (pemulator) 2 kali dalam sebulan. Kelompok ini sangat aktif dikunjungi oleh agen penyuluh swasta dikarenakan kebanyakan anggota kelompok tani ini sekarang aktif dalam usaha tani jagung.

#### **4.3.2 Kelompok Tani Nusa Indah**

Kelompok Tani Nusa Indah ini berdiri pada tahun 1999, berlokasi di Lubuk Mangindo Jorong Sangkir Nagari Lubuk Basung. Jumlah anggota kelompok tani pada awalnya adalah sebanyak 44 orang dan sekarang mengalami penurunan jumlah anggota kelompok menjadi 36 orang. Kelompok tani ini berdiri dengan tujuan untuk memajukan usaha taninya, karena petani banyak yang belum mengetahui bagaimana cara memajukan usaha taninya.

Kelompok tani ini mengadakan pertemuan 1 kali sebulan yang bertempat di rumah ketua kelompok tani. Pada pertemuan dibahas masalah yang dihadapi petani, perkembangan kegiatan kelompok dan kegiatan apa yang akan dilakukan. Pada kelompok tani ini penyuluhan sering dilakukan oleh penyuluh pemerintah.

#### **4.3.3 Kelompok Tani Parit Panjang Permai**

Kelompok Tani Parit Panjang Permai berdiri pada tahun 2006 yang berlokasi di Parit Panjang Nagari Lubuk Basung. Jumlah anggota kelompok tani pada awalnya adalah sebanyak 19 orang dan sekarang mengalami penurunan jumlah anggota kelompok menjadi 17 orang. Kelompok tani ini berdiri dengan tujuan untuk menjadikan kelompok sebagai wahana belajar dan saling bertukar informasi antar petani dalam rangka memajukan usaha taninya.

Kelompok tani ini mengadakan pertemuan 1 kali sebulan yang bertempat di rumah ketua kelompok tani. Pada pertemuan dibahas mengenai masalah yang dihadapi petani, perkembangan kegiatan kelompok dan kegiatan apa yang akan dilakukan. Kelompok tani ini mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang budidaya jagung dari petani pakar yang menjadi penyuluh swadaya. Keinginan anggota kelompok tani yang kuat untuk maju dan mandiri dalam pengelolaan usahatani menjadikan kelompok tani ini terbuka dengan informasi-informasi terbaru. Sehingga kelompok tani dapat dengan mudah menerima dan menyerap informasi tentang usaha taninya dari pihak manapun, termasuk dari petani pakar



yang tidak lain merupakan penyuluh swadaya. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai visi kelompok tani agar mantap dalam pengelolaan usahatani jagung.

#### 4.4 Identitas Petani Responden

Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan anggota kelompok tani yang terlibat dalam usaha tani jagung hibrida. Adapun dari hasil penelitian lapangan diperoleh gambaran umum mengenai umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman berusaha tani, luas lahan, dan tanggungan keluarga serta pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Identitas Petani Responden

No.	Karakteristik	Kelompok Tani			Jumlah Responden	%
		BD II Silayang	Nusa Indah Permai	Parit Panjang Permai		
1	Umur					
	a. 26-55	13	14	7	34	82,92
	b. > 55	1	4	2	7	17,08
2	Jenis kelamin					
	a. Laki-laki	4	10	8	22	53,65
	b. Perempuan	10	8	1	19	46,35
3	Pendidikan					
	a. SD	10	7	6	23	56,09
	b. SMP	2	4	2	8	19,54
	c. SMA	2	4	1	7	17,07
	d. PT	-	3	-	3	7,30
4	Pekerjaan					
	a. Bertani	14	17	9	40	98
	b. PNS	-	1	-	1	2
5	Luas Lahan					
	a. < 0,25 ha	-	2	-	2	4,90
	b. 0,25 - 0,5 ha	14	14	5	33	80,50
	c. > 0,5	-	2	4	6	14,60
6	Status kepemilikan					
	a. Pemilik	14	18	9	41	100
	b. Pusaka/ulayat	-	-	-	-	-
	c. Sewa	-	-	-	-	-
7	Pengalaman berusaha tani					
	a. < 10 th	5	1	1	7	17,07
	b. 10 - 20 th	6	8	2	16	39,04
	c. 21 - 30 th	2	4	5	11	26,82
	d. > 30 th	1	5	1	7	17,07
8	Tanggungan Keluarga					
	a. < 5 orang	5	7	2	14	34,14
	b. 5 - 8 orang	9	11	7	27	65,86

Sumber : Data diolah 2011

Karakteristik responden yaitu dilihat dari aspek umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, jumlah tanggungan, dan luas lahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8. Pengambilan kriteria sampel tersebut didasari pertimbangan bahwa untuk melihat kemampuan produktifitas seseorang dalam mengelola, menghasilkan sesuatu, merespon suatu pengetahuan dan juga yang didapat tergantung pada umur, tingkat pendidikan serta dipengaruhi oleh latar belakang pekerjaan dan juga intensitasnya bergabung pada wadah tempat menambah ilmunya (Anonim, 2007).

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa rata-rata umur responden berkisar antara 26-55 dengan persentase paling banyak berumur 26-55 tahun sebanyak 34 orang dengan presentase sebesar 82,92%. Selebihnya responden berada pada tingkatan umur > 55 tahun sebanyak 7 (17,08%).

Tingkat pendidikan petani paling banyak ada pada tingkat SD yaitu 23 (56,09%). Tingkat SMP sebanyak 8 orang (19,54%), SMA sebanyak 7 orang (17,07%), dan hanya 3 orang responden saja (7,30%) yang menamatkan pendidikan hingga Perguruan Tinggi. Hal ini menandakan bahwa lebih dari separuh petani responden memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sebanyak (98%) responden memiliki pekerjaan utama sebagai petani, sisanya sebanyak 2% bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Status kepemilikan lahan keseluruhan responden adalah petani pemilik dengan luas lahan terbanyak adalah 0,25 - 0,5 Ha sebanyak (80,50%) petani. Sisanya (4,90%) responden memiliki luas lahan < 0,25 Ha dan (14,60%) petani memiliki luas lahan > 0,5 Ha. Pengalaman berusaha tani petani berkisar pada 10-30 tahun, dengan persentase terbanyak 10-20 tahun sebanyak 16 responden (39,04%). Jumlah tanggungan keluarga petani responden berkisar pada 2-8 orang, dengan persentase sebanyak (65,86%) dengan jumlah tanggungan keluarga 5-8 orang, jumlah tanggungan keluarga < 5 orang sebanyak (34,14%).

## **4.5 Pelaksanaan Penyuluhan**

### **4.5.1 Penyuluhan Swasta**

#### **4.5.1.1 Tahap Perencanaan**

Pada pelaksanaan penyuluhan swasta terdapat tahapan perencanaan yang meliputi : (a) waktu kunjungan, (b) identifikasi masalah, dan (c) tujuan kegiatan.



### **A. Waktu Kunjungan**

Pada tahap perencanaan penyuluh swasta melakukan kunjungan di bulan Oktober pada kelompok tani disaat waktu siang hari dan ada pula waktu kunjungan ini dilakukan pada saat malam hari. Ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penyuluh dengan ketua kelompok tani beserta anggotanya. Pada awal waktu di bulan Oktober melakukan kunjungan ke kelompok tani ini difasilitasi oleh ketua kelompok tani dengan PPL wilayah setempat. Fungsi kunjungan ini berorientasi agar acara terlaksana dengan baik. Tahap kunjungan ini penyuluh swasta bertujuan untuk mengatur waktu untuk acara kunjungan berikutnya, bentuk acara kunjungan awalnya ini bertujuan hanya semata untuk kunjungan tahap awal atau negosiasi tahapan acara yang akan dilaksanakan. Lain dari itu setelah adanya kesepakatan waktu tersedia untuk penyuluhan yang akan dilakukan pada kelompok tani yang akan diberikan penyuluhan oleh penyuluh swasta. Kesepakatan waktu ini dibuat antara penyuluh swasta dengan pengurus kelompok tani beserta anggotanya barulah mereka mengatur untuk tahap acara lanjutnya.

### **B. Identifikasi Masalah**

Kegiatan awal waktu kunjungan yang telah dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober dan tepat secara keseluruhannya barulah agen penyuluh swasta ini mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam menemukan permasalahan di kelompok tani yang dikunjungi ini terkait dengan usaha tani jagung adalah (1) mutu dan kualitas produk, (2) penyakit dan hama yang menyerang tanaman jagung, (3) produksi yang didapatkan petani tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah permasalahan yang ada didapat maka penyuluh swasta ini akan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara berkomunikasi langsung dengan petani dan ditambahkan dengan pemberian materi penyuluhan yang terkait dengan permasalahan yang timbul dalam usahatani jagung.

### **C. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dilakukannya kegiatan program ini agar kegiatan pemberian materi penyuluhan yang akan diberikan berikutnya dapat berjalan sesuai dengan

apa yang diharapkan oleh keseluruhan pihak yang ikut dalam kegiatan penyuluhan yang dibawa oleh agen penyuluh swasta ini. Proses perumusan kegiatan ini harus matang serta disesuaikan dengan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini mencakup ketua kelompok tani, PPL setempat dan mintak izin pula kepada Kepala Cabang Dinas (KCD) Pertanian Kecamatan.

Tabel 9. Tahapan Perencanaan Penyuluhan Swasta pada Kelompok Tani BD II Silayang

<b>Nama Kelompok</b>	<b>Waktu Kunjungan</b>	<b>Identifikasi Masalah</b>	<b>Tujuan Kegiatan</b>
Kelompok Tani BD II Silayang	Minggu pertama pada Bulan Oktober 2010	Minggu pertama pada bulan Oktober 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur acara kegiatan berikutnya.</li> <li>• Kegiatan terlaksana dengan baik</li> </ul>

#### **4.5.1.2 Tahap Pelaksanaan**

Adapun tahap pelaksanaan penyuluhan swasta dibagi menjadi tujuh bagian antara lain :

##### **a) Penyuluh**

Penyuluh swasta yang memberikan penyuluhan adalah agen yang berasal dari PT. Tanindo Inter di daerah Padang. Agen penyuluh swasta ini bekerja menurut wilayah binaannya masing-masing yang telah ditentukan pembagiannya oleh perusahaan dan agen penyuluh ini bekerja dengan cakupan wilayah kerja kabupaten. Dalam hal ini perusahaan menetapkan wilayah kerja per kabupaten dengan satu orang agen penyuluh swasta yang mengkoordinir keseluruhannya.

##### **b) Sasaran**

Analisis kelompok sasaran merupakan metode penting untuk menentukan masalah yang menjadi sasaran program penyuluhan. Juga akan dibicarakan mengenai penilaian kebutuhan yang erat kaitannya dengan kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok sasaran dan kebutuhan untuk perubahan seperti ditentukan oleh penyuluh (Ban Hawkins, 1999).



Sasaran dalam kegiatan penyuluhan ini adalah pada Kelompok Tani BD II Silayang yang didalamnya terdapat anggota-anggota kelompok taninya berusaha tani jagung. Lain dari itu sasaran penyuluhan swasta ini juga meliputi para pedagang kios dan pihak-pihak pemerintah. Pedagang kios juga menjadi sasaran penyuluhan swasta ini dikarenakan pedagang kios ini turut serta dalam pemasaran produk yang dibawa oleh penyuluh swasta dan ini bertujuan untuk menjaga-jaga seandainya ada petani yang membeli produk jagung hibrida ini mengalami kegagalan-kegagalan pada usaha tani jagungnya. Keterlibatan pihak pemerintah meliputi kegiatan kerjasama antara pihak pemerintah dengan penyuluh swasta, kerjasama seandainya ada program Dinas Pertanian Kabupaten tentang bantuan bibit jagung yang akan diberikan kepada petani supaya menggunakan bibit yang dibawa oleh penyuluh swasta.

### c) Metoda

Metoda yang digunakan oleh agen penyuluh swasta ini meliputi 3 metoda yaitu: (i) metoda ceramah, (ii) metoda diskusi, (iii) metoda demplot. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini :

Tabel 10. Jenis Metoda yang Digunakan oleh Penyuluh Swasta

No	Metoda	Materi	Waktu	Peserta
i	Ceramah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keunggulan produk yang dibawa</li> <li>Hama penyakit tanaman jagung</li> <li>Analisa ekonomi tentang tanaman jagung (produk)</li> </ul>	Pada Awal minggu pertama bulan Oktober	Anggota Kelompok Tani BD II Silayang
ii	Diskusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjawab dan memecahkan persoalan petani dalam usahatani jagung</li> </ul>	Pada Awal minggu pertama bulan Oktober	Anggota Kelompok Tani BD II Silayang
iii	Demplot	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memdemonstrasikan langsung pada lahan jagung yang sering dilewati petani</li> </ul>	Oktober dan November	Anggota Kelompok Tani BD II Silayang

Keterangan :

#### i. Ceramah

Dalam metoda ceramah yang dilakukan oleh agen penyuluh swasta ini bertujuan untuk menjelaskan keunggulan produk yang dibawa oleh perusahaan, ini dikarenakan produk yang dibawakannya berbagai jenis tipe.

Dalam pengenalan produk yang dibawakan ini disesuaikan pemakaiannya dengan jenis tipe-tipe produk dan itu tergantung dengan keadaan iklim lingkungan, tekstur tanah yang ada pada daerah tersebut serta berapa diatas permukaan laut tinggi tempat daerah yang diberikannya penyuluhan.

Selain dalam pemberian ceramah tentang keunggulan produk, penyuluh swasta juga memberikan penjelasan tentang hama dan penyakit yang mengganggu tanaman jagung, antara lain :

a) Penyakit Mati Gadis

Pada tanaman jagung yang disebabkan oleh bakteri, penyakit ini sering terjadi pada musim hujan karena pada saat itu kelembapan udara sangat tinggi.

b) Penyakit Bolai

Penyakit bolai ini disebabkan oleh jamur, biasanya terjadi pada umur tanaman jagung sebelum satu bulan tanaman berkembang.

Penjelasan lain yang diberikan oleh penyuluh swasta dengan metode ceramah adalah tentang analisa ekonomi yang meliputi tentang keuntungan yang didapatkan oleh petani per musim tanam dibandingkan dengan jenis usahatani lainnya seperti tanaman padi sawah, ketela pohon, ketela rambat, kacang-kacangan dan lain-lain.

## ii. Diskusi

Diskusi kelompok merupakan metode penyuluhan yang sangat penting, karena memberikan kesempatan untuk mempengaruhi perilaku pesertanya. Peranan agen penyuluhan berbeda, tidak seperti pada pidato atau ceramah yang menempatkan agen penyuluhan sebagai sumber informasi sehingga statusnya lebih tinggi dari pada hadirin. Pada kelompok diskusi, agen penyuluhan merupakan bagian dari anggota kelompok yang turut memecahkan masalah (Ban Hawkins, 1999).

Pada saat diskusi, penyuluh swasta memfasilitasi petani untuk menyampaikan permasalahan terkait dengan usahatani jagung dan penyuluh swasta juga berperan sebagai pemberi solusi atas pemecahan masalah yang dihadapi petani.



### iii. Demplot

Demonstrasi dapat mendorong petani mencoba sendiri inovasi baru. Penyebab masalah dapat ditunjukkan disertai kemungkinan pemecahannya tanpa rincian teknis yang rumit. Keuntungan demonstrasi adalah kesanggupan petani untuk melihat suatu metode baru yang dituangkan dalam demonstrasi cara. Tidak diperlukan adanya saling mempercayai yang tinggi antara petani dan penyuluh, karena petani dapat melihat sendiri segala sesuatunya dengan jelas. Agen penyuluh pun tidak perlu terlalu melibatkan diri pada penguraian pesan yang kemungkinan bisa keliru diartikan (Ban Hawkins, 1999).

Jadi di artikan dalam sistem demplot ini agen penyuluh swasta memdemonstrasi carakan langsung usahatani jagung dengan keseluruhan anggota yang terlibat dalam usahatani jagung yang ada pada kelompok tani BD II Silayang. Demplot ini dilakukan pada sebuah lahan yang disediakan oleh kelompok tani, dan lahan tersebut merupakan lahan yang sering dilewati oleh petani sehingga petani bisa secara langsung melihat kondisi perkembangan tanaman jagung dari hari ke hari yang didemonstrasi carakan oleh penyuluh swasta.

Demonstrasi plot merupakan salah satu metode penyuluhan yang dilaksanakan untuk menunjukkan suatu cara atau membuktikan suatu hasil usahatani menuju yang akan lebih baik, acara seperti ini dapat juga dikatakan sebagai ajang percontohan. Dalam pelaksanaan demplot ini ada dua macam demonstrasi yaitu demonstrasi cara dan demonstrasi hasil. Kedua macam demonstrasi ini secara umum digunakan secara terpisah dengan materi yang agak berbeda. Demonstrasi cara biasanya menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu, secara bertahap. Pelaksanaannya hanya memerlukan waktu yang pendek dan tidak banyak memerlukan biaya sedangkan demonstrasi hasil dimaksudkan untuk menunjukkan dengan percontohan langsung, manfaat dari suatu teknologi yang dianjurkan disuatu lokasi.

Demplot (demonstrasi plot) adalah salah satu bentuk penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh swasta untuk memberikan informasi tentang usaha tani jagung. Materi yang diberikan oleh agen penyuluh swasta melalui sistem demplot antara lain : keunggulan produk, analisa ekonomi, teknis budidaya

tanaman jagung, pengenalan hama dan penyakit serta penanganan hama dan penyakit pada tanaman jagung.

Pelaksanaan demplot saat penyuluhan berlangsung sebanyak satu kali pada saat setiap adanya produk baru pada setiap musim tanamnya. Alat-alat yang pada saat demplot antara lain merek-merek produk, brosur dan leaflet tentang usahatani jagung serta merek-merek varietas jagung. Hal ini untuk memberikan informasi tentang benih jagung yang bisa digunakan untuk mencapai hasil produksi yang meningkat.

Demonstrasi plot yang dilakukan merupakan salah satu media promosi untuk petani yang dilakukan pada daerah lahan yang strategis (daerah yang sering dilewati petani). Daerah ini dipilih agar petani dapat melihat langsung dari hari ke hari tahap-tahap perkembangan tanaman jagung. Hal ini dengan sendirinya dapat menarik keingintahuan petani untuk mencobakannya di lahan masing-masing.

#### **d) Media**

Media yang digunakan oleh penyuluh swasta dapat berupa media visual dan media cetak. Media visual berupa LCD, dan laptop yang digunakan untuk mempertontonkan film teknik budidaya jagung yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman petani.

Media cetak yang digunakan berupa pemberian brosur dan leaflet kepada petani yang berisikan tentang jenis serta tipe-tipe produk, keunggulan dan kelemahan produk, takaran jenis pupuk serta takaran dosis pemberian pestisida dan lain-lain.

#### **e) Waktu**

Penyuluh swasta melakukan penyuluhan pada waktu setiap awal musim tanam yaitu pada bulan Oktober-November 2010 dengan durasi minimal dua jam dalam satu kali tatap muka. Penyuluhan yang dilakukan oleh agen penyuluh swasta ini tidak menentu kapan waktu pemberian penyuluhannya, dikarenakan penyuluhan yang diberikan bukan hanya satu kelompok tani saja tetapi pemberian penyuluhannya sering berpindah-pindah antar kecamatan atau nagari yang terdapat dalam satu cakupan wilayah kerjanya masing-masing. Penyuluhan yang



dilakukan pada bulan pertama awal musim tanam berlangsung satu kali dua minggu minimal dua jam setiap pertemuan. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan pada tahap perkembangan tanaman jagung. Kemudian pada bulan kedua penyuluh swasta memberikan penyuluhan hanya ketika petani itu mengalami permasalahan pada usahatani jagung yang diusahakannya.

Dalam usahatani jagung, apabila petani mengalami kesulitan maka penyuluh swasta bisa kapan saja datang untuk mengontrol dan memberikan penyuluhan setelah adanya komunikasi via telfon yang dilakukan oleh petani dengan penyuluh swasta.

#### **f) Materi**

Dalam proses penyuluhan antara penyuluh dengan sasaran (para petani), penyuluh akan menyampaikan segala sesuatu yang menyangkut ilmu dan teknologi pertanian, ke semua itu disebut dengan materi penyuluhan. Dengan kata lain yang dimaksud dengan materi penyuluhan adalah segala isi yang terkandung dalam setiap kegiatan penyuluhan. Materi yang menarik perhatian para petani tentunya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha perbaikan produksi, perbaikan pendapatan dan perbaikan tingkat kehidupannya (Kartasapoetra 1988).

Materi penyuluhan yang akan diberikan harus sesuai dengan kebutuhan sasaran (petani) dengan demikian maka petani akan tertarik perhatiannya dan terangsang untuk memdemonstrasi carakannya. Materi-materi yang diberikan oleh penyuluh swasta pada saat memberikan penyuluhan antara lain :

##### **i. Keunggulan Produk, meliputi :**

###### **- Jenis tipe produk.**

Dalam melakukan penyuluhan di kelompok-kelompok tani, biasanya agen penyuluh swasta ini memperkenalkan berbagai jenis produknya terlebih dahulu, karena jenis produknya itu berbagai tipe. Dalam artian kata lain jenis produk tersebut adalah tanaman jagung yang berproduksi dan tumbuh baik sesuai dengan keadaan iklim dan tekstur kandungan tanah tertentu serta jarak tertentu dari atas permukaan laut (dpl).

###### **- Takaran pemakaian dosis pupuk per Ha tanaman jagung yang diusahakan.**

Biasanya dalam melakukan penyuluhan yang diberikan kepada kelompok tani beserta anggotanya, penyuluh swasta memberikan tata cara pemupukan per Ha tanaman jagung yang diusahakan.

- Takaran dosis pestisida per Ha tanaman jagung yang diusahakan.

Dalam hal takaran dosis pestisida yang akan diberikan pada areal tanaman jagung yang akan diusahakan, agen penyuluh swasta ini juga memberikan berapa jumlah takaran dosis pestisida yang akan diberikan setiap Ha tanaman jagung yang diusahakan pada masing-masing petani.

- ii. Analisa ekonomi, meliputi keuntungan yang didapat oleh petani dalam mengusahakan usahatani jagung per musim tanam dibandingkan dengan jenis usahatani lainnya.

- iii. Teknis budi daya, meliputi :

- Pengolahan tanah
- Persiapan tanam
- Penanaman dan pemupukan
- Pemeliharaan tanaman
- Pemanenan tanaman
- Pasca panen

- iv. Pengenalan hama dan penyakit, meliputi pengenalan jenis-jenis hama yang mengganggu pada tanaman jagung dan jenis-jenis penyakit yang menyerang tanaman jagung. Dalam hal pelaksanaan penyuluhan ini, agen penyuluh swasta terlebih dahulu memberikan informasi-informasi tentang apa saja hama dan penyakit yang akan menyerang tanaman usaha yang akan dijalani oleh petani.

- v. Penanganan hama dan penyakit, meliputi pemberian informasi penyuluhan terkait teknik serta cara penanganan hama dan penyakit yang menyerang tanaman jagung yang diusahakan. Selain memberikan tentang pengenalan hama dan penyakit tanaman jagung, agen penyuluh swasta ini juga memberikan trik dan tatacara penanggulangan hal-hal tersebut.



Materi-materi yang disampaikan tersebut bersumber dari pengalaman dilapangan serta dari teori-teori yang berasal dari buku dan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh agen penyuluh swasta yang didapat dari pelatihan yang diberikan oleh perusahaan. Materi-materi yang diberikan oleh penyuluh swasta kepada petani sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam menjalankan usahatani jagung.

#### g) Tempat

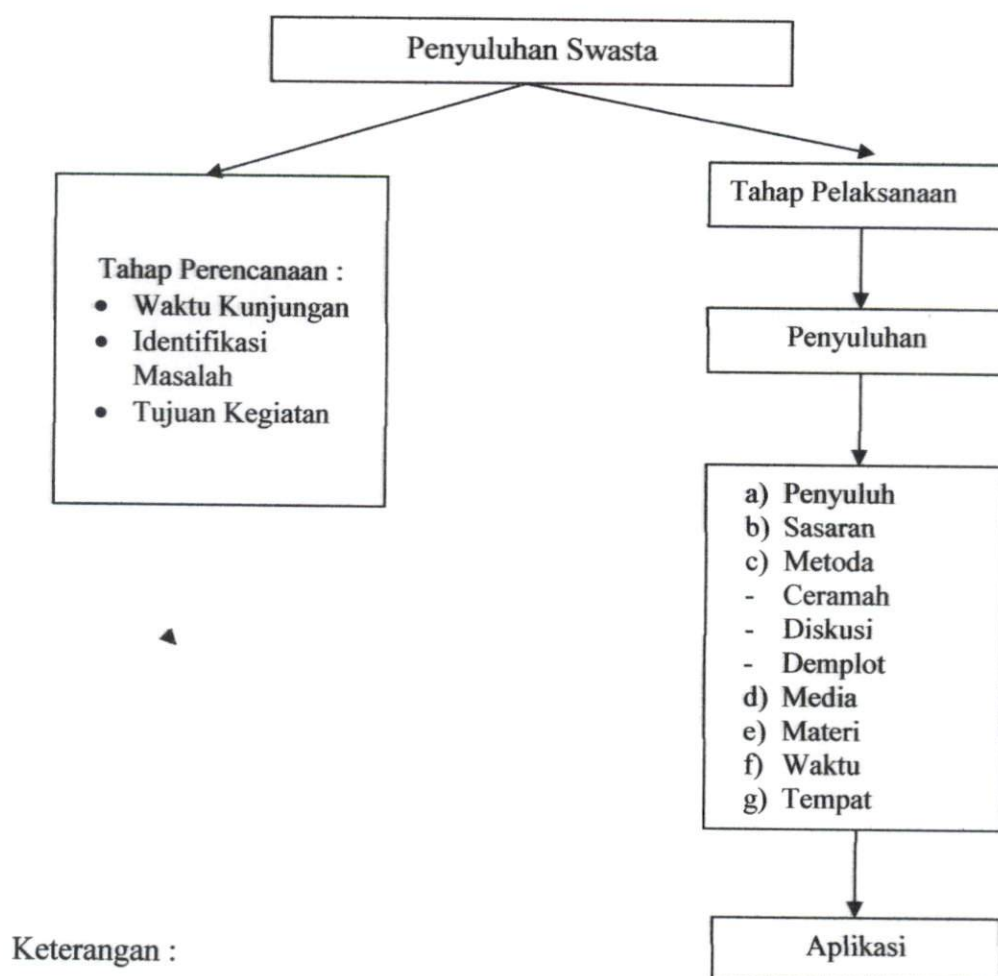
Pelaksanaan penyuluhan bertempat di dalam ruangan dan lapangan terbuka (lahan jagung) petani. Selain itu penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh swasta ini juga ada yang bertempat di rumah salah seorang pengurus kelompok tani, di mushalla jika pertemuannya dilakukan pada malam hari dan ada juga yang memberikan penyuluhan di heller (tempat giling padi).

Pada Tabel 11 berikut ini akan dijelaskan pelaksanaan penyuluhan swasta pada Kelompok Tani BD II Silayang

Tabel 11. Pelaksanaan Penyuluhan Swasta pada Kelompok Tani BD II Silayang

Peserta	Materi	Metoda	Media	Waktu	Tempat
Kelompok Tani BD II Silayang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keunggulan Produk</li> <li>• Analisa Ekonomi</li> <li>• Teknis Budidaya               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan tanah</li> <li>- Persiapan tanam</li> <li>- Penanaman dan pemupukan</li> <li>- Pemeliharaan tanaman</li> <li>- Pemanenan</li> <li>- Pasca Panen</li> </ul> </li> <li>• Pengenalan Hama dan Penyakit</li> <li>• Penanganan Hama dan Penyakit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ceramah</li> <li>•Diskusi</li> <li>•Demplot</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Media visual berupa LCD, dan laptop.</li> <li>• Media cetak yang digunakan berupa pemberian brosur dan leaflet</li> </ul>	Awal musim tanam sebanyak dua kali tatap muka pada bulan Oktober-November	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam ruangan</li> <li>• Lahan jagung milik petani</li> <li>• Rumah salah seorang pengurus kelompok tani.</li> </ul>

Pelaksanaan penyuluhan swasta terdiri atas 2 tahap, yaitu ; (1) tahap perencanaan dan (2) tahap pelaksanaan. Berikut ini akan dijelaskan bagan pelaksanaan penyuluhan swasta di Kelompok Tani BD II Silayang.



Gambar 1. Bagan Pelaksanaan Penyuluhan Swasta

#### 4.5.2 Penyuluhan Pemerintah.

##### 4.5.2.1 Tahap Perencanaan

Pada pelaksanaan penyuluhan pemerintah terdapat tahapan perencanaan yang meliputi ; (a) waktu kunjungan, (b) identifikasi masalah, dan (c) tujuan kegiatan.

##### A. Waktu Kunjungan

Pada tahap perencanaan penyuluhan pemerintah, penyuluh pemerintah melakukan kunjungan dua kali pada Bulan September (minggu pertama dan ketiga) di kelompok tani pada waktu siang hari. Waktu kunjungan ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penyuluh dengan ketua kelompok tani beserta anggotanya. Fungsi kunjungan ini bertujuan agar program bantuan benih jagung



yang berasal dari pemerintah dapat terlaksana. Kunjungan pertama, penyuluh melakukan pendataan anggota kelompok tani yang akan diberikan bantuan benih jagung yang merupakan suatu program bantuan benih dari Dinas Pertanian. Kunjungan kedua, penyuluh pemerintah beserta kelompok tani melakukan demonstrasi cara tentang teknis budidaya jagung hibrida.

### **B. Identifikasi Masalah**

Dalam tahapan pelaksanaan penyuluhan oleh pemerintah tidak ada melakukan identifikasi masalah. Hal ini dikarenakan paket penyuluhan dan bantuan benih jagung merupakan program bantuan yang berasal dari pemerintah. Dalam hal identifikasi masalah penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sama halnya dengan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluhan swasta seperti melihat mutu dan kualitas produk, penyakit dan hama yang menyerang tanaman jagung dan hasil produksi yang didapatkan petani.

### **C. Tujuan Kegiatan**

Usahatani jagung merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan oleh petani di Nagari Lubuk Basung sebab dapat memberikan keuntungan secara ekonomis. Karena potensi usaha tani jagung telah berkembang pada Nagari Lubuk Basung ini, salah satu program dari Dinas Pertanian Kab. Agam adalah salah satunya Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU).

Tabel 12. Tahapan Perencanaan Penyuluhan Pemerintah pada Kelompok Tani Nusa Indah

<b>Nama Kelompok</b>	<b>Waktu Kunjungan</b>	<b>Identifikasi Masalah</b>	<b>Tujuan Kegiatan</b>
Kelompok Tani Nusa Indah	Minggu pertama dan minggu ketiga	Tidak ada, karena ini hanya program bantuan langsung benih unggul dari pemerintah (BLBU)	Dapat memberikan keuntungan secara ekonomis

#### **4.5.2.2 Tahap Pelaksanaan Penyuluhan**

Dalam tahapan pemberian Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) ini, Penyuluh Pemerintah (Penyuluh PNS) mensosialisasikan terlebih dahulu kepada anggota kelompok tani Nusa Indah. Tahapan pelaksanaan penyuluhan dapat dirincikan sebagai berikut :

### a) Penyuluh

Penyuluh yang memberikan penyuluhan berasal dari BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Nagari Lubuk Basung. Penyuluh Pemerintah ini bekerja menurut wilayah binaannya masing-masing yang telah ditentukan pembagian wilayahnya oleh BPP dengan cakupan wilayah kerja Nagari Lubuk Basung.

### b) Sasaran

Sasaran dalam kegiatan penyuluhan ini adalah Kelompok Tani Nusa Indah yang didalamnya terdapat anggota-anggota kelompok taninya yang berusaha tani jagung. Dalam sasaran penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh pemerintah ini tidak tertutup kemungkinan untuk keseluruhan anggota kelompok.

### c) Metoda

Jenis metoda yang digunakan oleh penyuluhan pemerintah dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini :

Tabel 13. Jenis Metoda yang Digunakan oleh Penyuluh Pemerintah

No	Metoda	Materi	Waktu	Peserta
i	Ceramah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan tanah</li> <li>• Persiapan tanam</li> <li>• Penanaman dan pemupukan</li> <li>• Pemeliharaan tanaman</li> <li>• Pemanenan</li> <li>• Pasca panen</li> </ul>	Pada Awal minggu pertama dan minggu ketiga bulan September	Anggota Kelompok Tani Nusa Indah
ii	Diskusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjawab dan memecahkan persoalan petani dalam usahatani jagung</li> </ul>	Pada Awal minggu pertama dan minggu ketiga bulan September	Anggota Kelompok Tani Nusa Indah
iii	Demonstrasi cara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memdemonstrasikan cara-cara budidaya tanaman</li> </ul>	Setelah penjelasan teknis budidaya	Anggota Kelompok Tani Nusa Indah

Dari Tabel 13, metoda penyuluhan yang digunakan oleh penyuluh pemerintah ada tiga cara yaitu :

#### i. Ceramah

Metode ceramah yang dilakukan oleh penyuluh pemerintah bertujuan untuk menjelaskan teknis budidaya jagung hibrida yang meliputi pengolahan tanah, persiapan tanam, penanaman dan pemupukan, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen. Kegiatan ceramah dilakukan oleh penyuluh



pemerintah di Kelompok Tani Nusa Indah bertempat di sekretariat kelompok tani. Ceramah dilakukan pada bulan September dengan frekuensi pertemuan sebanyak dua kali (1 kali dua minggu). Topik yang diceritakan oleh penyuluh pemerintah sama dengan yang diberikan oleh penyuluh swasta yang meliputi:

- Pengolahan tanah
- Persiapan tanam
- Penanaman dan pemupukan
- Pemeliharaan tanaman
- Pemanenan
- Pasca panen

## **ii. Diskusi**

Selain pemberian ceramah, penyuluh pemerintah juga memfasilitasi anggota Kelompok Tani dengan sesi diskusi yang diadakan oleh penyuluh. Pada sesi ini penyuluh pemerintah berdiskusi dengan anggota kelompok tani mengenai materi penyuluhan budidaya tanaman jagung hibrida yang akan diberikan. Sesi diskusi ini berlangsung pada hari yang sama dengan ceramah pada Sekretariat Kelompok Tani Nusa Indah. Pada saat diskusi, penyuluh pemerintah memfasilitasi anggota Kelompok Tani Nusa Indah untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan budidaya jagung hibrida. Penyuluh pemerintah juga berperan sebagai pihak yang memberikan solusi atas pemecahan masalah yang dihadapi oleh anggota Kelompok Tani Nusa Indah..

## **iii. Demonstrasi cara**

Pada tahapan ini, penyuluh pemerintah bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Nusa Indah mendemonstrasikan langsung pengolahan tanah, persiapan tanam, penanaman dan pemupukan, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen. Kegiatan demonstrasi cara dilakukan pada lahan bendahara Kelompok Tani Nusa Indah setelah sesi ceramah dan diskusi dilakukan. Kegiatan ini dilakukan setelah sesi ceramah dan diskusi, dilakukan pada lahan bendahara kelompok tani yang kemudian dijadikan lahan percobaan demonstrasi cara. Hal yang didemonstrasikan adalah tentang pengolahan tanah, persiapan tanam, penanaman dan pemupukan, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen.

Kegiatan demonstrasi cara ini juga dilaksanakan pada Bulan September sebanyak dua kali pertemuan.

#### **d) Media**

Media yang digunakan oleh penyuluh pemerintah berupa kertas plano dan spidol yang digunakan untuk membantu penyuluh dalam menyampaikan materi budidaya jagung hibrida yang meliputi pengolahan tanah, persiapan tanam, penanaman dan pemupukan, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen.

#### **e) Materi**

Materi penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh pemerintah berupa teknis budidaya jagung hibrida yang meliputi :

- Pengolahan tanah
- Persiapan tanam
- Penanaman dan pemupukan
- Pemeliharaan tanaman
- Pemanenan tanaman
- Pasca panen

#### **f) Waktu**

Waktu penyuluh pemerintah dalam memberikan penyuluhan di anggota Kelompok Tani Nusa Indah bermulai dari awal minggu pertama pada bulan September dan pertemuan keduanya pada minggu ketiga pada Bulan September. Dalam kegiatan pemberian bantuan benih jagung ini penyuluh pemerintah memberikan penyuluhan atau mengadakan pertemuan dua kali dalam sebulan. Pertemuan rutin dua kali ini diadakan pada jam yang telah disepakati antara penyuluh pemerintah dengan ketua kelompok tani beserta anggotanya.

#### **g) Tempat**

Dalam sosialisasi pemberian bantuan bibit jagung pada Kelompok Tani Nusa Indah ini bertempat di sekretariat kelompok untuk sesi ceramah dan diskusi dan untuk demonstrasi cara bertempat di lahan bendahara kelompok. Dalam sesi ceramah dan diskusi dilakungan langsung berbarengan dalam satu sesi dan



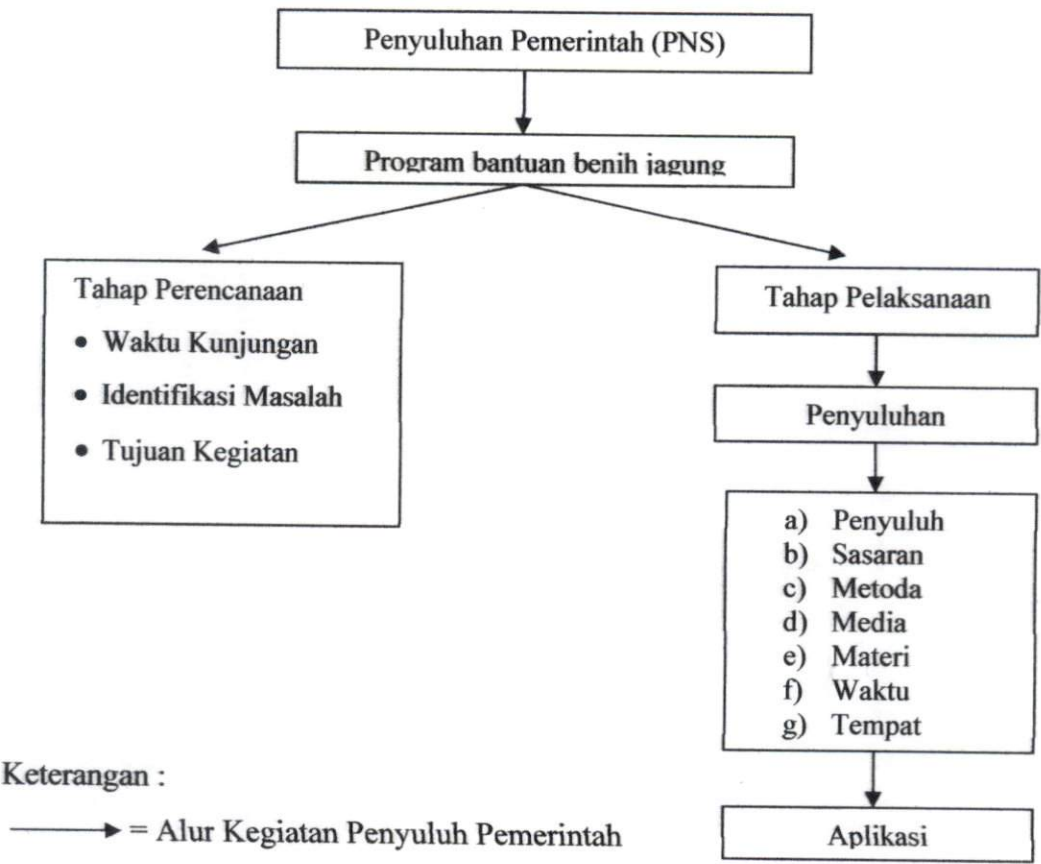
sedangkan dalam memdemonstrasi carakannya dilakukan dengan acara terpisah yakni di lahan salah satu bendahara kelompok tani.

Pada Tabel 14 berikut ini akan dijelaskan tentang pelaksanaan penyuluhan pemerintah pada kelompok tani Nusa Indah.

Tabel 14. Pelaksanaan Penyuluhan Pemerintah pada Kelompok Tani Nusa Indah

Peserta	Materi	Metoda	Media	Waktu	Tempat
Kelompok Tani Nusa Indah	Teknis budidaya jagung hibrida, meliputi : <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengolahan tanah</li><li>- Persiapan tanam</li><li>- Penanaman dan pemupukan</li><li>- Pemeliharaan tanaman</li><li>- Pemanenan</li><li>- Pasca Panen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ceramah</li><li>• Diskusi</li><li>• Demonstrasi Cara</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kertas plano</li><li>• Spidol</li><li>• dll</li></ul>	Dua kali pada bulan September	Pada sekretariat kelompok tani Nusa Indah

Bagan pelaksanaan penyuluhan pemerintah dapat dijelaskan pada Gambar 2 di bawah ini :



Gambar 2. Bagan Pelaksanaan Penyuluhan Pemerintah

### **4.5.3 Penyuluhan Swadaya**

#### **4.5.3.1 Tahap Perencanaan**

Pada pelaksanaan penyuluhan swadaya terdapat tahapan perencanaan yang meliputi ; (a) waktu kunjungan, (b) identifikasi masalah, dan (c) tujuan kegiatan.

#### **A. Waktu Kunjungan**

Pada tahap perencanaan penyuluh swadaya tidak ada melakukan kunjungan rutin, baik siang hari maupun malam hari. Penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh swadaya ini tidak menentu dikarenakan kegiatannya tidak formal. Waktu kunjungan penyuluhan swadaya tidak terstruktur seperti halnya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah dan penyuluhan yang dilakukan oleh swasta.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Kegiatan perencanaan penyuluhan swasta dalam mengidentifikasi masalah tidak ada dilakukan oleh penyuluh swadaya itu sendiri. Penyuluhan dilakukan ketika anggota kelompok tani mengalami kesulitan atau hambatan dalam berusaha jagung hibrida. Kesulitan-kesulitan tersebut langsung menjadi topik penyuluhan oleh penyuluh swadaya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa bukan penyuluh swadaya yang melakukan identifikasi masalah, tetapi anggota kelompok yang menemui permasalahan dalam usaha tani kemudian melaporkannya kepada penyuluh swadaya.

#### **C. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan penyuluhan swadaya yang dilakukan pada kelompok tani bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan petani seputar budidaya jagung hibrida. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan solusi atas pemecahan masalah petani dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil usaha tani jagung hibrida.

Tabel 15 berikut ini akan dijelaskan tahapan perencanaan penyuluhan swadaya pada Kelompok Tani Parit Panjang Permai.



Tabel 15. Tahapan Perencanaan Penyuluhan Swadaya pada Kelompok Tani Parit Panjang Permai

<b>Nama Kelompok</b>	<b>Waktu Kunjungan</b>	<b>Identifikasi Masalah</b>	<b>Tujuan Kegiatan</b>
Kelompok Tani Parit Panjang Permai	Tidak menentu dan tidak terstruktur	Tidak ada, masalah terjadi ketika ada petani lain yang kesulitan dalam usahatani jagung yang diusahakannya	Menjawab permasalahan petani dalam usaha tani jagung hibrida

#### **4.5.3.2 Tahap Pelaksanaan Penyuluhan**

Kegiatan penyuluhan swadaya dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **a) Penyuluh**

Penyuluh yang memberikan penyuluhan adalah petani yang berhasil dalam berusahatani jagung hibrida. Petani ini ditunjuk dikarenakan petani ini merupakan petani pakar dalam berusaha tani jagung hibrida. Penyuluh swadaya ini tidak bekerja menurut wilayah binaannya sebagaimana penyuluhan pemerintah dan swasta, melainkan hanya memberikan penyuluhan pada kelompok tani dan petani yang ada di sekitar daerah domisilinya.

##### **b) Sasaran**

Sasaran dalam kegiatan penyuluhan ini adalah Kelompok Tani Parit Panjang Permai yang didalamnya terdapat anggota-anggota kelompok taninya yang berusaha tani jagung. Selain itu sasaran dalam penyuluhan ini juga merupakan petani-petani lain yang berusaha tani jagung tetapi tidak tergabung menjadi anggota kelompok. Dan dalam sasaran penyuluhan oleh penyuluh swadaya tidak tertutup kemungkinan untuk para petani jagung hibrida bertanya kepada penyuluh swadaya.

##### **c) Metoda**

###### **i. Diskusi**

Kegiatan diskusi dilakukan oleh penyuluh swadaya dengan anggota Kelompok Tani Parit Panjang Permai secara perorangan. Artinya kegiatan penyuluhan ini dilakukan secara tidak berkelompok, melainkan perorangan anggota kelompok tani dengan penyuluh swadaya. Materi yang didiskusikan

adalah teknik budidaya jagung hibrida, meliputi pengolahan tanah, persiapan tanam, penanaman dan pemupukan, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan pasca panen. Dalam penyuluhan swadaya ini tidak ada menggunakan media karena mereka hanya berdiskusi mengenai teknis budidaya tanaman jagung. Materi yang diberikan oleh penyuluh swadaya merupakan materi yang sesuai dengan kebutuhan petani yang diberikan penyuluhan.

Penyuluhan swadaya budidaya jagung hibrida ini dilakukan dari petani ke petani. Petani yang menjadi penyuluh adalah petani yang sering kali berhasil dalam usahatani jagung. Selain itu petani ini juga telah dipercaya oleh anggota Kelompok Tani Parit Panjang Permai karena keberhasilannya dalam berusaha tani jagung. Pertemuan tatap muka dilakukan dengan waktu yang tidak menentu, karena kegiatan penyuluhan ini bukan merupakan kegiatan rutin dan kegiatan formal anggota Kelompok Tani Parit Panjang Permai. Tempat berlangsung penyuluhan swadaya ini adalah di warung-warung, kedai-kedai atau di lahan usahatani anggota Kelompok Tani Parit Panjang Permai.

## **ii. Tanya Jawab**

Kegiatan tanya jawab pada penyuluhan swadaya ini adalah upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh anggota Kelompok Tani Parit Panjang Permai. Dalam sesi ini, petani yang bertanya adalah petani yang mengalami kesulitan dalam usaha tani jagung yang diusahakannya dan penyuluhan swadaya itulah yang akan menjawab atau mencari solusi atas kesulitan yang dialami oleh petani yang bertanya.

## **iii. Demplot**

Dalam kegiatan demplot yang dilakukan oleh penyuluh swadaya tidak dilakukan secara langsung, melainkan lahan usaha tani jagung petani lainnya yang telah mempraktekkan budidaya jagung itu secara tak langsung yang dijadikan contoh. Disini petani anggota Kelompok Tani Parit Panjang Permai yang bertanya dapat melihat langsung perkembangan teknis budi daya usaha tani jagung yang dikembangkan oleh penyuluh swadaya tersebut.

Lain halnya sistem demplot yang dilakukan oleh penyuluhan swasta, disini petani dilibatkan langsung mulai dari teknis budi daya jagung hibrida yang



meliputi pengolahan tanah, persiapan tanam, penanaman dan pemupukan, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan pasca panen.

#### **d) Media**

Penyuluhan swadaya tidak menggunakan media seperti halnya media yang digunakan oleh penyuluh yang dilakukan oleh swasta dan penyuluh yang dilakukan oleh pemerintah. Pada pelaksanaan penyuluhan swadaya tidak ada menggunakan media langsung, tetapi media yang digunakan adalah lahan usaha tani jagung penyuluh swadaya itu sendiri. Dari lahan penyuluhan swadaya itu, akhirnya menjadi media dan keterangan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman petani yang bertanya kepadanya.

#### **e) Materi**

Dalam hal materi penyuluhan yang diberikan kepada petani yang bertanya disesuaikan dengan kebutuhan sasaran petani tersebut. Materi yang diberikan oleh penyuluh swadaya tidak sama halnya dengan materi yang diberikan oleh penyuluh pemerintah dan penyuluh swasta.

Materi yang diberikan tidak terstruktur dan terencana seperti materi yang diberikan oleh penyuluhan swasta dan penyuluh pemerintah. Materi yang diberikan lebih terkait dan disesuaikan dengan kebutuhan petani yang bertanya. Materi tersebut menjadi salah satu solusi permasalahan petani yang mengalami kesulitan dalam berusaha tani jagung hibrida.

#### **f) Waktu**

Pelaksanaan penyuluhan swadaya ini bukanlah merupakan kegiatan formal, sehingga waktu pelaksanaannya juga tidak menentu. Kegiatan penyuluhan ini berlangsung apabila salah satu anggota Kelompok Tani Parit Panjang Permai mengalami kesulitan dalam usahatani jagungnya. Hal ini berarti kegiatan diskusi, tanya jawab dan demplot berlangsung pada waktu yang terpisah dan tidak menentu saja kapan waktunya ada kegiatan penyuluhan ini.

#### **g) Tempat**

Tempat pelaksanaan penyuluhan swadaya ini berbeda dengan pelaksanaan penyuluhan oleh penyuluh swasta dan penyuluh pemerintah. Ini

dikarenakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh swasta dan penyuluh oleh pemerintah lebih terstruktur. Penyuluhan swadaya lebih banyak berlangsung di warung-warung atau di kedai-kedai. Penyuluhan juga berlangsung di lahan usaha tani masing-masing anggota kelompok tani yang bertanya kepada penyuluh swadaya.

Agar materi yang diberikan oleh penyuluh swadaya dapat dipercaya dan diyakini oleh anggota kelompok, tidak jarang penyuluh swadaya mengajak anggota kelompok tersebut untuk melihat langsung tanaman jagung hibrida yang diusahakannya dan sebaliknya.

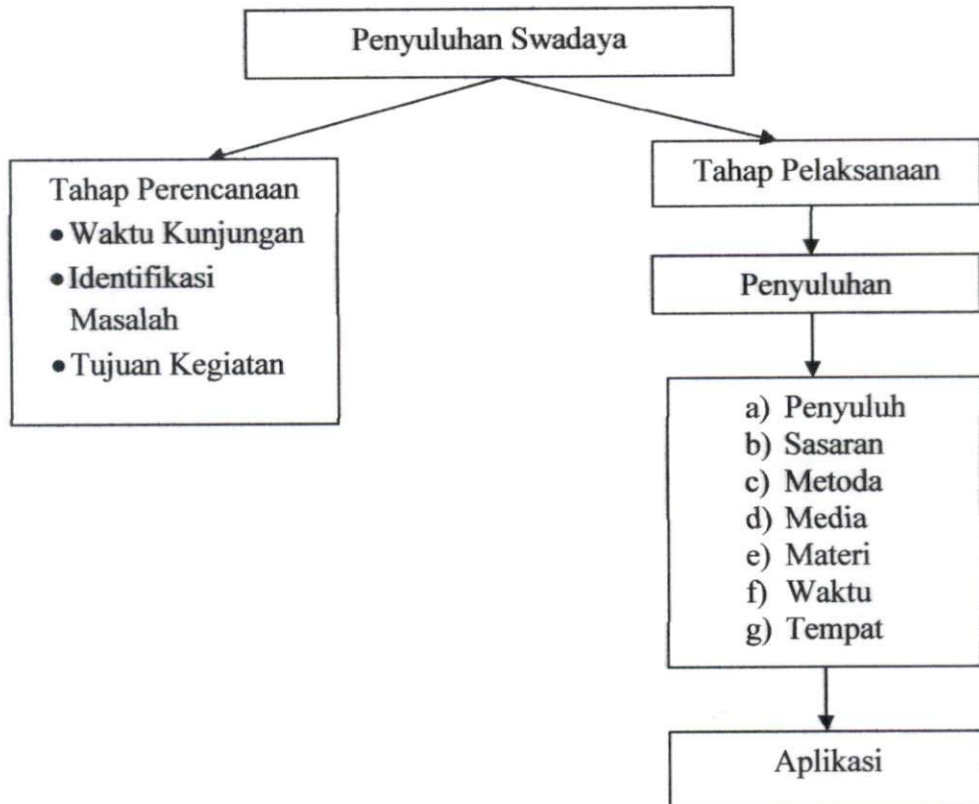
Pada Tabel 16 Berikut ini akan dijelaskan pelaksanaan penyuluhan swadaya pada kelompok tani Parit Panjang Permai.

Tabel 16. Pelaksanaan Penyuluhan Swadaya pada Kelompok Tani Parit Panjang Permai

<b>Peserta</b>	<b>Materi</b>	<b>Metoda</b>	<b>Media</b>	<b>Waktu</b>	<b>Tempat</b>
Kelompok Tani Parit Panjang Permai	Teknis budidaya jagung hibrida, meliputi : - Pengolahan tanah - Persiapan tanam - Penanaman dan pemupukan - Pemeliharaan tanaman - Pemanenan - Pasca Panen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi</li> <li>• Tanya Jawab</li> <li>• Demplot</li> </ul>	Tidak menggunakan media apapun	Tidak tertentu dikarenakan kegiatan nya tidak formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warung atau dikedai-kedai</li> <li>• Di lahan usahatani masing-masing</li> </ul>

Tahapan pelaksanaan penyuluhan swadaya terdiri atas tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan. Bagan pelaksanaan penyuluhan swadaya lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar 3 :





Keterangan :

————→ = Alur Kegiatan Penyuluh Swadaya

Gambar 3. Bagan Pelaksanaan Penyuluhan Swadaya

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan antara penyuluhan swasta, penyuluhan pemerintah dan penyuluhan swadaya. Perbedaan penyuluhan tersebut dilihat dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, penyuluhan swasta melakukan kegiatan perencanaan bersama-sama dengan kelompok tani, sedangkan pada penyuluhan pemerintah, penyuluh tidak menyusun perencanaan kegiatan bersama kelompok tani, melainkan hanya menjalankan program bantuan benih yang berasal dari pemerintah. Sementara pada penyuluhan swadaya, tidak dilaksanakan kegiatan perencanaan.

Pelaksanaan penyuluhan dari penyuluhan swasta, penyuluhan pemerintah dan penyuluhan swadaya juga terlihat perbedaan. Penyuluhan swasta selain menggunakan metode ceramah dan diskusi juga menggunakan metode demplot. Sedangkan pada penyuluhan pemerintah, kegiatan penyuluhan hanya terfokus pada metode ceramah, diskusi, dan praktek. Berbeda dengan penyuluhan swasta, penyuluhan pemerintah hanya mempraktekkan teknis budidaya jagung hibrida

bersama-sama petani. Pada penyuluhan swadaya kegiatan penyuluhan terfokus pada kegiatan ceramah dan diskusi dengan jadwal yang tidak terstruktur. Artinya, penyuluh baru akan memberikan penyuluhan ketika petani sedang mengalami kesulitan dalam teknis budidaya jagung hibrida. Pada penyuluhan swadaya, petani dapat melihat langsung lahan usaha tani milik penyuluh swadaya, ketika sedang mengalami hambatan dalam teknis budidaya jagung hibrida.

#### 4.6. Pendapat Petani terhadap Penyuluhan

Pendapat petani terhadap penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh swasta, penyuluhan pemerintah dan penyuluhan swadaya, dinilai dari tiga kategori, yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Lebih lengkapnya pencapaian pendapat petani terhadap penyuluhan swasta dibandingkan dengan penyuluhan pemerintah dan penyuluhan swadaya dilihat dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik.

##### 4.6.1. Pengetahuan (Kognitif)

Aspek kognitif adalah aspek yang terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau pendapat petani tentang budi daya jagung hibrida. Aspek kognitif atau pengetahuan petani dilihat dari tahapan teknis budi daya jagung hibrida yang meliputi; pengolahan tanah, persiapan tanam, penanaman dan pemupukan, pemeliharaan tanaman, panen dan pasca panen. Aspek kognitif secara lebih lengkap dapat dijelaskan pada Tabel 17.

Tabel 17. Pendapat Petani mengenai Aspek Kognitif

No	Uraian	Penyuluhan Swasta (orang)			Penyuluhan Pemerintah (orang)			Penyuluhan Swadaya (orang)		
		S	R	T	S	R	T	S	R	T
1.	Pengolahan Tanah	14	-	-	9	9	-	5	4	-
2.	Persiapan Tanam	14	-	-	10	8	-	6	3	-
3.	Penanaman dan Pemupukan	14	-	-	8	10	-	5	4	-
4.	Pemeliharaan Tanaman	14	-	-	12	6	-	4	5	-
5.	Pemanenan	14	-	-	5	13	-	1	8	-
6.	Pasca panen	12	2	-	5	13	-	1	8	-

(Keterangan : S= Setuju, R= Ragu-ragu, T= Tidak setuju)



Tabel 17 dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah yang baik dan benar, yaitu dengan cara dibajak dan digaru. Pengolahan tanah untuk penanaman jagung dapat dilakukan dengan dua cara yaitu olah tanah sempurna (OTS) dan tanpa olah tanah (TOT) bila lahan gembur. Namun bila tanah berkadar liat tinggi sebaiknya dilakukan pengolahan tanah sempurna. Pada lahan yang ditanami jagung dua kali setahun, penanaman pada musim penghujan (rendeng) tanah diolah sempurna dan pada musim tanam berikutnya (musim gadu) penanaman dapat dilakukan dengan tanpa olah tanah untuk mempercepat waktu tanam.

Pada tahapan pengolahan tanah menunjukkan keseluruhan responden yang berjumlah 14 (100%) orang menyatakan setuju dengan tatacara pengolahan tanah yang disampaikan oleh penyuluh swasta. Sementara, pada penyuluhan pemerintah hanya 9 orang (50%) yang menyatakan setuju dengan materi mengenai pengolahan tanah yang disampaikan oleh pemerintah. Selanjutnya 5 orang responden (55,56%) yang mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh petani ke petani (swadaya) menyatakan setuju dengan cara pengolahan tanah yang disampaikan oleh petani lain.

### 2. Persiapan Tanam

Benih yang akan digunakan hendaknya bermutu tinggi dan kualitas yang baik, baik mutu genetik, fisik maupun fisiologinya. Benih yang demikian dapat diperoleh bila menggunakan benih bersertifikat. Pada tahapan persiapan tanam keseluruhan responden yang berjumlah 14 orang (100%) menyatakan setuju setelah mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh swasta. Berbeda dengan responden yang melakukan penyuluhan oleh penyuluh pemerintah, hanya 10 orang petani responden saja (55,56%) yang menyatakan setuju dengan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pemerintah. Berikutnya 6 orang responden (66,67%) yang menyatakan setuju dengan cara yang dilakukan oleh penyuluh swadaya.

### 3. Penanaman dan Pemupukan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanaman adalah jarak tanam antara jantan dan betina, serta perbandingan pemberian dosis pupuk yang akan

diberikan pada tanaman jagung hibrida. Pada tahapan penanaman dan pemupukan yang dianjurkan oleh penyuluh swasta kepada petani menyatakan 14 orang petani responden (100%) setuju dengan cara yang dilakukan oleh penyuluh swasta ditambah lagi dengan adanya sistem demplot. Lain hal dengan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pemerintah sebanyak 10 orang petani responden (55,56%) menyatakan ragu-ragu dengan cara penanaman dan pemupukan yang diberikan oleh penyuluhan pemerintah. Berikutnya pada penyuluhan swadaya sebanyak 5 orang petani responden (55,56%) menyatakan setuju dengan cara yang dilakukan oleh penyuluh swadaya

#### 4. Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan tanaman meliputi penjarangan dan penyulaman, penyiangan, pembumbunan, serta pengendalian hama dan penyakit. Pada tahapan tatacara pemeliharaan tanaman keseluruhan petani responden sebanyak 14 orang (100%) menyatakan setuju dengan cara yang dilakukan oleh penyuluh swasta. Sedangkan tatacara pemeliharaan tanaman yang dianjurkan oleh penyuluh pemerintah hanya 12 petani responden (66,67%) yang menyatakan setuju dengan penyuluh pemerintah. Berikutnya pada penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh swadaya, sebanyak 5 orang petani responden (55,56%) menyatakan ragu-ragu.

#### 5. Pemanenan

Pemanenan jagung dilakukan pada saat jagung telah berumur sekitar 100 hst (hari setelah tanam) tergantung dari jenis varietas yang digunakan. Pada tahapan tatacara pemanenan yang dianjurkan oleh penyuluh swasta pada saat sistem demplot yang dilakukan maka keseluruhan petani responden berjumlah 14 orang (100%) menyatakan setuju dengan penyuluh swasta. Sedangkan pada penyuluh pemerintah, sebanyak 13 orang petani responden (72,22%) berpendapat ragu-ragu. Sementara penyuluhan yang dilakukan dari petani ke petani (penyuluh swadaya) sebanyak 8 orang petani responden (88,89%) berpendapat ragu-ragu dengan cara pemanenan yang dilakukan oleh penyuluh swadaya.

#### 6. Pasca Panen

Tahapan pasca panen yang akan dilakukan adalah pengupasan, pengeringan dan pemipilan. Pada tahapan tatacara pasca panen yang dilakukan oleh penyuluh swasta pada saat sistem demplot sebanyak 12 orang petani



responden (85,71%) menyatakan setuju dengan cara yang dilakukan oleh penyuluh swasta. Pada penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pemerintah sebanyak 13 orang petani responden (72,22%) menyatakan ragu-ragu dengan cara yang dilakukan oleh penyuluh pemerintah. Sedangkan pada penyuluhan dari petani ke petani (penyuluh swadaya) sebanyak 8 orang petani responden (88,89%) menyatakan ragu-ragu dengan cara yang dilakukan oleh penyuluh swadaya.

#### 4.6.2. Sikap (Afektif)

Aspek afektif adalah aspek yang timbul dikarenakan ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau tidak disukai oleh petani jagung hibrida. Aspek ini berkaitan dengan emosi, sikap atau nilai. Pencapaian pendapat petani terhadap penyuluhan dilihat dari segi afektif, dijelaskan pada Tabel 18 :

Tabel 18. Pendapat Petani mengenai Aspek Afektif

No	Uraian	Penyuluhan Swasta (orang)			Penyuluhan Pemerintah (orang)			Penyuluhan Swadaya (orang)		
		S	R	T	S	R	T	S	R	T
1.	Pengolahan tanah	14	-	-	2	15	1	-	2	7
2.	Persiapan tanam	14	-	-	2	14	2	-	2	7
3.	Penanaman dan pemupukan	14	-	-	2	14	2	-	2	7
4.	Pemeliharaan tanaman	14	-	-	2	11	5	-	6	3
5.	Pemanenan	12	2	-	2	13	3	-	3	6
6.	Pasca panen	7	7	-	-	13	5	-	4	5

(Keterangan : S= Setuju, R= Ragu-ragu, T= Tidak setuju)

Tabel 18 dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah yang baik dan benar, yaitu dengan cara dibajak dan digaru. Pengolahan tanah untuk penanaman jagung dapat dilakukan dengan dua cara yaitu olah tanah sempurna (OTS) dan tanpa olah tanah (TOT) bila lahan gembur. Namun bila tanah berkadar liat tinggi sebaiknya dilakukan pengolahan tanah sempurna. Pada lahan yang ditanami jagung dua kali setahun, penanaman pada musim penghujan (rendeng) tanah diolah sempurna dan pada musim tanam berikutnya (musim gadu) penanaman dapat dilakukan dengan tanpa olah tanah untuk mempercepat waktu tanam.

Pada tatacara pengolahan tanah menunjukkan keseluruhan responden yang berjumlah 14 orang (100%) menyatakan setuju dengan tatacara pengolahan tanah yang disampaikan oleh penyuluh swasta setelah mengikuti penyuluhan yang dilakukan dengan menggunakan sistem demplot. Sementara, pada penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pemerintah sebanyak 15 orang petani (83,33%) menyatakan ragu-ragu dengan informasi yang disampaikan oleh penyuluh pemerintah, dikarenakan penyuluhan yang dibawakan oleh penyuluh pemerintah sudah diketahui sebelumnya dan menurutnya tidak memberikan tingkat produksi yang signifikan jika mereka menerapkannya. Sedangkan pada penyuluhan swadaya, sebanyak 7 orang petani responden (77,78%) menyatakan tidak setuju dengan informasi yang disampaikan oleh penyuluh swadaya dikarenakan mereka tidak melihat langsung penerapan informasi yang disampaikan tersebut.

## 2. Persiapan Tanam

Benih yang akan digunakan sebaiknya bermutu tinggi, baik mutu genetik, fisik maupun fisiologinya. Berasal dari varietas unggul (daya tumbuh besar, tidak tercampur benih/varietas lain, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit). Sebelum benih ditanam, sebaiknya dicampur dulu dengan fungisida untuk menangkal serangan jamur. Sedangkan bila diduga akan ada serangan lalat bibit dan ulat agrotis, sebaiknya benih dimasukkan ke dalam lubang bersama-sama dengan insektisida butiran dan sistemik.

Pada tahapan persiapan tanam sebagaimana yang terlihat pada Tabel 18, menunjukkan keseluruhan responden yang berjumlah 14 orang (100%) menyatakan setuju dengan tatacara persiapan tanam yang disampaikan oleh penyuluh swasta, ini dikarenakan mereka melihat langsung tatacara persiapan tanam pada saat melakukan sistem demplot. Hal berbeda terjadi pada penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pemerintah sebanyak 14 orang petani (77,78%) menyatakan ragu-ragu dengan informasi yang disampaikan dikarenakan penyuluhan yang dibawakan oleh penyuluh pemerintah sudah diketahui sebelumnya dan menurutnya tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap penilaian mereka tentang tatacara persiapan tanam tersebut. Pada penyuluhan yang dilakukan oleh petani ke petani (swadaya), sebanyak 7 orang petani responden lainnya (77,78%) menyatakan tidak setuju dengan informasi yang



disampaikan dikarenakan mereka tidak melihat langsung penerapan informasi yang disampaikan oleh petani (penyuluh swadaya) tersebut.

### 3. Penanaman dan Pemupukan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanaman adalah split tanam antara jantan dan betina, perbandingan populasi jantan : betina, jarak tanam, penugalan dan jumlah benih per lubang. Pemupukan sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Pemupukan berarti memberikan unsur hara maupun nutrisi tambahan yang kurang atau tidak terdapat dalam tanah guna mengoptimalkan pertumbuhan, perkembangan dan hasil panen tanaman jagung.

Pada tahapan tatacara penanaman dan pemupukan sebagaimana yang terlihat pada Tabel 18, menunjukkan keseluruhan responden yang berjumlah 14 orang (100%) menyatakan setuju dengan tatacara penanaman dan pemupukan yang disampaikan oleh penyuluh swasta. Hal berbeda terjadi pada penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh sebanyak 14 orang petani (77,78%) menyatakan ragu-ragu dengan informasi yang disampaikan dikarenakan penyuluhan yang dibawakan oleh penyuluh pemerintah sudah diketahui sebelumnya dan menurutnya tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap penilaian mereka tentang tatacara persiapan tanam tersebut. Pada penyuluhan yang dilakukan oleh petani ke petani (swadaya), sebanyak 7 orang petani (77,78%) responden lainnya menyatakan tidak setuju dengan informasi yang disampaikan dikarenakan mereka tidak melihat langsung penerapan informasi yang disampaikan oleh petani (penyuluh swadaya) tersebut.

### 4. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman meliputi penjarangan dan penyulaman, penyiangan, pembumbunan, serta pengendalian hama dan penyakit. Dengan penjarangan maka dapat ditentukan jumlah tanaman per lubang sesuai dengan yang dikehendaki. Penyiangan bertujuan untuk membersihkan lahan dari tanaman pengganggu (gulma). Penyiangan dilakukan 2 minggu sekali. Pembumbunan dilakukan bersamaan dengan penyiangan dan bertujuan untuk memperkokoh posisi batang, sehingga tanaman tidak mudah rebah. Selain itu juga untuk menutup akar yang bermunculan di atas permukaan tanah karena adanya aerasi.

Berikutnya pada tahapan tatacara pemeliharaan tanaman, menunjukkan keseluruhan responden yang berjumlah 14 orang (100%) menyatakan setuju dengan tatacara persiapan tanam yang disampaikan oleh penyuluh swasta. Berbeda dengan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pemerintah, lebih dari separuh petani responden atau 11 orang petani (61,11%) menyatakan ragu-ragu dengan informasi yang disampaikan dikarenakan penyuluhan yang disampaikan oleh penyuluh pemerintah sudah diketahui sebelumnya dan menurutnya tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap penilaian mereka tentang tatacara pemeliharaan tanaman tersebut. Kemudian pada penyuluhan yang dilakukan oleh petani ke petani (swadaya), sebanyak 6 orang petani (66,67%) menyatakan ragu-ragu dengan informasi yang disampaikan oleh penyuluh swadaya.

#### 5. Pemanenan

Jagung yang telah siap panen atau sering disebut masak fisiologis ditandai dengan daun jagung/klobot telah kering, berwarna kekuning-kuningan, dan ada tanda hitam di bagian pangkal tempat melekatnya biji pada tongkol. Pemanenan jagung dilakukan pada saat jagung telah berumur sekitar 100 hst (hari setelah tanam) tergantung dari jenis varietas yang digunakan.

Tahapan tatacara berikutnya adalah tahapan tatacara pemanenan. Tabel 18 menunjukkan hampir seluruh petani responden atau 12 orang petani (85,71%) menyatakan setuju dengan tatacara pemanenan yang disampaikan oleh penyuluh swasta. Sebaliknya, pada penyuluhan pemerintah lebih dari separuh petani responden atau 13 orang petani (72,22%) menyatakan ragu-ragu dengan informasi yang disampaikan. Pada penyuluhan yang dilakukan oleh petani ke petani (swadaya), sebanyak 6 orang petani responden (66,67%) menyatakan tidak setuju dengan informasi yang disampaikan.

#### 6. Pasca panen

Tahapan tatacara yang terakhir adalah tatacara pasca panen. Tahapan pasca panen yang dapat dilakukan antara lain, pengupasan, pengeringan dan pemipilan. Tabel 18 menunjukkan separuh dari petani responden atau 9 orang petani (50%) menyatakan setuju dengan tatacara pasca panen yang disampaikan oleh penyuluh swasta. Selanjutnya, lebih dari separuh petani responden atau 13 orang petani (72,22%) menyatakan ragu-ragu dengan informasi yang disampaikan



oleh penyuluh pemerintah. Pada penyuluhan yang dilakukan oleh petani ke petani (swadaya), sebanyak 5 orang petani responden (55,56%) menyatakan tidak setuju dengan informasi yang disampaikan oleh penyuluh swadaya.

4.6.3. Keterampilan (Psikomotorik)

Aspek penyuluhan yang berikutnya adalah aspek psikomotorik (keterampilan). Aspek psikomotorik adalah aspek yang menyangkut pada perilaku yang riil dan nyata yang dapat diamati melalui pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan berperilaku. Bentuk nyata dari aspek ini adalah petani mampu menerapkan teknis budi daya tanaman jagung hibrida yang disampaikan. Lebih lengkapnya pendapat petani terhadap aspek psikomotorik dijelaskan pada Tabel 19 berikut :

Tabel 19. Pendapat Petani mengenai Aspek Psikomotorik

No	Uraian	Penyuluhan Swasta (%)		Penyuluhan Pemerintah (%)		Penyuluhan Swadaya (%)	
		Y	T	Y	T	Y	T
1.	Pengolahan tanah	11	3	14	4	7	2
2.	Persiapan tanam	12	2	15	3	7	2
3.	Penanaman dan pemupukan	11	3	10	8	6	3
4.	Pemeliharaan tanaman	11	3	14	4	8	1
5.	Pemanenan	11	3	15	3	7	2
6.	Pasca panen	12	2	15	3	7	2

(Keterangan : Y=Ya, T= Tidak)

Tabel 19 menunjukkan pendapat petani terhadap penyuluhan dilihat dari aspek psikomotorik yaitu kemampuan petani untuk menerapkan setiap tahapan pada teknis budi daya jagung hibrida.

1. Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah yang baik dan benar, yaitu dengan cara dibajak dan digaru. Pengolahan tanah untuk penanaman jagung dapat dilakukan dengan dua cara yaitu olah tanah sempurna (OTS) dan tanpa olah tanah (TOT) bila lahan gembur. Namun bila tanah berkadar liat tinggi sebaiknya dilakukan pengolahan tanah sempurna. Pada lahan yang ditanami jagung dua kali setahun, penanaman pada musim penghujan (rendeng) tanah diolah sempurna dan pada musim tanam

berikutnya (musim gadu) penanaman dapat dilakukan dengan tanpa olah tanah untuk mempercepat waktu tanam.

Pada tahapan tatacara pengolahan tanah menunjukkan sebahagian petani responden yang berjumlah 11 orang (78,57%) merasa mampu atau bisa menerapkan tatacara pengolahan tanah yang disampaikan oleh penyuluh swasta. Sementara pada penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pemerintah, lebih dari separuh petani responden atau 14 orang petani (77,78%) menyatakan bisa menerapkan informasi yang disampaikan dikarenakan informasi yang dibawakan oleh penyuluh pemerintah sudah diketahui sebelumnya dan menurut mereka telah mereka terapkan jauh sebelum informasi tersebut disampaikan. Pada penyuluhan yang dilakukan oleh petani ke petani (swadaya), 7 orang petani responden (77,78%) menyatakan bisa untuk menerapkan informasi pengolahan tanah yang disampaikan oleh penyuluh swadaya.

## 2. Persiapan Tanam

Benih yang akan digunakan sebaiknya bermutu tinggi, baik mutu genetik, fisik maupun fisiologinya. Berasal dari varietas unggul (daya tumbuh besar, tidak tercampur benih/varietas lain, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit). Sebelum benih ditanam, sebaiknya dicampur dulu dengan fungisida untuk menangkal serangan jamur. Sedangkan bila diduga akan ada serangan lalat bibit dan ulat agrotis, sebaiknya benih dimasukkan ke dalam lubang bersama-sama dengan insektisida butiran dan sistemik.

Pada tahapan tatacara persiapan tanam, sebanyak 12 orang petani responden (85,71%) menyatakan bisa menerapkan tatacara persiapan tanam yang disampaikan oleh penyuluh swasta karena mereka bisa memahami informasi yang diberikan oleh penyuluh swasta saat melakukan penyuluhan. Hal ini sama dengan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pemerintah, lebih dari separuh responden atau 15 orang petani (83,33%) menyatakan bisa menerapkan informasi persiapan tanam yang disampaikan oleh penyuluh pemerintah. Pada penyuluhan yang dilakukan oleh petani ke petani (swadaya), separuh dari petani responden yaitu 7 orang petani responden (77,77%) menyatakan bisa menerapkan informasi persiapan tanam yang disampaikan oleh penyuluh swadaya.



### 3. Penanaman dan Pemupukan

Pada tahapan penanaman dan pemupukan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah split tanam antara jantan dan betina, perbandingan populasi jantan : betina, jarak tanam, penugalan dan jumlah benih per lubang. Pemupukan sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Pemupukan berarti memberikan unsur hara maupun nutrisi tambahan yang kurang atau tidak terdapat dalam tanah guna mengoptimalkan pertumbuhan, perkembangan dan hasil panen tanaman jagung.

Pada tahapan tatacara penanaman dan pemupukan, sebanyak 11 orang petani (78,57%) menyatakan bisa menerapkan tatacara penanaman dan pemupukan yang disampaikan oleh penyuluh swasta. Berbeda dengan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pemerintah, sebanyak 10 orang petani responden (72,22%) menyatakan bisa menerapkan tatacara penanaman dan pemupukan yang dianjurkan oleh penyuluh pemerintah. Pada penyuluhan yang dilakukan oleh petani ke petani (swadaya), lebih dari separuh responden yaitu 6 orang petani responden (66,67%) menyatakan bisa menerapkan informasi penanaman dan pemupukan yang disampaikan oleh penyuluh swadaya tersebut.

### 4. Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan tanaman meliputi penjarangan dan penyulaman, penyiangan, pembumbunan, serta pengendalian hama dan penyakit. Dengan penjarangan maka dapat ditentukan jumlah tanaman per lubang sesuai dengan yang dikehendaki. Penyiangan bertujuan untuk membersihkan lahan dari tanaman pengganggu (gulma). Penyiangan dilakukan 2 minggu sekali. Pembumbunan dilakukan bersamaan dengan penyiangan dan bertujuan untuk memperkuat posisi batang, sehingga tanaman tidak mudah rebah. Selain itu juga untuk menutup akar yang bermunculan di atas permukaan tanah karena adanya aerasi.

Pada tahapan tatacara pemeliharaan tanaman, sebanyak 11 orang (78,57%) menyatakan bisa dan mampu menerapkan tatacara pemeliharaan tanaman yang disampaikan oleh penyuluh swasta. Berikutnya, pada penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pemerintah sebanyak 14 orang petani responden (77,78%) menyatakan bisa menerapkan informasi pemeliharaan tanaman yang disampaikan oleh penyuluh pemerintah. Sementara pada penyuluhan yang

dilakukan oleh petani ke petani (swadaya), sebanyak 8 orang petani responden (88,89%) menyatakan bisa menerapkan informasi pemeliharaan tanaman yang disampaikan oleh petani penyuluh swadaya.

#### 5. Pemanenan

Jagung yang telah siap panen atau sering disebut masak fisiologis ditandai dengan daun jagung/klobot telah kering, berwarna kekuning-kuningan, dan ada tanda hitam di bagian pangkal tempat melekatnya biji pada tongkol. Pemanenan jagung dilakukan pada saat jagung telah berumur sekitar 100 hst (hari setelah tanam) tergantung dari jenis varietas yang digunakan.

Tabel 19, menunjukkan pada tahapan tatacara pemanenan yang dilakukan oleh penyuluh swasta sebanyak 11 orang petani responden (78,57%) menyatakan bisa menerapkan penyuluhan yang disampaikan oleh penyuluh swasta. Pada penyuluhan pemerintah sebanyak 15 orang petani responden (83,33%) menyatakan bisa menerapkan informasi tatacara pemanenan yang disampaikan oleh penyuluh pemerintah. Selanjutnya pada penyuluhan yang dilakukan oleh petani ke petani (penyuluh swadaya), sebanyak 7 orang petani responden (77,77%) menyatakan bisa menerapkan informasi pemanenan yang disampaikan oleh penyuluhan swadaya.

#### 6. Pasca Panen

Tahapan pasca panen yang dapat dilakukan antara lain, pengupasan, pengeringan dan pemipilan. Pada tahapan tatacara pasca panen, menunjukkan sebanyak 12 orang petani responden (85,71%) menyatakan bisa menerapkan informasi tatacara pasca panen yang disampaikan oleh penyuluh swasta. Selanjutnya pada penyuluhan pemerintah, lebih dari separuh petani responden atau 15 orang petani (83,33%) menyatakan bisa menerapkan informasi yang disampaikan oleh penyuluh pemerintah. Sementara pada penyuluhan yang dilakukan oleh petani ke petani (swadaya), hampir seluruh petani responden yaitu 7 orang petani (77,77%) menyatakan bisa dan mampu menerapkan informasi yang disampaikan oleh petani penyuluh swadaya.

Dari Tabel 19, 80,95% petani merasa mampu dan 19,05% tidak mampu melaksanakan teknis budidaya sesuai dengan materi yang diberikan oleh penyuluh swasta. Sebanyak 76,86% petani merasa mampu dan 23,14% tidak mampu



melaksanakan teknis budidaya sesuai dengan materi yang diberikan oleh penyuluh pemerintah. Serta 77,78% petani merasa mampu dan 22,22% tidak mampu melaksanakan teknis budidaya sesuai dengan materi yang diberikan oleh penyuluh swadaya.

Berdasarkan kondisi riil di lapangan yang didapat dari hasil wawancara dengan petani responden diketahui bahwa ada beberapa petani responden yang pada tata cara pemanenan dan pasca panen kurang setuju dengan penyuluhan yang diberikan oleh penyuluhan swasta dan penyuluhan pemerintah. Alasannya disini disebutkan bahwa tata cara pemanenan mereka itu berbeda dengan hal yang disampaikan oleh penyuluhan tersebut, karena pada tahap tata cara panen petani tersebut sengaja melebihkan hari panen jagungnya sekitar 6-7 hari dari waktu yang dianjurkan oleh penyuluhan tersebut. Ini bertujuan agar hasil panen jagung yang telah dipanen tidak terlalu memiliki kandungan kadar air yang tinggi dan sehingga tidak terlalu lama pada saat proses penjemuran hasil panen jagungnya setelah pemanenan.

Berdasarkan uraian di atas adalah banyak para petani yang berpendapat setuju dengan arahan petunjuk teknis budi daya jagung pada saat melaksanakan sistem demplot, dan pada pelaksanaan penyuluhan pemerintah dan swadaya banyak yang mengatakan pendapat ragu-ragu. Begitu pula pada aspek afektif, banyak menyatakan setuju dengan penyuluhan swasta dibandingkan dengan penyuluhan pemerintah dan penyuluhan swadaya. Dilihat dari aspek psikomotorik pada penyuluhan swasta banyak responden yang berpendapat merasa bisa menerapkan informasi yang disampaikan oleh penyuluhan swasta. Hal ini dikarenakan adanya sistem demplot yang diadakan oleh penyuluhan swasta dan dapat memudahkan pemeliharaan petani dalam teknis budidaya jagung hibrida dibandingkan dengan penyuluhan pemerintah dan penyuluhan swadaya.

Hasil perhitungan seluruh persentase yang diperoleh petani untuk melihat pendapat petani terhadap penyuluhan secara keseluruhan tergambar pada Tabel 20:

Tabel 20. Persentase Pendapat Petani terhadap Materi Penyuluhan dari Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotorik

No.	Aspek	Penyuluhan Swasta			Penyuluhan Pemerintah			Penyuluhan Swadaya		
		S	R	T	S	R	T	S	R	T
1.	Kognitif	97,62	2,38	-	45,38	54,62	-	40,74	59,26	-
2.	Afektif	89,29	10,71	-	9,26	74,07	16,67	-	35,19	64,81
3.	Psikomotorik	Y	T		Y	T		Y	T	
		80,95	19,05		76,86	23,14		77,78	22,22	

(Keterangan :S= Setuju, R= Ragu-ragu, T=Tidak Setuju, Y=Ya, T=Tidak)

Sumber : Data Diolah, 2011

Tabel 20 menggambarkan dari segi kognitif tingkat pencapaian pendapat petani terhadap penyuluhan dilihat dari penyuluhan swasta, penyuluhan pemerintah dan penyuluhan swadaya. Dari Tabel 20, terlihat bahwa penyuluhan swasta pada Kelompok Tani BD II Silayang secara kognitif memperoleh persentase sebesar 97,62%, pada penyuluhan pemerintah di Kelompok Tani Nusa Indah memperoleh persentase sebesar 45,38% dan penyuluhan swadaya pada Kelompok Tani Parit Panjang Permai memperoleh persentase sebesar 40,74%. Sehingga di sini terlihat bahwa dalam tahap kognitif materi yang disampaikan oleh penyuluh swasta lebih mudah diterima dan dimengerti, jika dibandingkan dengan penyuluh pemerintah dan penyuluh swadaya.

Dari segi afektif tingkat pencapaian pendapat petani terhadap kegiatan penyuluhan dilihat dari penyuluhan pemerintah dan penyuluhan swasta pada Tabel 20, terlihat bahwa Kelompok Tani BD II Silayang memperoleh persentase sebesar 89,29% untuk penyuluhan swasta dan hanya 9,26% untuk penyuluhan pemerintah. Sedangkan untuk penyuluhan swadaya pada Kelompok Tani Parit Panjang Permai memperoleh persentase sebesar 35,19% untuk pendapat petani dengan kategori ragu-ragu. Sehingga disini terlihat bahwa dalam tahap afektif penyuluhan swasta mempunyai tingkat pendapat yang tinggi, untuk penyuluh pemerintah hanya sedikit petani yang setuju dengan penyuluh pemerintah, sementara tingkat afektif terhadap penyuluhan swadaya petani responden dikategorikan pada kategori ragu-ragu.

Berdasarkan Tabel 20, dari segi psikomotorik (keterampilan) petani responden memperoleh tingkat pencapaian kesamaan pendapat petani terhadap kegiatan penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh swasta pada Kelompok Tani



BD II Silayang sebesar 80,95%. Pada perolehan tingkat hasil psikomotorik (keterampilan) pada penyuluhan pemerintah sebesar 76,86% dan perolehan hasil psikomotorik (keterampilan) pada penyuluhan swadaya sebesar 77,78%.

Pemaparan di atas membuktikan bahwa pendapat petani terhadap materi yang disampaikan oleh penyuluhan swasta ternyata lebih banyak yang setuju dan mudah dimengerti dibandingkan pendapat petani terhadap penyuluhan pemerintah dan penyuluhan yang dilakukan dari petani ke petani (penyuluh swadaya). Hasil di lapangan menunjukkan pendapat petani terhadap kegiatan penyuluhan swasta mudah dimengerti oleh petani karena penyuluhan yang diberikan diperagakan secara langsung dalam sistem demplot kepada petani yang mengikuti acara penyuluhan.

Petani merasa mengerti dengan materi yang diberikan oleh penyuluh swasta karena menggunakan sistem demplot. Keuntungan demonstrasi adalah kesanggupan melihat suatu metode baru untuk dituangkan dalam demonstrasi cara. Tidak diperlukan adanya saling mempercayai yang tinggi antara petani dan penyuluh, karena petani dapat melihat sendiri segala sesuatunya dengan jelas. Agen penyuluhan pun tidak perlu melibatkan diri pada penguraian pesan yang berkemungkinan bisa saja keliru diartikan. Demonstrasi sangat berguna bagi orang yang tidak bisa berfikir secara abstrak. Walaupun gagasan utama harus dimungkinkan pada demonstrasi dalam bentuk visual, namun hubungan antara sebab dan akibat tidak selalu dapat dengan mudah divisualisasikan (Ban dan Hawkins, 1999)

Petani menggunakan bibit jagung yang dibawa oleh penyuluh swasta selain karena merasa mengerti dengan materi dan merasa bisa untuk mempraktekkannya, namun juga tertarik dengan janji penyuluh yang mengatakan bahwa produksi bibit jagung yang dibawakan lebih tinggi dibanding bibit jagung yang biasa dipakai oleh petani. Dapat dikatakan sesungguhnya kegiatan penyuluhan swasta meskipun pelaksanaannya relatif lebih baik dibanding penyuluh pemerintah dan swadaya, namun belum bisa merubah perilaku petani. Hal tersebut karena jika dilihat dari tahapan adopsi inovasi bisa dikatakan bahwa petani yang menggunakan benih jagung yang dibawakan oleh penyuluh swasta baru berada pada tahap "mencoba" artinya jika ternyata hasil yang diperoleh tidak

seperti yang dijanjikan oleh penyuluh swasta, maka petani tidak lagi menggunakan bibit tersebut.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Studi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Pendapati Petani mengenai materi Penyuluhan untuk Budidaya Jagung di Nagari Lubuk Basung selama bulan Februari sampai dengan Maret 2011, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan penyuluhan di Nagari Lubuk Basung untuk usahatani jagung hibrida terdiri dari pelaksanaan penyuluhan swasta, penyuluhan pemerintah dan penyuluhan swadaya. Penyuluhan dilaksanakan dengan dua tahap, yakni tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Pada penyuluhan swasta, penyuluh bersama-sama petani menyusun kegiatan perencanaan, sementara pada penyuluhan pemerintah, tidak mengadakan kegiatan perencanaan tetapi penyuluh hanya menjalankan program pemerintah. Sementara pada penyuluhan swadaya juga tidak ditemukan adanya kegiatan perencanaan. Pada tahapan pelaksanaan penyuluhan, penyuluh swasta, penyuluh pemerintah, dan penyuluh swadaya memiliki perbedaan. Pada penyuluhan swasta, kegiatan penyuluhan dilengkapi dengan metode demplot, selain menggunakan metode ceramah dan diskusi. Hal ini berbeda dengan penyuluhan pemerintah dan penyuluhan swadaya yang hanya menggunakan metode ceramah dan diskusi.
2. Secara umum berdasarkan hasil penelitian mengenai pendapat petani terhadap kegiatan penyuluhan swasta, penyuluhan pemerintah dan penyuluhan swadaya yang dilakukan di nagari Lubuk Basung ternyata jumlah petani yang setuju dengan materi penyuluhan dari penyuluh swasta dilihat dari aspek peningkatan pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik) lebih tinggi dibanding dengan penyuluh pemerintah dan penyuluh swadaya. Hal ini terlihat dari perolehan persentase penyuluhan swasta yang tinggi dan lebih efektif dibandingkan dengan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluhan pemerintah dan penyuluhan yang dilakukan oleh petani ke petani (swadaya).

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, maka dapat diambil beberapa saran yaitu :

1. Agar penyuluh swasta dapat mempertahankan tata cara penyuluhan yang dilakukan kepada kelompok tani dan melibatkan keseluruhan anggota-anggota petani yang ikut serta dalam pelaksanaan penyuluhan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan selesai.
2. Kepada penyuluhan pemerintah disarankan untuk menyesuaikan materi yang akan disampaikan pada petani dengan kebutuhan kelompok tani terhadap usahatani jagung hibrida dilapangan. Selain itu metoda yang digunakan hendaknya dapat meyakinkan petani untuk bisa menerima dan menerapkan informasi yang disampaikan.
3. Pada penyuluhan swadaya diharapkan dapat mengadakan kegiatan penyuluhan secara lebih terstruktur dan dengan waktu yang teratur.
4. Agar penyuluh swasta dan penyuluh swadaya melakukan kerjasama dalam kegiatan penyuluhan teknis budidaya jagung hibrida.
5. Agar penyuluh swasta dan penyuluh pemerintah melakukan kerjasama dalam kegiatan penyuluhan teknis budidaya jagung hibrida pada kelompok tani.
6. Bagi petani diharapkan agar dapat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan yang diberikan oleh agen penyuluhan swasta, penyuluhan pemerintah dan penyuluhan swadaya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2007. *Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan*. [cited 2008 July 23]. Available from [http://www.indonesia.go.id/id/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=3959](http://www.indonesia.go.id/id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3959).
- Anonim. 2009. *Budidaya Jagung Manis Hibrida*. <http://tentangperbenihan.blogspot.com/2009/04/petunjuk-budidaya-tanaman-jagung-manis.html>. [diakses pada 23 Juli 2011]
- Anonim. 2007. *Budidaya Jagung*. <http://insidewinme.blogspot.com/2007/11/budidaya-jagung.html>. [diakses pada 23 Juli 2011]
- Admadja, Entang Sastra 1986. *Penyuluhan Pertanian*.
- Apriyani, Misra. 2007. *Proses Komunikasi pada Kelompok Tani dalam Menyebarkan Teknologi tentang Metode Sistem Rice Intensification (SRI) di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Padang*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian. Universitas Andalas. Padang.
- Ban, A.W. Van Den dan H.S Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius. Bandung.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Kependudukan dalam Angka Kabupaten Agam. Sumatera Barat*.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Kependudukan dalam Angka Kabupaten Agam. Sumatera Barat*.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Kabupaten Agam dalam Angka. Sumatera Barat*.
- BPTP. 2008. *Teknologi Budidaya Jagung*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Balai Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian. Bogor.
- Departemen Pertanian. 2002. *Pedoman Umum Bantuan Langsung Masyarakat tahun 2002*. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2004. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Jakarta.
- Deperiky, Dedet. 2011. *Peran Kelembagaan Suku Melayu dalam Optimalisasi Penggunaan Lahan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kabupaten Limapuluh Kota*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian. Unand. Padang.

- Harjo. 2008. *Inovasi Baru dan Pertama di Indonesia : Asosiasi Penyuluh Swasta Sragen Terbaik*. <http://www.google.com>. [15 maret 2008]
- Hilma, Mesva. 2000. *Pesepsi Petani Terhadap Pelaksanaan Sistem On Farm Oleh Penyuluh Pertanian*. [Skripsi] Fakultas Pertanian. Universitas Andalas. Padang.
- Indrawijaya, Andi. 1983. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Sinar Baru.
- Kartasapoetra, A.G. 1988. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*, Bina Aksara, Jakarta. Januari.
- Kriyantono,S. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Madja, Soekandar Wiriat. 1973. *Pokok-Pokok Penyuluhan Pertanian*. Yasa Guna.
- Mahdi. 2004. *Penyuluhan Pertanian Dan Penyuluh Sebagai Tenaga Profesional*. Makalah disampaikan pada Workshop se-Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Padang
- Mardikanto, Totok. 1993. *Pembangunan Penyuluhan Pertanian*. Penerbit Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Mardikanto, Totok. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Penerbit Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Marlina, Sovia. 2005. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan di Kab. Padang Pariaman*. Skripsi Fakultas Pertanian. Universitas Andalas. Padang
- Marwin. 2001. *Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian pada Tanaman Padi Sawah di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*. [Skripsi] Fakultas Pertanian. Universitas Andalas. Padang.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rasdakarya.
- Mosher, AT. 1977. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. CV. Yasaguna. Jakarta.
- Mubyarto. 1986. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES: Jakarta
- Nazir.M. 2003. *Metode Penelitian*. Gahlia Indonesia. Jakarta.
- Nugraha. 2006. *Tabloid Sinar Tani*. Indonesia .[21 Juni 2006]
- Profil Lembaga Tani Nelayan. 2009. Kabupaten Agam.



- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivera, W.M and Cary, J.W. 1997. *Privatizing Agricultural Extension* dalam Burton *et.al.* (ed). *Improving Agricultural Extension: A Reference Manual*. FAO.
- Sadriana.2009. *Persepsi Petani Terhadap Penerapan Padi Tanam Sebatang (PTS), Studi Kasus Kelompok Tani Badai Selatan Kenagarian Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman*. [Skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. 112 hal.
- Salim. Farida. 2004. *Peran Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian Malang dalam Pengembangan Penyuluh Pertanian*. Ekstensia, Tahun XI-2004
- Samsudin, U. 1987. *Dasar-Dasar Penyuluhan Dan Modernisasi Pertanian*, Bina Cipta Bandung.
- Sinar Tani. 2009. *Penyuluh Pertanian di Era Informasi*. <http://www.google.com> [18 Oktober 2009]
- Slamet, Margono. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. IPB Press. Bogor.
- Soeprapto, H. S. 1998. *Bertanam jagung*. Penebar swadaya.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta : Jakarta
- Subejo. 2009. *Revolusi Hijau dan Penyuluhan Pertanian*. <http://www.google.com> [12 May 2009].
- Subejo. *Penyuluhan Pertanian Indonesia : Isu Privatisasi dan Implikasinya*. <http://www.google.com> [12 May 2009].
- Suhardiyono. 1992. *Petunjuk Bagi Penyuluhan Petani*, Erlangga.
- Suparno, Paul. 1997. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius, Welter de Gruyter. (buku diakses di <http://books.google.co.id/books?id=0CQk-vjPmoUC&printsec=frontcover> pada 30 Mei 2009).
- Suparta, Nyoman. 2000. *Penyuluhan Sistem Agribisnis Suatu Pendekatan Holistik*. Fakultas Peternakan Universitas Udayana. <http://www.google.com>.
- Surachmat, W. 1982. *Dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*. Rineka Cipta. Yogyakarta.

- Suryantini. 2004. *Pemanfaatan Informasi Teknologi Pertanian oleh Penyuluh*. Jurnal Perpustakaan Pertanian Volume 13, Nomor 1, 2004.
- Sutoro, Y. Sulaiman, dan Iskandar. 1988. *Budidaya Tanaman Jagung*. Dalam Subandi, M. Syam, dan A widjono (Penyunting) : Jagung. Badan Litbag Pertanian. Putlibang Tanaman Pangan.
- Syahyuti. 2005. *Pembangunan Pertanian dengan Pendekatan Komunitas : Rancangan Program Prima Tani*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
- Tambunan, Marliana Damayanti. 2000. *Hubungan Karakteristik Individual Penyuluh dengan Pemanfaatan Sumber Informasi Oleh Penyuluh di Kabupataen Tanah Datar, Provinsi SUMBAR*. [Skripsi] Fakultas Pertanian. Universitas Andalas. Padang.
- The World Bank. 2002. *World Bank Development Report 2002: Building Institutions for Market*. Oxford University Press.
- Undang – Undang Penyuluhan Nomor 16 tahun 2006. Departemen Pertanian
- Qamar, M.K. 2002. *Global Trends in Agricultural Extension: Challenges Facing Asia and the Pacific Region* dalam Research-Extension-Farmer Interface and teknologi Transfer. FAO.
- Wahyu, Mulyani Fuji. 2009. *Proses Difusi Teknologi Padi Tanam Sabatang (PTS)*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian. Universitas Andalas Padang.
- Wahyuni, Monika. 2010. *Persepsi Petani Terhadap Penerapan Pertanian Organik Studi Kasus Kelompok Tani Parambahan Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Padang Pariaman*. [Skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas.



**Lampiran 1. Anggota Kelompok Tani BD II Silayang**

<b>No</b>	<b>Nama Anggota</b>	<b>Jabatan</b>
1	Len	Ketua
2	Wati	Bendahara
3	Lembak	Sekretaris
4	Janimar	Anggota
5	Giando	Anggota
6	Tahen	Anggota
7	Wen	Anggota
8	Lian	Anggota
9	Yuyun	Anggota
10	Erni	Anggota
11	Upik	Anggota
12	Sumi	Anggota
13	Gadis	Anggota
14	Lis	Anggota
15	Piah	Anggota
16	Sariani	Anggota
17	Kaman	Anggota
18	Farida	Anggota
19	Timin	Anggota
20	Zul	Anggota
21	Baiti	Anggota
22	Aman diman	Anggota
23	Mariami	Anggota
24	Mariati	Anggota
25	Sukar	Anggota
26	Diah	Anggota
27	Ros	Anggota
28	Ris	Anggota

**Lampiran 2. Kelompok Tani Nusa Indah**

<b>No.</b>	<b>Nama Anggota</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Zulfi	Ketua
2.	Ar nofri	Anggota
3.	Irmedi	Anggota
4.	Neniarda	Anggota
5.	Yunizar	Anggota
6.	Riswendi	Anggota
7.	Ermiyeti	Anggota
8.	Nesdazetri	Anggota
9.	Yuspit helmi	Anggota
10.	Martiane	Anggota
11.	Petmayelis	Anggota
12.	Efrizal	Anggota
13.	Eka Putra	Anggota
14.	Ridara Sridewi	Anggota
15.	Darniati	Anggota
16.	Yulniefia	Anggota
17.	Effendi St.Kayo	Anggota
18.	Yusniarti	Anggota
19.	B.St.sarif	Anggota
20.	Mudirman	Anggota
21.	Nurini	Anggota
22.	Samsinur	Anggota
23.	Masni	Anggota
24.	Khairul	Anggota
25.	Sofia Mulyani	Anggota
26.	Nismarlis	Anggota
27.	Erniwati	Anggota
28.	Zarneti	Anggota
29.	Dasmiarti	Anggota
30.	Epidelmis	Anggota
31.	Tena	Anggota
32.	Aiak	Anggota
33.	Sidi Armen	Anggota
34.	Y.DT.Samiak	Anggota
35.	Kartini	Anggota
36.	Milda Yetri	Anggota



**Lampiran 3. Anggota Kelompok Tani Parit Panjang Permai**

<b>No.</b>	<b>Nama Anggota</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Roni	Ketua
2.	Nanda	Bendahara
3.	A.Manggun	Sekretaris
4.	Asrul	Anggota
5.	Nemok	Anggota
6.	Ida	Anggota
7.	Misnar	Anggota
8.	ST.Makmur	Anggota
9.	Syamsul Bahri	Anggota
10.	Depi	Anggota
11.	I.ST.Iskandar	Anggota
12.	Armaneli	Anggota
13.	Eri	Anggota
14.	B.ST.Rajo Ameh	Anggota
15.	Cien	Anggota
16.	ST.Sulaiman	Anggota
17.	Mar ST.Makruf	Anggota

**Lampiran 4. Tabulasi Data Responden Penelitian Kelompok Tani BD II Silayang**

<b>No</b>	<b>Petani responden</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>Umur</b>	<b>Jumlah tanggungan</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Luas lahan (Ha)</b>	<b>Status kepemilikan</b>	<b>Pengalaman bertani</b>
1	1	L	30	3	SMP	0,5	P	8
2	2	P	40	8	SD	0,75	P	17
3	3	P	45	6	SD	0,5	P	25
4	4	L	37	5	SMA	0,25	P	15
5	5	P	40	8	SD	0,5	P	18
6	6	L	35	3	SMA	0,4	P	9
7	7	P	53	7	SD	0,25	P	21
8	8	P	35	5	SD	0,75	P	9
9	9	L	26	3	SD	0,3	P	8
10	10	P	40	3	SD	0,5	P	19
11	11	P	38	5	SD	0,4	P	10
12	12	P	35	5	SD	0,75	P	11
13	13	P	58	6	SD	0,5	P	38
14	14	P	32	3	SMP	0,25	P	8



Lampiran 5. Tabulasi Data Responden Penelitian Kelompok Tani Nusa Indah

No	Petani responden	Jenis kelamin	Umur	Jumlah tanggungan	Pendidikan	Luas lahan (Ha)	Status kepemilikan	Pengalaman bertani
1	1	L	38	6	SMP	0,5	P	12
2	2	P	42	5	SD	0,25	P	15
3	3	L	38	3	SD	0,5	P	17
4	4	P	47	7	SMP	0,4	P	21
5	5	P	44	6	SD	0,25	P	18
6	6	L	56	6	SMP	0,75	P	26
7	7	L	38	3	SMA	0,75	P	11
8	8	L	63	5	PT	0,3	P	35
9	9	P	27	3	SMA	0,5	P	5
10	10	L	56	5	PT	0,4	P	20
11	11	P	52	4	SMP	0,75	P	20
12	12	P	42	2	SMA	0,5	P	11
13	13	L	52	5	SD	0,25	P	30
14	14	L	40	5	PT	0,5	P	10
15	15	L	55	5	SD	0,75	P	25
16	16	P	48	4	SD	0,5	P	20
17	17	L	32	3	SMA	0,25	P	12
18	18	P	73	8	SD	0,5	P	53

**Lampiran 6. Tabulasi Data Responden Penelitian Kelompok Tani Parit Panjang Permai**

<b>No</b>	<b>Petani responden</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>Umur</b>	<b>Jumlah tanggungan</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Luas lahan (Ha)</b>	<b>Status kepemilikan</b>	<b>Pengalaman bertani</b>
1	1	L	29	4	SMA	0,75	P	5
2	2	L	58	5	SD	0,3	P	25
3	3	L	33	4	SMP	0,5	P	10
4	4	L	50	6	SD	0,4	P	6
5	5	L	43	6	SD	0,75	P	23
6	6	P	47	5	SD	0,5	P	17
7	7	L	54	5	SMP	0,5	P	21
8	8	L	56	6	SD	0,5	P	36
9	9	L	49	6	SD	0,4	P	29



Lampiran 7. Perhitungan Skor Pendapat Petani terhadap Penyuluhan Swasta pada Kelompok Tani BD II Silayang

Responden	Kognitif						Afektif						Psikomotorik						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	1	3	50
4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	1	3	3	3	3	1	48
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	1	3	3	3	51
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	50
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	1	3	3	3	51
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	1	3	49
9	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	1	3	1	3	3	48
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	52
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	1	3	3	3	48
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	52
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	50
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	52
Jumlah	42	42	42	42	42	40	42	42	42	42	40	35	36	38	36	36	36	38	Jumlah = 713
	Jumlah kognitif = 250						Jumlah afektif = 243						Jumlah psikomotorik = 220						

Keterangan : 3 = Setuju, 2 = Ragu-ragu, 1 = Tidak Setuju

Lampiran 8. Hasil Perhitungan Pendapat Petani terhadap Penyuluhan Pemerintah pada Kelompok Tani Nusa Indah

Responden	Kognitif						Afektif						Psikomotorik						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	1	3	3	3	46
2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	1	3	3	3	42
3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3	1	3	42
4	2	3	2	3	2	2	1	2	2	2	2	1	3	3	3	1	3	3	39
5	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	1	1	3	3	3	3	1	3	42
6	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	1	2	3	3	1	3	3	3	43
7	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	1	3	1	3	3	3	42
8	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	1	3	3	3	45
9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	3	3	1	3	3	38
10	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	1	3	3	3	3	1	40
11	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	3	3	3	3	3	1	37
12	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	1	3	3	3	45
13	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	48
14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	1	3	3	3	39
15	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	3	3	3	3	3	1	35
16	3	2	3	2	3	2	2	2	2	3	3	2	1	3	1	3	3	3	43
17	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1	3	3	3	3	43
18	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	1	1	3	3	41
Jumlah	45	46	44	48	41	41	37	36	36	34	35	31	46	50	38	46	48	48	Jumlah = 749
	Jumlah Kognitif = 265						Jumlah Afektif = 208						Jumlah Psikomotorik = 276						

Keterangan : 3 = Setuju, 2 = Ragu-ragu, 1 = Tidak Setuju



**Lampiran 9. Hasil Perhitungan Pendapat Petani terhadap Penyuluhan Swadaya pada Kelompok Tani Parit Panjang Permai**

Responden	Kognitif						Afektif						Psikomotorik						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2	3	3	1	3	3	3	41
2	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	1	1	3	1	3	3	3	3	42
3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	3	3	1	3	3	3	37
4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	1	1	42
5	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	3	3	3	44
6	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	1	3	3	1	44
7	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	3	3	38
8	2	3	2	3	2	2	2	2	2	1	1	2	3	3	3	3	1	3	40
9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	1	3	3	38
Jumlah	23	24	23	22	19	19	19	19	19	15	12	14	23	23	21	25	23	23	Jumlah = 366
	Jumlah Kognitif = 130						Jumlah Afektif = 98						Jumlah Psikomotorik = 138						

*Keterangan : 3 = Setuju, 2 = Ragu-ragu, 1 = Tidak Setuju*

**Lampiran 10. Data Jumlah Penyuluh Pemerintah Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penyuluh Pemerintah</b>
1	Kecamatan Baso	11
2	Kecamatan Tilatang Kamang	8
3	Kecamatan Kamang Magek	7
4	Kecamatan Ampek Angkek	6
5	Kecamatan Candung	6
6	Kecamatan Banuhampu	8
7	Kecamatan Sungai Puar	7
8	Kecamatan Palupuh	8
9	Kecamatan Palembayan	6
10	Kecamatan IV Koto	5
11	Kecamatan Matur	4
12	Kecamatan Tanjung Raya	9
13	Kecamatan Tanjung Mutiara	4
<b>14</b>	<b>Kecamatan Lubuk Basung</b>	<b>8</b>
15	Kecamatan Ampek Nagari	5
16	Kecamatan Malalak	4
<b>Total</b>		<b>106</b>

*Sumber : Profil Lembaga Tani – Nelayan Kab.Agam 2009*



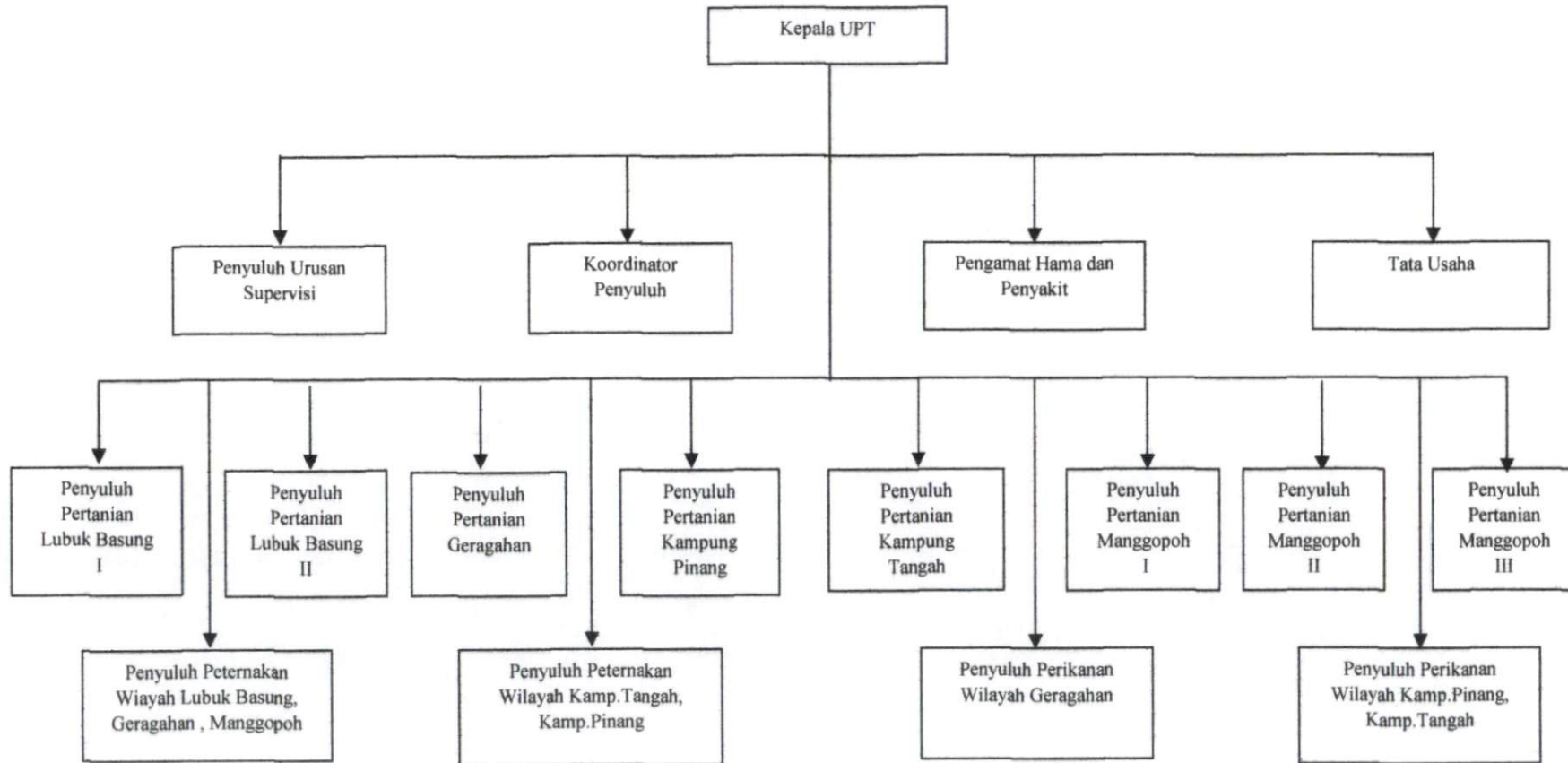
**Lampiran 11. Data Jumlah Kelompok Tani di Nagari Lubuk Basung**

<b>No.</b>	<b>Nama Kelompok</b>	<b>Alamat</b>
1.	Kandis Jaya	Bulaan
2.	Siguhung	Siguhung
3.	Bina Usaha	Talago
4.	Dama Sikucing	Dama Sikucing
5.	Arai Pinang	Kp. Tarandam
6.	Bandar Baru	Bd. Baru
7.	Pelangi	Parit Panjang
8.	<b>Parit Panjang Permai</b>	<b>Parit Panjang</b>
9.	<b>Nusa Indah</b>	<b>Lubuk Mangindo</b>
10.	Bumi Silayang Elok	Parit Panjang
11.	Bumi Silayang Maimbau	Parit Panjang
12.	<b>BD II Silayang</b>	<b>Parit Panjang</b>
13.	Silayang Mudik	Parit Panjang
14.	Simpang Ampalu	Parit Panjang
15.	Pilang Koto	Parit Panjang
16.	Caniago	Parit Panjang
17.	Silayang	Bulaan
18.	Siguhung Jaya	Siguhung

*Sumber : Profil Lembaga Tani – Nelayan Kab.Agam 2009*

Lampiran 12.

Struktur Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)  
Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4K2P) Kecamatan Lubuk Basung





**Lampiran 13. Data Jumlah Penyuluh Swasta oleh Perusahaan Bibit Jagung di Kabupaten Agam.**

<b>No</b>	<b>Nama perusahaan</b>	<b>Jumlah Penyuluh</b>
1	BISI International Tbk	1
2	PT. Dupont	1
3	PT. Syngenta	1
4	PT. Jagung Hibrida Sulawesi	1
<b>Total</b>		<b>4</b>

*Sumber : Data Primer wawancara 2011*

## Lampiran14. UU Penyuluhan No 16 Tahun 2006

### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia;
- b. bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan;
- c. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- e. bahwa pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dewasa ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
2. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
9. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
13. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
14. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
15. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.

16. Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
17. Kelembagaan petani, pekebun, peternak nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
18. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
19. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
20. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
21. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
22. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
23. Program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
24. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.
25. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
26. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.
27. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan, atau menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
28. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
30. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat.



### **Pasal 3**

Tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu:

- a. memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
- b. memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi;
- c. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- d. memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; dan
- e. mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

### **Pasal 4**

Fungsi sistem penyuluhan meliputi:

- a. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
- c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
- e. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
- f. menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan
- g. melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

## **BAB III**

### **SASARAN PENYULUHAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara.
- (2) Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3) Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **Pasal 6**

- (1) Kebijakan penyuluhan ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan sistem penyuluhan.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan
  - b. penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

#### **Pasal 7**

- (1) Strategi penyuluhan disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi metode pendidikan orang dewasa; penyuluhan sebagai gerakan masyarakat; penumbuhkembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan; keadilan dan kesetaraan gender; dan peningkatan kapasitas pelaku utama yang profesional.
- (2) Dalam menyusun strategi penyuluhan, Pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan kebijakan penyuluhan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

### **BAB V**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kelembagaan Penyuluhan**

#### **Pasal 8**

- (1) Kelembagaan penyuluhan terdiri atas:
  - a. kelembagaan penyuluhan pemerintah;
  - b. kelembagaan penyuluhan swasta; dan
  - c. kelembagaan penyuluhan swadaya.
- (2) Kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
  - a. pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan;
  - b. pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan;
  - c. pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan; dan
  - d. pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan.
- (3) Kelembagaan penyuluhan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan setempat.
- (4) Kelembagaan penyuluhan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.
- (5) Kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan berbentuk pos penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat nonstruktural.



### **Pasal 9**

- (1) Badan penyuluhan pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
  - a. menyusun kebijakan nasional, programa penyuluhan nasional, standardisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
  - b. menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan;
  - c. melaksanakan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan;
  - d. melaksanakan kerja sama penyuluhan nasional, regional, dan internasional; dan
  - e. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.
- (2) Badan Penyuluhan pada tingkat pusat bertanggung jawab kepada menteri.
- (3) Untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat, diperlukan wadah koordinasi penyuluhan nasional nonstruktural yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.

### **Pasal 10**

- (1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan, menteri dibantu oleh Komisi Penyuluhan Nasional.
- (2) Komisi Penyuluhan Nasional mempunyai tugas memberikan masukan kepada menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

### **Pasal 11**

- (1) Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
  - b. menyusun kebijakan dan programa penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional;
  - c. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; dan
  - d. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.
- (2) Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi diketuai oleh gubernur.
- (3) Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi dibentuk sekretariat, yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon IIa, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

### **Pasal 12**

- (1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi, gubernur dibantu oleh Komisi Penyuluhan Provinsi.
- (2) Komisi Penyuluhan Provinsi bertugas memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.

### **Pasal 13**

- (1) Badan pelaksana penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c bertugas:
  - a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
  - b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
  - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
  - e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
  - f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- (2) Badan pelaksana penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/kota, bupati/walikota dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota.
- (2) Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan masukan kepada bupati/walikota sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

#### **Pasal 15**

- (1) Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
  - a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota;
  - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
  - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
  - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
  - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.
- (3) Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan Kabupaten/Kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.

#### **Pasal 16**

- (1) Pos penyuluhan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
- (2) Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk:
  - a. menyusun program penyuluhan;



- b. melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan;
- c. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
- d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- h. memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

#### **Pasal 17**

Kelembagaan penyuluhan swasta dan/atau swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan penyuluhan yang terintegrasi dengan program penyuluhan;
- b. melaksanakan pertemuan dengan penyuluh dan pelaku utama sesuai dengan kebutuhan;
- c. membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan;
- f. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. menyampaikan informasi dan teknologi usaha kepada sesama pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta perdesaan swadaya bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah dan pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi; dan
- k. melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha.

#### **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.

### **Bagian Kedua Kelembagaan Pelaku Utama**

#### **Pasal 19**

- (1) Kelembagaan pelaku utama beranggotakan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang dibentuk oleh pelaku utama, baik formal maupun nonformal.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi.

- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diberdayakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya.

## **BAB VI TENAGA PENYULUH**

### **Pasal 20**

- (1) Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan/atau penyuluh swadaya.
- (2) Pengangkatan dan penempatan penyuluh PNS disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keberadaan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.

### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya.
- (3) Peningkatan kompetensi penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang diatur dengan peraturan menteri.

### **Pasal 22**

- (1) Penyuluh PNS merupakan pejabat fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alih tugas penyuluh PNS hanya dapat dilakukan apabila diganti dengan penyuluh PNS yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENYELENGGARAAN**

### **Bagian Kesatu Programa Penyuluhan**

#### **Pasal 23**

- (1) *Programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan.*
- (2) *Programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi, dan programa penyuluhan nasional.*
- (3) *Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan.*
- (4) *Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota, Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi, atau Kepala Badan Penyuluhan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan.*
- (5) *Programa penyuluhan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketahui oleh kepala desa/kelurahan.*



#### **Pasal 24**

- (1) Programa penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis, dan bertanggung gugat.

#### **Pasal 25**

Ketentuan mengenai pedoman penyusunan programa penyuluhan diatur dengan peraturan menteri.

### **Bagian Kedua Mekanisme Kerja dan Metode**

#### **Pasal 26**

- (1) Penyuluh menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan programa penyuluhan.
- (2) Penyuluhan dilaksanakan dengan berpedoman pada programa penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.
- (3) Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan ditetapkan dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

### **Bagian Ketiga Materi Penyuluhan**

#### **Pasal 27**

- (1) Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Materi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

#### **Pasal 28**

- (1) Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.
- (2) Lembaga pemerintah pemberi rekomendasi wajib mengeluarkan rekomendasi segera setelah proses pengujian dan administrasi selesai.
- (3) Teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Peran Serta dan Kerja Sama**

**Pasal 29**

Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan.

**Pasal 30**

- (1) Kerja sama penyuluhan dapat dilakukan antar kelembagaan penyuluhan, baik secara vertikal, horisontal, maupun lintas sektoral.
- (2) Kerja sama penyuluhan antara kelembagaan penyuluhan nasional, regional, dan/atau internasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri.
- (3) Penyuluh swasta dan penyuluh swadaya dalam melaksanakan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dapat berkoordinasi dengan penyuluh PNS.

**BAB VIII****SARANA DAN PRASARANA****Pasal 31**

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya dapat memanfaatkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

**BAB IX****PEMBIAYAAN****Pasal 32**

- (1) Untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan tersedianya pembiayaan yang memadai untuk memenuhi biaya penyuluhan.
- (2) Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan.
- (4) Jumlah tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada jenjang jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penyuluhan yang diselenggarakan oleh penyuluh swasta dan penyuluh swadaya, pembiayaannya dapat dibantu oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

**Pasal 33**



Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah daerah maupun swasta atau swadaya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penyuluh, pemerintah memfasilitasi terbentuknya organisasi profesi dan kode etik penyuluh.
- (4) Setiap penyuluh yang menjadi anggota organisasi profesi tunduk terhadap kode etik penyuluh.
- (5) Organisasi profesi penyuluh berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk memberikan pertimbangan terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

## **BAB XI KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 35**

- (1) Setiap penyuluh PNS yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dengan memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi dan kode etik penyuluh.
- (2) Setiap pejabat pemberi rekomendasi yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- (3) Setiap penyuluh swasta yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sebagai penyuluh dengan memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi dan kode etik penyuluh.
- (4) Setiap penyuluh swadaya yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sebagai penyuluh swadaya, kecuali materi teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

### **Pasal 36**

Setiap orang dan/atau kelembagaan penyuluhan yang melakukan penyuluhan dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian sosial ekonomi, lingkungan hidup, dan/atau kesehatan masyarakat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 37**

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan yang telah dilaksanakan sebelum Undang-Undang ini dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap dapat dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi waktu penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.

**Pasal 38**

Kelembagaan penyelenggara penyuluhan pada tingkat pusat, yang telah ada saat Undang-Undang ini diundangkan harus sudah disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di bidang penyuluhan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

**Pasal 40**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 41**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 15 Nopember 2006  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 15 Nopember 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 92